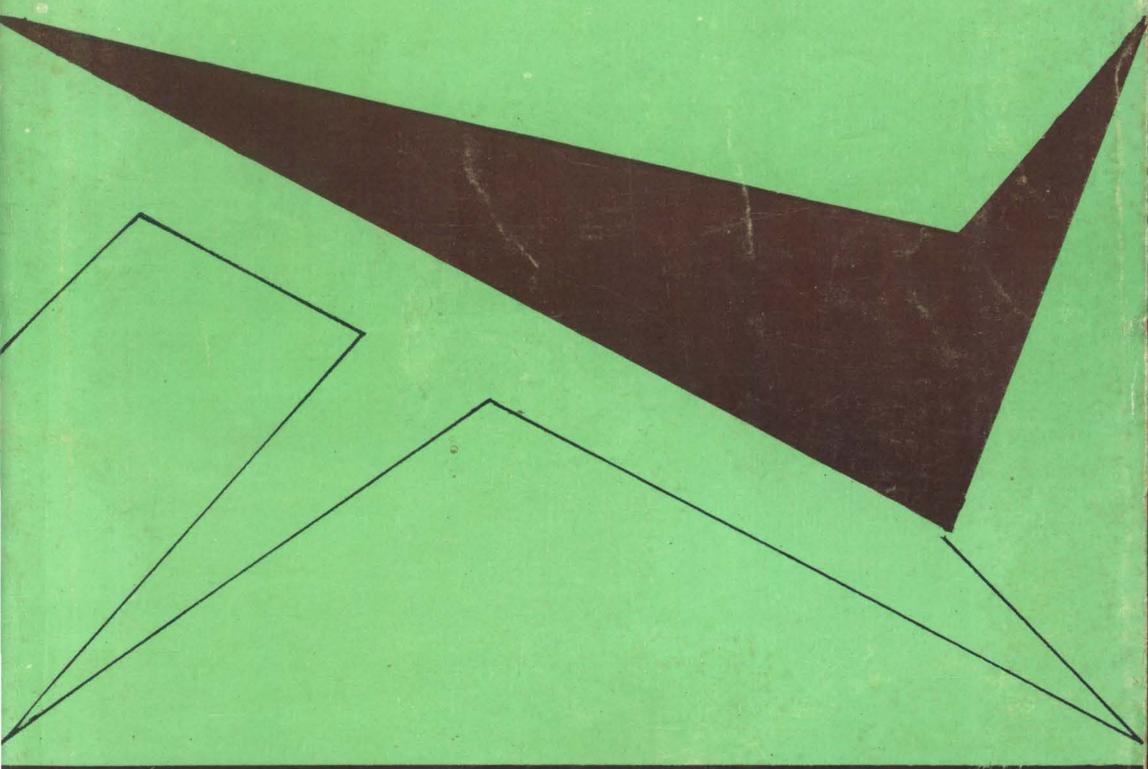


Sejarah Sosial

Daerah Sulawesi Tengah
(Wajah Kota Donggala Dan Palu)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984/1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL

DAERAH SULAWESI TENGAH

(WAJAH KOTA DONGGALA DAN PALU)

Tim Peneliti/Penulis :

1. Sulaiman Mamar (Ketua)
2. Farid Mappalahere (Anggota)
3. P. Wayong (Anggota)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
1984/1985

1980
1981

SEJARAH SOSIAL

DAERAH SULAWESI TENGAH

WYAH KOTA DONGGALA DAN PALU

Tin Penelitian:

1. Subianto Manu (Pulu)
2. Firdausi (Pulu)
3. F. Wasono (Pulu)

DEPARTEMEN KEHIDUKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN KAJIAN TRADISIONAL
STUDI DAN PENELITIAN DAERAH TRADISIONAL
SEJARAH SOSIAL
PALU

Penyunting :

1. DR. Taufik Abdullah
2. DR. Djoko Surjo

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta

1. 1950
2. 1951
3. 1952

1950
1951

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlu-

kan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Desember 1984
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut; seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya

pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di Provinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Desember 1984

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II PROFIL KOTA DONGGALA DAN PALU	
A. Tata Lingkungan	9
B. Perhubungan	14
C. Demografi	21
D. Pemerintahan	31
BAB III TO KAILI DI SULAWESI TENGAH	
A. Suku-suku Bangsa Asli	37
B. Sistem Kesatuan Hidup dan Kekerabatan ..	40
C. Pemerintahan Tradisional	50
D. Beberapa Kerajaan	56

BAB IV	DONGGALA–PALU DALAM LINTASAN SEJARAH	
	A. Kontak dengan Hindia Belanda	62
	B. Aksi Perlawanan Masyarakat Tanah Kaili	66
	C. Masa Pendudukan Jepang	80
	D. Masa Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	85
BAB V	PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI	
	A. Sistem Sosial	97
	B. Kegiatan-kegiatan Ekonomi	107
BAB VI	KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN	
	A. Kependidikan	128
	B. Keagamaan	138
	C. Organisasi-organisasi Sosial, Pendidikan dan Keagamaan	145
BAB VII	KESIMPULAN	150
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	159
	LAMPIRAN	161

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian dan penulisan Sejarah Sosial Daerah merupakan kegiatan baru dalam dunia ilmu Sejarah, baik di negara-negara maju dan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju, kegiatan penelitian dan penulisan Sejarah Sosial baru mendapat perhatian dan tempat sebagai kegiatan yang penting pada tahun 1950-an.

Kegiatan semacam itu mula-mula dipelopori oleh sarjana-sarjana Perancis, yakni: Lucian Febvre dan Mac Bloch. Penulisan sejarah yang beraliran Annales itu pada akhirnya menjadi model bagi generasi baru penulis Sejarah Sosial yang semakin memperkuat kedudukannya dalam dunia penulisan sejarah. Penulisan sejarah yang beraliran Annales ini termasuk banyak berpengaruh di kalangan para penulis Sejarah Sosial di Amerika.¹⁾

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia, kegiatan penelitian dan penulisan Sejarah Sosial dapat dikatakan masih sangat langka, terutama yang bercorak Sejarah Sosial Daerah.

1) Kuntowijoyo, *Beberapa Model Penulisan Sejarah Sosial, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*, Jakarta, 1983/1984, hal. 1.

Tulisan-tulisan sejarah yang sudah ada pada umumnya bercorak sejarah politik yang isinya lebih banyak menguraikan sistem pemerintahan raja-raja, zaman kolonial, zaman Jepang, dan zaman revolusi.

Khusus di daerah Sulawesi Tengah, kegiatan dalam bidang sejarah, baru berada pada taraf inventarisasi dan dokumentasi. Itu pun uraiannya lebih menitik beratkan pada inventarisasi data-data sejarah politik, yakni Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah dan Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah.

Karya tulis ini adalah merupakan hasil penelitian dan penulisan Sejarah Sosial Daerah di Sulawesi Tengah yang baru pertama kali dilakukan oleh para ilmuwan sejarah. Dengan kegiatan yang merupakan langkah awal ini sudah barang tentu menghadapi banyak masalah yang berupa hambatan, terutama dalam usaha mencari naskah-naskah dan dokumen-dokumen menurut penggalan (waktu) yang telah ditetapkan oleh Proyek IDSN Pusat.

Kurangnya naskah dan dokumen yang diperlukan dalam penulisan Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tengah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain seperti: (1) dokumen-dokumen yang dibuat oleh bangsa Belanda pada umumnya dibawa ke negerinya, (2) naskah-naskah dan dokumen yang ditinggalkan oleh Belanda semuanya berbahasa Belanda sehingga masyarakat kurang tertarik untuk menyimpannya, (3) pada zaman pemerintahan Jepang, dokumen-dokumen yang tersisah yang berbahasa Belanda dibakar oleh bangsa Jepang, (4) sejak jaman kerajaan sampai jaman Jepang, masalah pengarsipan kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Hal itu disebabkan karena perhatian masyarakat Indonesia terpusat kepada bagaimana cara dan taktik untuk melawan dan mengusir pada penjajah, (5) masih sulitnya komunikasi yang menghubungkan antar kota kabupaten di Sulawesi Tengah pada waktu

itu, sehingga menyulitkan pelaksanaan penulisan peristiwa-peristiwa sosial.

Sesudah Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan tahun 1950-an, pemerintah dan masyarakat daerah Sulawesi Tengah masih sibuk dalam kegiatan untuk memperjuangkan daerah Sulawesi Tengah menjadi suatu daerah yang otonom setingkat dengan daerah kabupaten lainnya di Indonesia. Dengan perjuangan tersebut maka lahirlah daerah Poso dan daerah Donggala menjadi daerah otonom setingkat dengan kabupaten.²⁾

Dalam keadaan pemerintahan yang tidak menentu dan memusat seperti itu, sudah barang tentu pengelolaan administrasi dan pengarsipan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu para ilmuwan kurang mendapat perhatian untuk menulis tentang peristiwa-peristiwa sosial di Sulawesi Tengah pada waktu itu, apalagi kota-kota di daerah Sulawesi Tengah semuanya lahir dengan sendirinya tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa sekitar tahun 1960-an, barulah para ilmuwan melakukan kegiatan penulisan tentang daerah Sulawesi Tengah. Demikian pula masalah administrasi dan pengarsipan sudah mulai dilakukan dengan baik, terutama setelah daerah Sulawesi Tengah berubah menjadi daerah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964.

B. Tujuan Penelitian

Ketika proses pembangunan telah meningkat ke taraf apa yang disebut "*Solf propelling growth*", maka masalah sosial semakin meningkat pula dan seakan-akan kurang mendapat perhatian dan perhitungan di kalangan para pembuat kebijakan dalam pembangunan. Jika keadaan yang demikian dibiarkan ber-

2) Sul. Teng. Dalam Angka, Kantor Statistik dan BAPPEDA, Palu, 1981 hal. 9.

larut-larut maka akan menimbulkan situasi yang akan meniadakan arti pembangunan yang telah dicapai, yaitu seperti halnya dengan apa yang dialami oleh negara-negara lain yang sedang berkembang.

Memang telah menjadi kenyataan bahwa semakin tinggi teknologi yang dicapai suatu bangsa, maka semakin rumit pula masalah-masalah sosial yang dihadapi sebagai dampak negatifnya. Problem sosial semacam ini semakin bertambah terasa jika kita mau memperhatikan secermat mungkin masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Masalah-masalah sosial, ekonomi, politik seperti kependudukan, kemiskinan, perburuhan, pertikaian, dan sebagainya cukup banyak memberi pengaruh terhadap kelancaran pembangunan di masa yang lampau. Namun sampai kini masih kurang mendapat perhatian di kalangan para ilmuwan dan para penentu kebijakan.

Kegiatan-kegiatan para sejarawan selama ini lebih banyak berupa inventarisasi dan dokumentasi serta penulisan sejarah politik. Kegiatan-kegiatan semacam itu rasanya belum memadai tanpa memperhatikan dan menulis sejarah yang bersifat sosial.

Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang menjadi tantangan bagi para ilmuwan, terutama bagi para sejarawan. Dengan tantangan inilah sehingga penelitian dan penulisan sejarah sosial daerah di beberapa propinsi di Indonesia dilakukan. Untuk jelasnya, penelitian dan penulisan sejarah sosial ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian dan penulisan sejarah sosial ini bertujuan untuk membuat catatan sejarah mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi pada penggalan (waktu) tertentu dan lokasi tertentu sehingga peristiwa-peristiwa sosial budaya, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya dapat diinventarisir dan dianalisa secara historis-sosiologis.

Dengan memakai pendekatan kedua disiplin ilmiah ini, maka hasil penelitian dan penulisan sejarah sosial ini dapat menunjukkan bagaimana dinamik kesejarahan kelompok masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya yang berada di daerah-daerah.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian dan penulisan sejarah sosial ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Ingin memperkenalkan Kota Donggala dan Kota Palu sebagai bagian kepulauan Indonesia yang selama ini masih kurang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- b. Ingin memperkenalkan masyarakat Donggala dan Palu, khususnya bagi masyarakat Kaili sebagai penduduk asli kepada masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya.
- c. Ingin mencatat dan menganalisa peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di kota Donggala dan Kota Palu pada penggalan (waktu) zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan.
- d. Dengan pencatatan dan analisa secara historis-sosiologis tentang peristiwa-peristiwa sosial di masa itu, maka dapatlah diketahui bagaimana dinamik masyarakat Kota Donggala dan Kota Palu pada waktu itu.
- e. Hasil penelitian dan penulisan sejarah sosial ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat Sulawesi Tengah di masa-masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dengan cakupan tugas tentang penelitian dan penulisan Sejarah Sosial daerah-daerah dari 21 Propinsi di Indo-

nesia yang telah ditetapkan oleh Proyek IDSN Jakarta, maka penelitian dan penulisan Sejarah Sosial Propinsi Sulawesi Tengah mendapat thema yang bersifat umum. Hal itu dapat dimengerti karena kota-kota yang ada di Sulawesi Tengah, utamanya Kota Donggala dan Kota Palu yang terpilih menjadi lokasi penelitian tidak memiliki sifat dan fungsi yang lebih menonjol seperti kota-kota lainnya di Indonesia.

Dengan thema yang bersifat umum itu, maka arah penelitian dan penulisan Sejarah Sosial Kota Donggala dan Kota Palu akan menitik beratkan pada unsur numerik, yaitu selain memperhatikan sejarah kota itu sendiri, juga kegiatan-kegiatan masyarakat.

Suatu penulisan sejarah sosial yang bersifat numerik dapat meninjau perkembangan fisik kota seperti letak kota dan luas kota, demografi, segregasi pemukiman baik penggolongan etnis, ekonomi, maupun masalah pendidikan dan sebagainya. Selain itu perkembangan sarana dan prasarana kota ikut menjadi pembahasan.³⁾

Dengan arah penulisan sejarah yang bersifat numerik seperti ini, maka berpedoman kepada TOR yang telah ditetapkan oleh Proyek IDSN Jakarta dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Donggala – Palu dan sekitarnya, maka ruang lingkup penulisan Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Profil Kota Donggala – Palu, meliputi :
 - a. Tata lingkungan, seperti: letak, iklim, gundul/berhutan, daerah maritim atau agraris,
 - b. Perhubungan, seperti: perhubungan udara, laut dan darat,
 - c. Demografis, seperti: jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi etnis.

- d. Pemerintahan, seperti: kedudukan Kota Donggala dan Palu dalam administrasi propinsi, kegiatan-kegiatan politik, dan sebagainya.
2. To Kaili (orang Kaili) di Sulawesi Tengah, meliputi:
 - a. Suku-suku bangsa asli
 - b. Sistem kesatuan hidup dan kekerabatan, meliputi: pola tempat tinggal, pelapisan sosial, sistem kekerabatan
 - c. Pemerintahan tradisional
 - d. Beberapa kerajaan
3. Donggala – Palu dalam lintasan sejarah, meliputi :
 - a. Hubungan Donggala – Palu (tanah Kaili) dengan luar negeri seperti Portugis, bangsa Melayu, Belanda dan Jepang.
 - b. Aksi perlawanan masyarakat terhadap penjajah Belanda, seperti: Perang Donggala, Perang Sigi Biromaru dan Palu Perang Kulawi dan sebagainya
 - c. Revolusi Kemerdekaan
4. Perkembangan sosial – ekonomi, meliputi:
 - a. Sistem sosial, seperti: pola tempat tinggal, pelapisan sosial dan sebagainya
 - b. Demografis, seperti: jumlah penduduk, migrasi, perkembangan penduduk
 - c. Kegiatan-kegiatan ekonomi, meliputi: jenis-jenis mata pencaharian, industri jasa dan badan-badan sosial, jaringan pasar dan sebagainya
 - d. Pembagian kerja dan hubungan sosial
5. Pendidikan dan keagamaan, meliputi:
 - a. Pendidikan, seperti: status sekolah dan jumlahnya, banyaknya murid dan guru, perkembangannya.
 - b. Agama, seperti: agama dalam arti ibadah, agama dalam arti sosial.
 - c. Organisasi-organisasi pendidikan, sosial, politik dan keagamaan, seperti: Muhammadiyah, Al'chairat, Bala keselamatan, Syarikat Islam (SI), Nahdatul Ulama (NU), Masyumi, organisasi Wanita dan pemuda dan sebagainya.

Perlu ditambahkan disini bahwa walaupun ruang lingkup penulisan berpedoman kepada TOR yang ada, akan tetapi karena kurangnya dokumen-dokumen dan catatan sejarah yang dapat menunjang penulisan ini, maka disana-sini masih ditemukan kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan seperti itu dapat diatasi pada waktu-waktu berikutnya.

BAB II

PROFIL KOTA DONGGALA DAN PALU

A. Tata Lingkungan

1. Letak Geografis

Donggala adalah salah satu pusat pemukiman penduduk yang tertua (kota tertua) di Sulawesi Tengah. Wilayah Kota Donggala terletak pada pinggiran sebelah Timur Selat Makassar dan di mulut sebelah barat Teluk Palu. Kota Donggala berada pada bagian pantai sebelah Barat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Banawa sekarang (dulu kerajaan Banawa). Kota Donggala yang luas wilayahnya ± 9.950 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- di sebelah utara Selat Makassar dan Teluk Palu;
- di sebelah timur Teluk Palu;
- di sebelah selatan wilayah kota Palu, dan
- di sebelah barat gunung Gawalise.¹⁾

Dari gambaran tentang luas dan batas wilayah Kota Donggala tersebut di atas, dapat digambarkan lebih lanjut bahwa kira-kira dua per empat wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan dan

1) Panitia Peneliti Tentang Kemungkinan Kota Donggala ditingkatkan statusnya menjadi kota Administratif, Palu, 1981, hal. 15.

seperempat selebihnya dibatasi oleh laut. Dengan demikian, Kota Donggala terletak pada suatu lembah di pesisir sebelah barat Teluk Palu.

Lain halnya dengan Kota Palu yang terletak 35 Km di sebelah selatan Kota Donggala, yakni persis di ujung sebelah dalam Teluk Palu yang merupakan suatu lembah. Kota Palu dapat dikatakan bahwa usianya masih relatif muda bila dibandingkan dengan Kota Donggala dan kota Poso di Sulawesi Tengah. Kota Palu yang terletak di lembah Palu, dibelah dua oleh sungai Palu sehingga wilayah yang berada di sebelah timur sungai Palu disebut Palu Timur (Kecamatan Palu Timur) dan wilayah yang berada di sebelah barat sungai Palu disebut Palu Barat (Kecamatan Palu Barat). Luas wilayah kota Palu adalah ± 10.138 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- di sebelah barat dibatasi oleh Teluk Palu dan Desa Watu-sumpu;
- di sebelah utara dibatasi oleh desa Tondo;
- di sebelah timur dibatasi oleh Desa Kawatuna, dan
- di sebelah selatan dibatasi oleh Desa Palupi.²⁾

Kedua kota ini (Kota Donggala dan Kota Palu), masing-masing terletak pada wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala.

2. Iklim

Pada umumnya Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh dua jenis musim, yaitu musim barat dan musim timur. Hal ini disebabkan oleh keadaan alam yang berbukit-bukit yang memanjang dari utara ke selatan. Keadaan alam ini membawa iklim yang berbeda pada dua daerah, yakni daerah-daerah yang terletak di sebelah Timur mendapat angin timur dan musim penghujan pada bulan April – Oktober. Sedangkan daerah-daerah yang berada pada bagian sebelah Barat akan mengalami musim kemarau. Sebaliknya daerah-daerah yang berada di sebelah Barat pada bulan Oktober–April akan

2) Sumber: Kantor Walikota Administratif Palu.

mengalami angin barat dan musim penghujan. Sedangkan daerah-daerah yang berada di sebelah timur akan mengalami musim kemarau. Dengan demikian, Kota Donggala dan Palu terletak pada bagian sebelah barat akan mengalami musim penghujan pada musim angin barat dan mengalami musim kemarau pada musim angin timur.

Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kota Donggala dan Palu lebih banyak mengalami musim angin timur, sehingga lebih banyak mengalami musim kemarau. Hal itu disebabkan karena kota Palu dan Donggala letaknya persis di garis khatulistiwa. Keadaan curah hujan antara Kota Donggala dan Palu dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kota Donggala mendapat curah hujan rata-rata \pm 926 mm atau rata-rata 94 hari hujan setahun. Sedangkan Kota Palu lebih rendah lagi, yakni curah hujan rata-rata 901 mm atau rata-rata 50 hari hujan setiap tahun.³⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Palu memiliki curah hujan yang paling rendah di seluruh Indonesia.⁴⁾

Kota Palu yang terletak di garis khatulistiwa dan mendapat curah hujan yang cukup rendah, maka udaranya cukup panas. Namun angka-angka tentang tinggi-rendahnya suhu Kota Palu dan Donggala belum dapat diperoleh datanya. Data-data yang ada adalah mencakup daerah Sulawesi Tengah. Di daerah yang rendah, suhunya berkisar antara 25° – 31°C . Sedangkan di daerah dataran tinggi, suhunya sekitar 20° – 30°C dengan kelembaban rata-rata 71 sampai 76%.

Karena curah hujan yang rendah membawa dampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat setempat. Warga masyarakat setempat memandang air sebagai di atas segala-galanya. Pandangan ini menyebabkan tumbuhnya dengan subur faham animisme, seperti mengkeramatkan sumber mata air, mengadakan

-
- 3) Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah; Rencana Pengukuhan dan Pemetaan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Palu, 1981, hal. 6.
 - 4) Pemerintah Wilayah Kota Administratif Palu, op-cit, hal. 3.

upacara tradisional minta hujan (wunja), mengambil nama-nama pepohonan menjadi nama-nama kampung/desa dan sebagainya. Kesemua kegiatan itu bertujuan agar hujan lebih banyak turun.

3. Topografi

Keadaan topografi Kota Donggala terdiri atas tanah landai, lembah, berbukit, gunung-gunung terjal yang mengelilingi kota. Kota Donggala yang merupakan bahagian pesisir utara dan barat Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, terletak pada ketinggian satu meter sampai dengan seratus meter di atas permukaan laut. Daerah yang merupakan lembah adalah hasil timbunan Hindia Belanda ketika mulai membangun Kota Donggala pada tahun 1888. Daerah lembah inilah yang menjadi pusat pemukiman penduduk Kota Donggala dari dahulu sampai sekarang. Daerah berbukit-bukit yang tanahnya terdiri atas batu dan kapur juga merupakan wilayah pemukiman penduduk sebagai perkembangan Kota Donggala. Sedangkan daerah yang bergunung-gunung sebahagian besar terdiri dari batu dan kapur merupakan wilayah pertanian penduduk. Gunung-gunung ini terletak pada bagian sebelah utara Kota Donggala, yakni di pesisir selat Makassar. Karena keadaan tanahnya yang berupa batu dan kapur, ditambah dengan kurangnya hujan yang turun, maka daerah pegunungan nampak kekeringan dan gundul. Dalam keadaan tanah pegunungan tersebut sehingga tidak memungkinkan para petani ladang memperoleh hasil yang memadai.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh keadaan tanah pegunungan seperti itu ialah terjadinya erosi ketika musim penghujan datang. Erosi yang timbul ketika hujan turun mengakibatkan tertimbunnya jalan-jalan poros Donggala – Palu. Dapat ditambahkan bahwa di wilayah Donggala – Palu banyak terdapat sungai kecil yang kering (kuala) yang bermuara ke Teluk Palu. Apabila hujan turun agak keras, maka terjadilah banjir pasir, tanah dan batu-batu yang menutup jalan-jalan dan pemukiman penduduk.

Lain halnya dengan keadaan wilayah Kota Palu yang diapit oleh dua sisi gunung tersebut merupakan suatu lembah. Namun barisan dua sisi gunung tersebut terletak jauh dari pusat kota Palu, kecuali di sebelah Selatan. Daratan Kota Palu berada pada ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. Dilihat dari keseluruhan, maka luas lembah Palu $\pm 350 \text{ km}^2$ (panjang 35 km dan lebar 7–12 km). Dengan demikian luas wilayah kota Palu diperkirakan hanya 2,9% dari luar seluruh lembah Palu (10.138 Ha).

Keadaan tanah Kota Palu juga termasuk tanah berbatu-batu dan berkapur, akan tetapi lebih subur dibandingkan dengan tanah Kota Donggala. Hal itu disebabkan karena adanya endapan humus tanah yang mengalir dari kedua sisi pegunungan yang mengapitnya. Selain itu lembah Palu dibelah oleh sebuah sungai yakni Sungai Palu. Sungai Palu ini panjangnya kurang lebih 60 km yang berhulu dari sungai Miu dan sungai Gumbasa serta bermuara ke Teluk Palu. Dengan keadaan tanah Kota Palu seperti ini memungkinkan penduduk lebih banyak yang memilih lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Jika seandainya curah hujan agak tinggi, maka sistem bercocok tanah sawah dan ladang dapat terlaksana dengan baik dan memproduksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat setempat.

4. Kota Maritim dan Agraris

Seperti uraian pada bagian terdahulu bahwa Kota Donggala terletak di pesisir pantai Selat Makassar dan Teluk Palu,

Seperti uraian pada bagian terdahulu bahwa Kota Donggala ngaruhi alam maritim. Apalagi Kota Donggala mula-mula lahir karena di wilayah itu terletak sebuah pelabuhan laut (Pelabuhan Donggala) sebagai satu-satunya pelabuhan laut yang besar di Sulawesi Tengah pada waktu itu. Selain itu keadaan tanahnya yang kurang memungkinkan penduduk melakukan sistem mata pencaharian pertanian yang lebih produktif (sistem bercocok tanam di sawah). Dengan keadaan lingkungan hidup yang demi-

kian, maka penduduk lebih banyak memilih lapangan pekerjaan seperti: mencari ikan di laut (nelayan), perdagangan antar pulau dan antar daerah, buruh pelabuhan, petani kelapa dan sebagainya. Berdasarkan dengan gambaran di atas, maka Donggala dapat dikategorikan sebagai kota maritim.

Lain halnya dengan Kota Palu yang terletak di pesisir bagian dalam Teluk Palu, ternyata penduduknya sejak dahulu sampai sekarang lebih banyak yang memilih lapangan pekerjaan sebagai petani dari pada nelayan atau jenis-jenis mata pencaharian lainnya. Mereka yang bertempat tinggal di pesisir dan mencari ikan di laut atau di sungai, hanya sekedar berupa pekerjaan sampingan. Sedangkan pekerjaan utamanya adalah sebagai petani. Hal itu disebabkan karena lingkungan fisik yang berupa daratan (lembah) lebih memungkinkan untuk memperoleh sumber-sumber kehidupan yang memadai seperti kelapa, padi, jagung, palawija dan sebagainya.

Pada mulanya masyarakat Kota Palu merupakan masyarakat agraris, akan tetapi lama kelamaan perkembangan kota Palu semakin meningkat sehingga areal pertanian penduduk semakin berkurang. Di lain pihak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat pula. Dengan demikian pandangan hidup masyarakat yang lebih banyak berorientasi ke sistem pertanian akhirnya berubah dan beralih ke bidang-bidang usaha dagang, angkutan, industri dan jasa, pegawai negeri dan sebagainya. Namun demikian, Kota Palu dalam kurun waktu 1900–1950-an masih dapat digolongkan sebagai kota agraris.

B. Perhubungan

Masalah perhubungan atau transportasi merupakan kebutuhan yang penting artinya dalam kehidupan umat manusia.

5) Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala, Tanah Kalli, Palu, 1956, hal. 46.

Transportasi ternyata telah menjadi ciri kemajuan suatu kebudayaan dan sekaligus menjadi beban suatu kebudayaan masyarakat tertentu.⁶⁾ Baik sebagai masyarakat perkotaan yang sedang mengalami perkembangan dan terutama bagi masyarakat perkotaan yang sudah maju. Demikian halnya dengan Kota Donggala dan Palu sebagai kota kecil yang sementara bertumbuh, masalah perhubungan sangat memegang peranan penting; baik perhubungan laut, darat maupun udara. Namun dalam kurun waktu 1900–1950-an, sarana dan prasarana perhubungan laut yang paling memegang peranan utama. Hal itu dimungkinkan karena di wilayah Kota Donggala terdapat pelabuhan laut sejak dahulu kala.

1. Perhubungan Laut

Kota Donggala yang letaknya di pesisir Selat Makassar dan memiliki pelabuhan laut (Pelabuhan Donggala), termasuk jalur lalu lintas perdagangan laut di Indonesia. Karena Kota Donggala memiliki sarana pelabuhan laut yang cukup strategis, sehingga menjadi pelabuhan transit baik kapal-kapal dari luar negeri seperti Singapura, Jepang, dan sebagainya maupun kapal-kapal dalam negeri seperti: dari Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, Kalimantan, Manado, Ternate dan sebagainya. Dengan kedatangan kapal-kapal transit tersebut, maka barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Kota Donggala dan Palu dapat terpenuhi. Selain itu barang-barang hasil produksi petani seperti kopra, minyak kelapa dan hasil-hasil pertanian dan hutan dapat di ekspor melalui perhubungan laut.

Kegiatan perhubungan laut di Kota Donggala dan Palu sudah sejak lama berlangsung, yaitu mulai jaman Jepang, jaman kemerdekaan dan sampai kini. Pada jaman kerajaan sampai zaman kemerdekaan, Kota Donggala yang berfungsi sebagai penghubung dalam pelayanan kebutuhan masyarakat yang berada di pantai barat, maka Pelabuhan Donggala sangat memegang

6) B.N. Marbun, *Kota Masa Depan*, Erlangga, Jakarta, 1979, hal. 96.

peranan penting.⁷⁾ Dengan alat transpor yang berupa perahu layar, maka kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan pembangunan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat dari pada mempergunakan perhubungan darat.

Walaupun Pelabuhan Donggala masih tergolong pelabuhan kecil bila dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya di Indonesia. Akan tetapi Pelabuhan Donggala pada waktu itu cukup besar peranannya terhadap perkembangan dinamika penduduk kota di wilayah itu, terutama penduduk Kota Donggala. Namun setelah dibangun Pelabuhan Udara Mutiara dan Pelabuhan Laut Pantoloan disekitar Kota Palu, nampak peranan Pelabuhan Donggala agak berkurang dan bahkan pertumbuhan dinamika masyarakat Kota Donggala ikut menurun pula. Mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa perkembangan Kota Donggala seakan-akan menjadi mandeg atau statis setelah pelabuhan laut dipindahkan ke Pantoloan yang jaraknya ± 50 km dari Kota Donggala.

Kebijakan pemerintah dalam pemindahan Pelabuhan Donggala ke Pantoloan sebenarnya kurang mendapat dukungan dari masyarakat Donggala. Hal ini terbukti karena Pelabuhan Donggala tetap dipergunakan baik perahu layar maupun kapal-kapal tertentu. Akan tetapi volume bongkar muat barang dan penumpang sudah agak berkurang bila dibandingkan sebelumnya.

Dapat ditambahkan bahwa Kota Donggala lebih banyak dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dibanding dengan Kota Palu. Hal itu disebabkan karena adanya Pelabuhan Donggala. Kedatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Belanda, Jepang dan sekutu ke Kota Donggala karena adanya sarana dan prasarana perhubungan tersebut. Angkutan laut yang merupakan alat perhubungan yang sangat memegang peranan. Hanya saja jumlah mengenai kapal/perahu yang masuk/keluar

7) Daerah-daerah Pantai Barat yang termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Bana-wa (kota Donggala) adalah Sindue, Sirenja, Balaesang, Damsol dan Tawaeli.

serta arus penumpang/barang tidak diperoleh datanya dari tahun 1900–1960-an. Dengan demikian angka-angka statistik tentang kapal/perahu dan muatan tidak dapat dikemukakan dalam tulisan ini.

2. Perhubungan Udara

Perhubungan udara dengan menggunakan pesawat di Kota Donggala dan Palu mula-mula dilakukan oleh Hindia Belanda. Kira-kira pada tahun 1923, kontroliur Belanda yang berkedudukan di Gunung Bale Donggala mula-mula mendaratkan pesawat helikopter. Pendaratan pesawat itu dilakukan di lapangan terbuka disekitar rumah kediaman kontroler. Kira-kira pada tahun 1936, Belanda bersama masyarakat membuat lapangan udara di Sidera (Pelabuhan Udara Sidera) sekitar 15 km di sebelah timur Kota Palu. Pelabuhan udara di Sidera ini selain didarati oleh pesawat helikopter juga didarati oleh pesawat Angkatan Udara Belanda. Berhubung karena pelabuhan udara Sidera terlalu jauh dari tempat berkedudukan kontroler (60 km dari Donggala dan 15 km dari Palu). Pada kira-kira tahun 1939–1941, lapangan udara dipindahkan ke Tatura (Lapangan Udara Mutiara sekarang) yang jaraknya ± 5 km dari Palu.

Sejak tahun 1923 sampai 1942, fasilitas perhubungan udara yang dipergunakan oleh Hindia Belanda demi untuk memperlancar komunikasi dengan orang-orang Belanda yang ada di Pulau Jawa, Makassar, Manado dan lain-lain tempat di Sulawesi Tengah. Demikian pula pada tahun 1942–1945, fasilitas perhubungan udara hanya dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Kemudian pada tahun 1950, volume penerbangan pesawat udara di Palu – Donggala semakin meningkat. Namun pada waktu itu masih dikuasai oleh tentara Sekutu dan tentara NICA. Sekitar tahun 1960-an, perhubungan udara antar kota Donggala – Palu dengan kota-kota lain seperti Makassar, Manado dan sebagainya semakin meningkat dan sudah mulai dirasakan oleh

masyarakat setempat. Walaupun jadwal penerbangan pada waktu itu hanya satu kali sebulan.⁸⁾

Dapat ditambahkan pula bahwa kegiatan perhubungan udara telah dikenal oleh masyarakat Donggala – Palu sejak tahun 1923 sampai sekarang. Namun kegiatan perhubungan udara dalam kurun waktu 1923 sampai 1950-an, praktis dikuasai oleh bangsa-bangsa asing demi kepentingan penjajahan. Sedangkan masyarakat Kota Donggala – Palu dan sekitarnya, baru dapat menikmati fasilitas perhubungan udara sekitar tahun 1960-an. Itupun masih terbatas kepada orang-orang tertentu yang dapat menjangkau biayanya. Akan tetapi fasilitas perhubungan udara pada waktu itu dapat dikatakan sudah cukup berperan terhadap pertumbuhan dinamika masyarakat kota Donggala – Palu secara keseluruhan.

3. Perhubungan Darat

Pada zaman kerajaan, sarana perhubungan darat masih sangat terbatas sekali, baik yang berupa sarana (kendaraan) maupun yang berupa prasarana (jalan raya). Kendaraan yang dipergunakan untuk berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain adalah berupa kuda beban dan gerobak yang ditarik oleh sapi. Jenis kendaraan semacam inipun agak terbatas. Sedangkan alat transpor dalam kota adalah seperti: Dokar dan sepeda. Khusus alat transpor gerobak (geroba) merupakan alat angkutan darat yang dapat dipergunakan dalam jarak jauh untuk mengangkat hasil pertanian. Dan bahkan ada jenis gerobak besar yang memiliki atap. Gerobak semacam ini selain dipergunakan sebagai alat angkatan, juga sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal. Mereka yang memilih pekerjaan berdagang secara kecil-kecilan dan mengunjungi beberapa pasar di kampung-kampung, harus menempuh perjalanan berbulan-bulan. Dalam perjalanan itu, semua anggota keluarga (satu rumah tangga) ikut serta dalam gerobak

8) Hasil Wawancara dengan Bapak Simba Laiya Poleganti, tanggal 7 Januari 1984 di Kampung Kabonena, Palu Barat.

itu. Di dalam gerobak itulah mereka memasak, makan, tidur, hubungan suami istri dan sebagainya.⁹⁾

Adapun keadaan jalan raya pada itu masih berbentuk jalan tanah dan banyak terhalang oleh sungai-sungai (kuala). Walaupun sungai-sungai (kuala) tersebut tidak selamanya berair, akan tetapi sering terjadi banjir secara tiba-tiba dan bahkan aliran sungai sering berpindah-pindah sehingga sulit untuk membuat jembatan. Dengan demikian perhubungan darat antara satu kerajaan dengan kerajaan lain sering macet dan memakan waktu cukup lama. Dampak selanjutnya adalah terjadinya kelambatan dinamika sosial masyarakat di daerah itu.

Kemudian setelah Hindia Belanda berada di wilayah Donggala dan Palu, sarana dan prasarana perhubungan darat menjadi meningkat. Jalan-jalan raya yang ada ditingkatkan menjadi jalan kerikil (pengerasan) dan bahkan membuka jalan-jalan baru yang menghubungkan daerah-daerah yang masih terpencil di pedesaan. Kira-kira pada tahun 1940-an; sudah ada jalan-jalan utama yang beraspal, terutama jalan-jalan yang menghubungkan kerajaan-kerajaan penting seperti; jalan poros Donggala – Palu. Usaha pembangunan jalan raya ini banyak melibatkan warga masyarakat, yakni semua laki-laki dewasa dikerahkan tenaganya untuk bekerja membuat jalan. Perintah untuk bekerja membuat jalan senantiasa disertai kekerasan dari pihak Belanda, sehingga rakyat merasa bekerja paksa dan mengalami penderitaan. Walaupun usaha-usaha pembuatan jalan ini lebih banyak menguntungkan pihak Belanda selama masa penjajahannya dan dipihak lain rakyat lebih banyak merasakan pahitnya. Akan tetapi dibalik kepahitan itu terdapat pula keuntungan, yakni dapat mempergunakan jalan-jalan tersebut untuk kelancaran pengangkutan hasil-hasil ladang/kebun yang ada di pedesaan. Dan yang lebih penting lagi ialah hasil kerja paksa yang berupa jalan dapat diwariskan kepada anak cucunya.

9) Wawancara dengan Bapak H. Rusdi Toana (dosen Untad dan anggota DPRD Tingkat I) Tanggal 20 September 1983 di Palu.

Sejalan dengan semakin meningkatnya prasarana perhubungan darat tersebut, maka sarana angkutan darat semakin maju pula. Pada waktu itu (kira-kira tahun 1930–1940-an) sudah ada kendaraan beroda empat (mobil) di Kota Donggala dan Palu. Mereka yang memiliki mobil adalah Kontro Liur Belanda, Raja (Magau) yang dipergunakan untuk kelancaran pemerintahan kolonial. Selain itu, pengusaha-pengusaha Cina dan Arab yang kaya sudah ada pula yang memiliki mobil yang dipergunakan mengangkut barang-barang dagangan dari Pelabuhan Donggala. Adapun jumlah mobil pada waktu itu diperkirakan paling banyak 20 buah.¹⁰⁾

Pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang, perhubungan dan kemajuan di bidang perhubungan darat tidak banyak mengalami perubahan, baik dari segi sarana maupun dari segi prasarana. Hal itu disebabkan karena keadaan ekonomi semakin merosot dan kekacauan dalam masyarakat semakin meningkat pula. Sekitar tahun 1950–1960-an, baru lah nampak adanya kemajuan yang berarti di bidang perhubungan darat. Jalan-jalan sudah mulai diperbaiki dan diaspal. Demikian pula jumlah kendaraan semakin bertambah pula, baik kendaraan beroda empat maupun yang beroda dua.

Sejalan dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan di Kota Donggala dan Palu, baik perhubungan darat, perhubungan laut maupun perhubungan udara membawa pengaruh yang berarti terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Bidang kehidupan ekonomi dalam arti perdagangan nampak mengalami kemajuan. Barang-barang yang diproduksi oleh para petani dapat dipasarkan baik ke dalam maupun ke luar daerah. Demikian pula kebutuhan hidup lainnya dapat didatangkan dari luar daerah dalam waktu yang singkat. Selain itu, semakin meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan menyebabkan arus urbanisasi dan imigran semakin meningkat pula. Dengan

10) Hasil wawancara dengan H. Djafar Lapasere, tanggal 20 September 1983 di Palu.

demikian penduduk Kota Donggala dan Palu semakin bertambah pula yang menuntut perluasan kota sebagai sarana pemukiman.

C. Demografi

Masalah penduduk adalah bahagian terpenting dan tak terpisahkan suatu kota. Besar kecilnya suatu kota tergantung kepada banyaknya penduduk yang bermukim di wilayah itu. Besarnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran bayi (menambah jumlah penduduk) dan secara bersamaan dipengaruhi pula oleh angka kematian yang terjadi pada semua golongan umur (mengurangi jumlah penduduk). Sementara itu imigran (pendatang) turut menambah jumlah penduduk, dan sebaiknya emigran (penduduk yang keluar daerah/merantau) akan mengurangi jumlah penduduk.¹¹⁾ Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pula terjadinya mobilitas geografis suatu kota, dan di lain pihak akan merubah sifat homogenitas penduduk menjadi heterogen (terutama mengenai komposisi etnis). Dalam uraian ini akan dikemukakan sekilas lintas tentang: jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi etnis serta mobilitas geografis yang saling berkaitan satu sama lain.

1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk

Dalam kurun waktu antara tahun 1900–1950-an, tidak diketemukan dokumen yang memuat tentang jumlah penduduk Kota Donggala dan Palu. Data statistik mengenai penduduk yang diketemukan adalah jumlah penduduk Donggala dan Palu secara keseluruhan yaitu termasuk penduduk daerah-daerah belakangnya (*hinterland*). Menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Hindia Belanda pada tahun 1930, jumlah penduduk Donggala adalah ± 54.056 jiwa yang terdiri atas 27.442 jiwa pria dan 26.614 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penduduk

11) Universitas Indonesia, Dasar-dasar Demografi, Lembaga Demografi Fak. Ekonomi, Jakarta, 1981. hal. 5.

Palu adalah ± 69.605 jiwa yang terdiri atas 33.777 jiwa pria dan 35.828 jiwa perempuan.¹²⁾

Dapat ditambahkan bahwa yang termasuk wilayah Donggala pada waktu itu adalah daerah-daerah yang kini dikenal sebagai Kecamatan-kecamatan: Banawa, Sindue, Sirenja, Balaesang dan Dampelas Sojol. Daerah-daerah inilah bersama Kota Donggala yang memiliki penduduk seperti tersebut di atas pada waktu itu. Sedangkan yang termasuk daerah belakang (hinterland) Kota Palu adalah daerah-daerah yang kini dikenal sebagai kecamatan-kecamatan: Sigi Biromaru, Dolo, Kulawi dan Tawaeli. Dengan demikian jumlah penduduk kota Donggala dan Palu pada waktu itu belum dapat diketahui secara pasti, kecuali dengan cara estimasi belaka.

Berdasarkan dengan hasil sensus penduduk Donggala dan Palu seperti tersebut di atas, maka dapat diperkirakan bahwa pada tahun 1930–1950, penduduk Kota Donggala berjumlah antara 10.000 – 15.000 jiwa. Sedangkan penduduk Kota Palu pada waktu itu diperkirakan berjumlah 20.000 – 30.000 jiwa.¹³⁾ Jika estimasi ini menghampiri kebenaran, maka pertumbuhan penduduk Kota Donggala mencapai 1,6% setahun. Namun pertumbuhan penduduk ini tidak selamanya demikian, akan tetapi kadang-kadang pertumbuhannya agak kecil dan bahkan pernah berkurang. Hal ini dapat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Kota Donggala pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1980.¹⁴⁾ Dengan demikian diperkirakan bahwa penduduk Kota Donggala mengalami pertumbuhan yang berarti dari tahun 1930-an sampai tahun 1960-an. Sesudah itu pertumbuhan penduduk yang dialami sangat kecil sekali, itupun hanya disebabkan oleh kelahiran. Sedangkan pertumbuhan pendu-

-
- 12) Voorloopige Uitkomsten, Preliminary Results of Census of 1930 in the Netherlands East-Indies, Departement Van Landbouw, Batavia, 1931 Tabel II, 22.
 - 13) Hasil wawancara dengan H.M. Djaruddin Abdullah, pada tanggal 24 September 1983 di Palu.
 - 14) Panitia Peneliti Tentang Kemungkinan Kota Donggala ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, op-cit, 28.

duk secara urbanisasi atau migrasi tidak memungkinkan lagi karena wilayah pemukiman penduduk sangat sempit.

Lain halnya dengan pertumbuhan penduduk Kota Palu. Dari tahun 1930–1950-an diperkirakan mengalami pertumbuhan sebanyak 2,5% setahun. Sesudah tahun 1950-an, maka pertumbuhan penduduk Kota Palu semakin meningkat dengan tajam. Hal itu dapat dilihat bahwa pada tahun 1978 penduduk Kota Palu mencapai lebih kurang 75.095 jiwa.¹⁵⁾ Dan pada tahun 1981 melonjak menjadi ± 105.422 jiwa.¹⁶⁾ Dengan demikian pertumbuhan penduduk mencapai 5,5 sampai 7,5% setiap tahun. Hal itu disebabkan karena semakin mantapnya situasi keamanan dan semakin meningkatnya pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Kota Administratif Palu. Pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi baik secara biologis (kelahiran bayi) dan terutama karena proses urbanisasi/imigrasi.

2. Komposisi Etnis

a. Kelompok Etnis di Donggala

Donggala termasuk sebagai kota tertua di Sulawesi Tengah yang sejak dahulu kala telah dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa (kelompok etnis). Kelompok-kelompok etnis yang telah lama ada di kota Donggala antara lain: Kaili (penduduk asli), Bugis, Makassar, Mandar, Minahasa, Banjar, Gorontalo, Arab, Cina, Jawa dan Belanda.

Pada mulanya terbentuknya pemukiman di Donggala, kelompok etnis Kaili (penduduk asli) yang terbanyak jumlahnya. Namun setelah banyak kelompok etnis pendatang, maka kelompok etnis kaili semakin terdesak dan bergeser ke pinggiran-pinggiran kota. Hal itu disebabkan karena mereka pada umumnya kurang memiliki ketrampilan sehingga harta miliknya yang beru-

15) Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah dalam angka, Palu, 1978 hal. 34.

16) Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Tengah, Registrasi Penduduk Propinsi Sulawesi Tengah, Palu 1981 hal. 45.

pa tanah yang berada di pusat perkotaan dijual kepada para pendatang. Karena mereka membutuhkan biaya hidup, maka tanah miliknya terpaksa dijual, kemudian mereka berpindah tempat ke pinggiran kota.

Kemudian etnis Bugis merupakan imigran yang pertama-tama dan merupakan urutan kedua dari jumlahnya. Kelompok etnis Bugis sudah ada di Donggala sejak jaman kerajaan, dan mulai menguasai Kota Donggala pada tahun 1902. Hal itu dapat dilihat dalam buku Tanah Kaili, diuraikan bahwa Petta Ese (berpangkat *Groot der Bugineren*) yang pertama-tama membuka Kota Donggala dan mengepalai sejumlah orang-orang Bugis.¹⁷⁾ Karena suku bangsa Bugis sudah lama berada dan dapat mem-baur dengan suku bangsa Kaili, maka di Kota Donggala dikenal istilah "Bugis Donggala". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi proses asimilasi antara suku bangsa Kaili dengan suku bangsa Bugis. Hal ini dapat terjadi karena kedua suku bangsa ini memiliki mitos yang sama, yakni "*Sawerigading*" sebagai asal usul nenek moyangnya. Demikian pula konsep "*Tomanurung*" sama-sama dianut oleh kedua suku bangsa ini. Dengan terjadinya asimilasi antara suku bangsa Kaili dengan suku bangsa Bugis, maka terjadilah integrasi sosial yang kuat sehingga orang-orang Bugis dapat menyesuaikan diri di kalangan penduduk asli. Bahasa yang digunakan sudah bercampur aduk pula, yakni bahasa Bugis yang dipergunakan memiliki logat tersendiri yang sudah berbeda dengan bahasa Bugis yang asli, seperti di Sulawesi Selatan. Adapun kelompok-kelompok etnis lainnya tidak banyak jumlahnya. Mereka pada umumnya bermukim di pusat-pusat kota sesuai dengan lapangan pekerjaan masing-masing. Integrasi sosialnya dapat dikatakan baik, kecuali kelompok etnis Minahasa. Hal itu disebabkan karena orang-orang Minahasa nampaknya mendapat prioritas utama dalam bidang pemerintahan dan di anak emaskan oleh Belanda.¹⁸⁾

17) Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala, op-cit, hal. 37.

18) Hasil wawancara dengan Simba Laiya Poleganti pada tanggal 5 Desember 1983 di Kabonena Palu.

b. Kelompok Etnis di Palu

Kelompok-kelompok etnis yang ada di Kota Palu tidak jauh berbeda dengan kelompok etnis yang ada di Kota Donggala. Bedanya ialah di Kota Palu terdapat kelompok etnis Batak, Bali, Ambon dan Minangkabau. Mengenai urutan tentang perkiraan jumlahnya, maka pada zaman Belanda suku bangsa Kaili yang menempati urutan pertama. Sedangkan urutan kedua ditempati oleh suku bangsa Bugis-Makassar.

Seperti halnya dengan kelompok Etnis di Kota Donggala, maka suku bangsa Kaili di Palu juga lebih banyak menempati pinggiran kota. Hal itu disebabkan karena semakin banyaknya suku bangsa pendatang yang nampaknya lebih dinamis dan agresif dari pada penduduk asli. Sedangkan suku-suku bangsa pendatang pada umumnya bermukim di pusat-pusat kota, terutama suku-suku bangsa Cina, Arab, Minangkabau, Belanda dan sebagainya. Khusus suku bangsa Bugis nampaknya sama dengan orang-orang Bugis yang ada di Kota Donggala. Mereka dapat bermukim dimana-mana, baik di pusat-pusat kota maupun di pinggiran kota, dan bahkan di pedesaan. Yang membedakan ialah di Kota Palu tidak ada yang disebut "Bugis Palu" seperti yang dikenal di Kota Donggala. Beberapa tahun kemudian nampak penduduk Kota Palu semakin kompleks, sehingga penduduk kota yang pada mulanya masih bersifat homogen berubah menjadi masyarakat majemuk yang bersifat heterogen.

Mengenai komposisi etnis dari kedua penduduk kota tersebut belum dapat diuraikan secara terperinci dalam tulisan ini, karena belum ada data statistik secara lengkap mengenai kelompok etnis yang ada. Satu-satunya dokumen ditemukan yang dapat memperlihatkan data statistik etnis, adalah hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1930. Itu pun hanya membedakan kelompok etnis yang besar, dan bukan jenis suku-suku bangsa yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel II.1
Komposisi penduduk kota Palu 1930
diperinci menurut jenis kelamin dan etnis

No.	Bangsa/Etnis	Pria	Perempuan	Jumlah	%
1.	Pribumi (Natives)	33.350	35.546	68.896	98,98
2.	Eropa (Europeans)	38	30	68	0,10
3.	Cina (Chinese)	262	168	430	0.62
4.	Other Asiaties (Belanda)	127	84	211	0,30
	J u m l a h	33.777	35.828	69.605	100

Sumber: Preliminary Results of the Census of 1930 in the Netherlands East-Indies.

Berdasarkan data-data dalam tabel di atas, nampak bahwa penduduk Kota Palu pada tahun 1930 terdiri atas empat kelompok etnis besar, yakni: Indonesia/pribumi sebanyak 68.896 orang (98,98%); Cina sebanyak 430 orang (0,62%); *Other Asiaties* (kelompok etnis Belanda) sebanyak 211 orang (0,30%); dan bangsa Eropa sebanyak 60 orang 60 orang (0,10%).

Sedangkan komposisi etnis penduduk Kota Donggala pada tahun yang sama (1930) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.2
Komposisi penduduk kota Donggala 1930
diperinci menurut jenis kelamin dan etnis

No.	Bangsa/Etnis	Pria	Perempuan	Jumlah	%
1.	Pribumi (Natives)	26.666	26.113	32.779	97,64
2.	Cina (Chinese)	474	223	697	1,29
3.	Other Asiaties (Belanda)	274	251	525	0,97
4.	Eropa (Europeans)	28	27	55	0,10
	J u m l a h	27.442	26.614	54.056	100

Sumber : Preliminary Results of the Census of 1930 in the Netherlands East-Indies.

Sesuai dengan data-data dalam tabel di atas, nampak bahwa komposisi penduduk Kota Donggala pada tahun 1930 terdiri atas empat kelompok etnis besar, yakni: kelompok pribumi (Indonesia) sebanyak 52.779 (97,64%); kelompok etnis Cina sebanyak 697 orang (1,29%); kelompok etnis Belanda sebanyak 525 orang (0,97%); dan kelompok etnis Eropa sebanyak: 55 orang (0,10%).

Dengan uraian komposisi penduduk kedua kota tersebut di atas, nampak bahwa etnis Belanda dan Cina lebih banyak di Donggala dari pada di Palu. Sebaliknya etnis Eropa lebih banyak di Palu.

3. Mobilitas geografis

Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu kota, secara otomatis akan mengakibatkan terjadinya pula mobilitas geografis pada kota yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan Kota Donggala dan Palu telah mengalami mobilitas geografis akibat pertumbuhan penduduk yang dialaminya. Namun mobilitas geografis suatu kota sangat tergantung kepala lingkungan fisiknya, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai arealnya untuk perluasan kota tersebut. Mobilitas geografis kedua kota ini akan dikemukakan secara singkat dalam uraian berikut ini :

a. Mobilitas geografis Kota Donggala

Kota Donggala mula-mula tumbuh dari suatu pemukiman yang disebut *Boya'* suatu pemukiman yang lebih kecil dari pada desa). Pemukiman ini diperkirakan mulai tumbuh menjadi kota pada tahun 1870-an yang dipelopori oleh bangsawan Bugis bernama Petta Ese dan dibantu oleh anaknya yang bernama Pettalolo. Pusat pemukiman itu terletak di pesisir sungai Donggala yang persis membelah dua lembah Donggala.

Di perkirakan sesudah penandatanganan Korteverklaring antara raja Banawa Lamarauna dan residen Belanda pada tahun

1901, maka Kota Donggala dikembangkan. Sungai Donggala yang membelah lembah itu ditimbun oleh warga masyarakat yang diprakarsai oleh Belanda. Dengan demikian, tiga pemukiman penduduk (Boya, Tanjung Batu dan Labuang Bajo) yang ada pada lembah itu dipersatukan ke dalam wilayah kota Donggala. Dengan berkembangnya wilayah Kota Donggala tersebut, maka pada tahun 1902, Pettalolo diangkat menjadi walikota Donggala menggantikan ayahnya yang telah meninggal.¹⁹⁾

Sejalan dengan usaha pengembangan Kota Donggala, maka dikembangkan pula Pelabuhan Donggala sebagai satu-satunya potensi alam yang dapat menunjang pengembangan dan perluasan Kota Donggala. Sampai dengan akhir penjajahan Belanda, Kota Donggala masih nampak mengalami perkembangan dan perluasan. Dengan masuknya lagi dua kampung (Kampung Maleni dan Gunung Bale) menjadi wilayah Kota Donggala, maka praktis seluruh lembah Donggala dan sebahagian lereng gunung Bale menjadi wilayah Kota Donggala. Akan tetapi sejak pada tahun 1942-1945, Kota Donggala mengalami keruntuhan yaitu ketika Bala Tentara Jepang menggempur benteng pertahanan Belanda di Gunung Bale Donggala. Dengan gempuran itu, semua bangunan dan pemukiman penduduk menjadi hancur, termasuk barang-barang pangan ikut terbakar semuanya. Mulai saat itulah banyak penduduk Kota Donggala pindah ke Palu, baik penduduk pribumi maupun non pribumi (terutama Cina).²⁰⁾

Sesudah Bala Tentara Jepang menyerah kepada Sekutu, maka kembalilah pemerintahan kolonial Belanda dalam bentuk NICA pada tahun 1946. Mulai saat itu Kota Donggala bangkit kembali, namun pengembangan dan perluasannya lebih lanjut kurang memungkinkan lagi. Hal itu disebabkan karena selain dibatasi oleh gunung-gunung dan lautan, juga areal pertaniannya tidak menjamin pengembangan kota tersebut. Tanah-tanah per-

19) Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala, op-cit.

20) Hasil wawancara dengan L. Lamarauna (anggota DPRD Tingkat II Donggala) pada tanggal 20 Nopember 1983 di Donggala.

tanian yang ada adalah berupa gunung-gunung yang berbatu dan berkapur yang sudah tidak produktif lagi. Sementara keadaan Kota Donggala yang demikian, diadakan pembagian daerah Sulawesi Tengah dengan beslit gubernur Sulawesi tanggal 25 Oktober 1951 No. 633 yang menyatakan bahwa Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Poso dengan ibu Kota Poso dan Kabupaten Palu dengan ibu kota Palu. Dengan keluarnya beslit itu menjadikan Kota Donggala semakin kurang kemungkinan untuk dikembangkan. Peristiwa ini mengundang banyak protes dan pertentangan antara penduduk Palu dan Donggala. Untuk memperbaiki hubungan penduduk kedua kota tersebut yang telah menjadi tegang, maka A.R. Pettalolo mengajukan mosi pada tanggal 14 Nopember 1951 kepada gubernur Sulawesi. Dengan mosi itu, maka diputuskanlah bahwa Kabupaten Palu diganti menjadi Kabupaten Donggala dengan ibu kotanya berkedudukan di Palu.²¹⁾

Walaupun beslit telah diubah menjadi Kabupaten Donggala, akan tetapi selama ibu kotanya berada di Palu (jaraknya \pm 35 km) maka usaha pengembangan Kota Donggala masih sulit terlaksana. Apalagi setelah Pelabuhan Donggala dipindahkan ke Pantoloan (\pm 50 km dari Donggala) pada tahun 1970-an, maka praktis Kota Donggala sulit untuk dikembangkan dan diperluas. Dan bahkan mengalami penurunan jumlah penduduk. Peristiwa pemindahan Pelabuhan Donggala ini sekali lagi mengundang banyak protes dan keresahan dari warga masyarakat Donggala. Namun keresahan dan protes dari masyarakat tersebut secara berangsur-angsur akan berhenti dengan sendirinya.

b. Mobilitas Geografis Kota Palu

Pusat pemukiman di Palu pada mulanya adalah di Kampung Kamonji dan Kampung Lere yang merupakan pusat kerajaan Palu. Pusat pemukiman ini terletak di pesisir sebelah barat Sungai Palu, di mana terletak bangunan rumah raja (rumah

21) Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala, op-cit, hal. 23.

adat) sekarang. Pusat Kerajaan Palu ini lama-kelamaan semakin berkembang dan tumbuh menjadi suatu pemukiman yang disebut kota.

Seperti yang diuraikan dalam buku Kota di Dunia Ketiga bahwa faktor-faktor yang terpenting dalam proses timbulnya dan berkembangnya suatu kota adalah ekologi, teknologi dan organisasi sosial.²²⁾ Faktor ekologi atau lingkungan alamiah merupakan modal utama bagi Kota Palu untuk berkembang dan memperluas wilayahnya. Kota Palu yang memiliki daratan (lembah) yang cukup luas merupakan jaminan utama untuk perluasan kota. Selain itu pertanian dapat pula dilaksanakan sehingga bahan pangan dapat diproduksi untuk menjamin kelangsungan hidupnya Kota Palu.

Setelah penandatanganan *karteverklaring* di Palu pada tahun 1904, maka Belanda semakin giat mengembangkan dan memperluas Kota Palu. Mula-mula perkembangan Kota Palu diarahkan ke sebelah timur Sungai Palu, yakni ke kampung Besusu (sekarang Kelurahan Besusu). Perluasan kota ke sebelah timur ini mungkin disebabkan karena Belanda berkedudukan di Palu Timur, yakni Kampung Lolu (sekarang Kelurahan Lolu). Selain itu karena wilayah Palu Timur merupakan daratan yang agak tinggi dan cocok untuk pemukiman. Sedangkan Palu Barat letaknya agak lebih rendah dan cocok untuk wilayah pertanian. Namun karena Palu Barat merupakan kota lama, maka tetap mengalami perkembangan dan perluasan. Selain Kampung Lere dan Kamnji, dua kampung lainnya yang berada di antara keduanya (Kampung Ujuna dan Baru) berkembang menjadi pusat kota. Kampung Ujuna (sekarang Kelurahan Ujuna) telah berkembang menjadi wilayah pertokoan dan pasar, dimana orang-orang Cina dan Bugis menguasainya. Sedangkan di kampung Baru merupakan pusat penyiaran agama Islam yang dibawa oleh Datu Karama. Di wilayah itu masih dijumpai sampai sekarang bangunan-bangunan rumah Minangkabau dimana orang-orang

22) P.J.M. Nas, kota di Dunia Ketiga, Bharata, Jakarta, tahun 1979, hal. 79.

Minangkabau bersama-sama Datu Karama menyiarkan agama Islam sejak abad ke-17 yang lampau. Adapun Kampung Kamonji berkembang menjadi wilayah pendidikan, di mana Pendidikan Islam Alkhairat berpusat.

Lain halnya dengan Palu Timur (sekarang Kecamatan Palu Timur) yang pada mulanya juga merupakan daerah pemukiman dan perdagangan, terutama di pinggir Sungai Palu. Setelah Belanda datang, wilayah ini dikembangkan menjadi daerah perkantoran dan pendidikan. Di daerah inilah mula-mula dibangun kantor Kontroler, sekolah-sekolah rakyat dan sebagainya. Kemudian setelah NICA memerintah dan terbentuknya dua kabupaten, maka dibangun pula kantor bupati, kantor DPR-ST, kantor pengadilan, kantor bank, gedung-gedung Sekolah Rakyat, gedung SMP Sawerigading dan sebagainya. ²³⁾

Demikianlah Kota Palu berkembang dan mengalami perluasan terus menerus, baik Palu Barat maupun Palu Timur. Perkembangan semakin meningkat pada tahun 1960-an, yaitu ketika berhasil didirikan Perguruan Tinggi Swasta yang pertama (Universitas Tadulako). Kemudian setahun berikutnya Kota Palu terpilih menjadi ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah setelah resmi menjadi Daerah Tingkat I.

D. Pemerintahan

1. Sejarah Singkat Daerah Sulawesi Tengah

Jauh sebelum datangnya Hindia Belanda, wilayah Sulawesi Tengah terdiri atas beberapa kerajaan atau swapraja yang diperintah oleh raja (magau). Kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu antara lain: Poso, Mori, Buol, Toli-toli, Banggai, Mautong, Parigi, Tawaeli, Kulawi, Sigi Biromaru, Banawa dan Palu. Kedua kerajaan yang terakhir (Banawa dan Palu) menjadi lokasi penelitian sejarah sosial ini. Ketika agama Islam masuk di

23) Hasil wawancara dari H.M. Djaruddin Abdullah (Anggota DPRD. Tingkat I Sulawesi Tengah), pada tanggal 25 September 1983 di Palu.

Donggala dan Palu, maka semua kerajaan mendapat pengaruh kebudayaan dan agama Islam sehingga berubah menjadi kerajaan Islam.

Setelah Hindia Belanda memasuki wilayah Sulawesi Tengah (tahun 1858 di Poso dan 1888 di Donggala) dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan, maka pada tahun 1905 wilayah Sulawesi Tengah diperintah oleh Belanda dari tiga tempat, yakni:

- a. Daerah Buol Toli-Toli diperintah oleh Gubernur Belanda di Makassar
- b. Daerah Banggai dan Poso sebelah Timur/Tenggara diperintah oleh Residen Sulawesi Timur di Bau-Bau
- c. Daerah Donggala dan sebahagian dari Poso diperintah oleh Residen Sulawesi Utara di Manado

Kemudian pada tahun 1919–1942 wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya menjadi bagian Keresidenan Manado dan diperintah oleh residen Manado. Selama pemerintahan Hindia Belanda dapat digambarkan bahwa dari tahun 1858–1921, sistem pemerintahan bersifat tradisional – kolonial. Sedangkan dari tahun 1921–1942, sistem pemerintahan bersifat kolonial. Hal itu terjadi karena pada waktu *Lange Kontrack* berlaku, raja-raja memegang peranan dalam pemerintahan. Namun setelah karte-verklaring ditandatangani, maka raja-raja hanya sebagai simbol belaka dan tidak memiliki peranan lagi.

Setelah Hindia Belanda menyerah terhadap serangan Bala Tentara Jepang, maka mulai tahun 1942–1945 wilayah Sulawesi Tengah dikendalikan sepenuhnya oleh Jepang yang berpusat di Manado. Pengisian jabatan pemerintahan yang ditinggalkan Belanda segera dilakukan dengan menggunakan istilah bahasa Jepang. Istilah residen diganti dengan istilah *kanrikan*, asisten residen diganti dengan istilah *ken kanrikan*, kontroler diganti dengan istilah *bunken kanrikan* dan raja (magau) diganti dengan istilah *suco*. Pada waktu itu raja-raja tetap diakui kedudukannya, namun hanya sekedar lambang belaka dan tidak

memegang peranan yang berarti. Dengan demikian sistem pemerintahan di Sulawesi Tengah umumnya dan Donggala – Palu khususnya praktis bersifat kolonial.²⁴⁾

Kemudian setelah Bala Tentara Jepang menyerah dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, pada tahun 1946 Pemerintah Kolonial Belanda kembali memerintah dalam bentuk pemerintahan NICA. Mulai saat itu wilayah Sulawesi Tengah dibagi dua yakni Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kota Poso. Afdeeling Donggala terdiri atas: Palu, Donggala, Toli-Toli dan Buol. Sedangkan Afdeeling Poso terdiri atas: Poso, Luwuk, Banggai, Kolonadale dan Parigi. Pada tahun 1949 dibentuklah DPRST (Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah) dan Dewan Raja-raja/Dewan Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 1951, dengan deslit Gubernur Sulawesi tanggal 25 Oktober 1951 No. 633 dibentuklah Kabupaten Poso dengan ibu kota Poso dan Kabupaten Palu dengan ibu kota Palu.²⁵⁾

Peristiwa terbentuknya Kabupaten Palu mendapat banyak protes dari masyarakat Donggala. Mereka menginginkan agar keputusan pemerintah tersebut dapat ditinjau kembali. Karena adanya protes masyarakat, maka DPR – ST mengajukan mosi kepada gubernur Sulawesi di Makassar agar Kabupaten Palu diubah menjadi Kabupaten Donggala dengan ibu kota berkedudukan di Palu. Dengan permintaan itu, maka keluarlah Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1953 menetapkan bahwa Sulawesi Tengah terbagi atas dua kabupaten yakni kabupaten Poso dengan ibu Kota Poso dan Kabupaten Donggala dengan ibu kotanya Palu. Setelah pemberontakan Permesta berakhir, para pemuda Sulawesi Tengah menggalang persatuan menuntut agar Sulawesi Tengah dapat berstatus Daerah Tingkat I. Tuntutan itu diajukan melalui organisasi daerah seperti: Keluarga Mahasiswa

24) Wawancara dengan Bapak W.S. Ruata (Pensiunan Pamong Praja) di Palu tanggal 20 September 1983.

25) Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala Op.cit.

Pelajar Sulawesi Tengah (KMPST), Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah (IKST), Gerakan Penuntut Propinsi Sulawesi Tengah (GPPST). Sebagai realisasi tuntutan rakyat Sulawesi Tengah, maka pada tahun 1959 masing-masing daerah Poso dan Donggala dipecah dua sehingga lahirlah empat kabupaten di Sulawesi Tengah yakni :

- a. Kabupaten Poso, ibu kotanya Poso;
- b. Kabupaten Donggala, ibu kotanya Palu;
- c. Kabupaten Buol Toli-Toli, ibu kotanya Toli-Toli; dan
- d. Kabupaten Banggai, ibu kotanya Luwuk.

Dengan lahirnya ke empat kabupaten tersebut di atas, maka pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang No. 13 tentang dibentuknya daerah otonomi Propinsi Tingkat I Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Dengan demikian tahun 1964 (tanggal 12 April 1964) ditetapkan sebagai hari kelahiran Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.²⁶⁾

2. Kegiatan Politik

Kegiatan-kegiatan politik pada awal kedatangan Hindia Belanda dapat dikatakan belum begitu nampak. Hal itu disebabkan karena sistem pemerintahan belum bersifat demokrasi, melainkan bersifat tradisional – kolonial. Kekuatan politik yang ada pada zaman Belanda adalah Serikat Islam (S I). Kemudian oleh Belanda dibentuk pula organisasi Persatuan Raja-raja sebagai usaha memecah belah. Golongan masyarakat yang menjadi pendukung S I pada waktu itu adalah masyarakat biasa, bangsawan, orang-orang kaya yang pada umumnya penentang Belanda. Sedangkan organisasi persatuan raja Palu dan Donggala didukung oleh raja-raja dan warga masyarakat yang pro dengan Belanda. Organisasi ini dibentuk oleh Belanda dengan maksud untuk menyaingi organisasi Serikat Islam (S I). Dapat dikatakan bahwa satu-satunya kekuatan politik pada waktu itu yang dapat menghimpun kekuatan masyarakat untuk menentang

26) Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Dalam Angka, Palu, 1978, hal. IX.

Belanda. Setiap ajakan yang diajukan oleh Belanda untuk mengadakan kerja sama, selalu ditolak. Dan bahkan para anggota SI (terutama turunan bangsawan) bersumpah bahwa sampai anak-cucu tidak akan mau duduk dalam pemerintahan selama Belanda masih memerintah. Beberapa gerakan-gerakan pemberontakan dan gerakan Merah Putih yang terjadi di daerah-daerah seperti: Donggala, Parigi, Toli-Toli dan sebagainya pada umumnya dipelopori oleh anggota S.I.²⁷⁾

Latar belakang terjadinya gerakan-gerakan dan perlawanan yang dipelopori oleh anggota-anggota S I karena perlakuan pemerintah kolonial yang keras. Pada bulan puasa Ramadhan mereka disuruh kerja paksa (rodi) di jalan-jalan raya dan dipaksa membayar pajak. Mereka yang tidak melakukan perintah itu akan dikenakan hukuman penjara selama lima hari. Demikian kekejaman Belanda terhadap Serikat Islam yang senantiasa berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan politik. Dan setelah Belanda menyerah oleh Jepang, maka Serikat Islam dan Persatuan Raja-raja sama sekali tidak diberi peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena di anggap berbahaya terhadap Jepang. Dengan demikian praktis kegiatan-kegiatan politik pada zaman pendudukan Jepang menjadi terhenti.

Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pada tahun 1950-an, kekuatan-kekuatan politik muncul kembali. Organisasi-organisasi politik pada waktu itu ialah: PSII (dulu SI), Masyumi, PNI, Parkindo, NU, PKR, PKI, Partai Katholik dan PSI. Kesemua organisasi politik itu masing-masing mempunyai Cabang di Palu dan Donggala. Dari sekian organisasi politik tersebut, PSII yang paling banyak pendukungnya yakni memiliki cabang pada setiap kecamatan.²⁸⁾

Seperti diketahui, bahwa pada mulanya PSII adalah merupakan organisasi dagang (Serikat Dagang), sehingga yang men-

27) Wawancara dengan Bapak Tayeb H. Muda (anggota DPRD. Tingkat II dan Ketua Dewan Hadat Palu) tanggal 10 September 1983 di Palu.

28) Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala, Op-cit, hal. 99.

jadi pendukungnya pada umumnya ada pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, Organisasi Islam dan masyarakat petani. Sedangkan Masyumi pada umumnya didukung oleh masyarakat golongan moderat. Demikian pula organisasi NU pada umumnya didukung oleh para ulama dan keluarganya. Adapun organisasi PNI dan Parkindo didukung oleh orang-orang yang berjiwa nasionalisme, baik yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam.

Demikianlah gambaran singkat kegiatan-kegiatan dan kekuatan politik sejak zaman Belanda sampai pada zaman kemerdekaan. Namun belum dapat dikemukakan tentang anggota-anggota organisasi apa yang paling banyak menduduki posisi penting dalam masyarakat pada waktu itu. Hal itu disebabkan tidak ditemukannya data statistik mengenai hal itu dalam kurun waktu 1900–1950-an. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan di sini hasil-hasil Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1960 sampai dengan 1971 sebagai berikut:

Tabel II.3
Komposisi anggota DPRD-GR Propinsi
Sulawesi Tengah 1960 s/d. 1971

Tahun	Golongan dan jumlah anggota yang terpilih								Jumlah anggota DPRD-GR
	PSII	PNI	NU	PKI	IPKI	PARKIN-DO	PARMU-SI	KAR-YA	
1960	2	2	1	1	1	3	—	12	22
1965	7	4	4	—	1	4	—	20	40
1971	9	5	4	—	2	4	2	26	52
Jumlah	18	11	9	1	4	11	2	58	114

Sumber: Memori Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, 1971.

BAB III TO KAILI DI SULAWESI TENGAH

A. Suku-suku Bangsa Asli

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang dahulunya merupakan wilayah pemerintahan raja-raja telah dihuni oleh beraneka macam suku bangsa seperti: Suku Bugis, Makassar, Mandar, Banjar, Minang, Jawa, Minahasa, Arab, India, Cina dan suku bangsa penduduk asli. Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 10 macam sukut terasing yang menempati daerah pegunungan dan 12 suku bangsa asli yang bermukim di daerah dataran dan lembah. Ke 12 suku bangsa asli tersebut ialah: Kaili, Kulawi, Pamona, Mori, Tomini, Bungku, Toli-Toli, Buol, Balantak, Lore dan Saluan. Di antara suku-suku bangsa asli tersebut, Kaili merupakan suku bangsa yang terbesar jumlahnya. Pada umumnya mereka bermukim di wilayah Kabupaten Donggala.

1. Asal mula istilah kata Kaili

To Kaili (orang Kaili) yang bermukim di Donggala dan Palu mempunyai mitos yang berbeda-beda. Dalam buku "Mengetahui Tanah Kaili" diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, di wilayah Donggala – Palu terdapat pohon yang tinggi. Pohon ini disebut pohon *Kaili* dan dijadikan tanda atau pedoman perjalanan bagi pelayar-pelayar. Dengan nama pohon itu, maka suku bangsa penduduk asli yang ada pada wilayah itu dinamakan

kan suku bangsa Kaili.¹⁾ Mitos ini mungkin ada benarnya karena sejak dahulu kala penduduk setempat mempunyai kebiasaan memberi nama kampung-kampung atau kota yang berasal dari nama-nama pepohonan berdasarkan dengan daerah setempat.

Ceritera lain mengenai asal-mula istilah "Kaili" adalah ber-sumber dari seorang sejarahnya yang mengatakan bahwa kata Kaili itu berasal dari bahasa Bugis, yaitu "makkaili".²⁾ Pengertian makkaili adalah keadaan bayi yang bisa tengkurap kemudian dapat membalikkan badannya menghadap ke atas. Proses munculnya ceritera ini adalah ketika pelayar Bugis yang tinggal di pesisir Teluk Palu dan melahirkan seorang bayi. Ketika ia ditanya oleh temannya tentang keadaan bayinya lalu dijawabnya bahwa "Makkaili-ni".

Istilah "Makkaili" inilah kemudian yang dijadikan nama Wilayah Donggala sehingga disebut Tanah Kaili dan penduduk aslinya disebut suku Kaili. Ceritera ini mungkin ada benarnya, akan tetapi masih perlu dikaji lebih mendalam karena ada kemungkinan Wilayah Donggala ini sudah bernama Tanah Kaili (penduduknya disebut Suku Kaili) sebelum orang-orang Bugis berlayar ke daerah ini.

Selain itu diperoleh informasi dalam wawancara dengan tokoh masyarakat (anggota hadat) menceritakan bahwa istilah kata "Kaili" berasal dari kata "No Kaili" yang artinya turun melalui sungai sampai menetap di pesisir pantai. Pada mulanya penduduk pegunungan wilayah Donggala disebut "Topo Pevo" yang kemudian keturunannya disebut "To Lare" (orang gunung). Dari orang-orang gunung ijilah yang kemudian turun melalui sungai dan bermukim di pesisir yang akhirnya disebut suku bangsa Kaili (To Kaili). Orang-orang Kaili inilah yang berhu-

-
- 1) H. Muh. Djaruddin Abdullah, Mengenal Tanah Kaili, Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah, Palu, 1975, hal. 10.
 - 2) Zainal Abidin (Guru Besar Universitas Hasanuddin) Ceramah di Aula Universitas Tadulako, Palu 1977.

bungan dengan para suku bangsa pendatang dan terjadilah kawin-mawin terutama suku Bugis.³⁾

Penafsiran yang ketiga tentang asal-mula istilah kata "Kaili" ini merupakan penemuan baru yang belum pernah dibukukan. Informasi ini, juga masih memerlukan pengkajian lebih mendalam agar dapat menjadi informasi yang lebih benar.

Menurut ceritera-ceritera masyarakat Donggala mengatakan bahwa pada zaman dahulu, lembah yang ada di Wilayah Donggala adalah laut. Setelah air laut turun dan lembah menjadi daratan, maka orang-orang gunung (To Lare) turun bermukim di lembah tersebut. Sampai sekarang, lembah-lembah di wilayah Donggala ditempati oleh suku bangsa Kaili bersama dengan suku-suku bangsa pendatang. Sedangkan di daerah pegunungan sebahagian masih ditempat oleh suku-suku terasing yang disebut To Lare.

2. Asal mula suku bangsa Kaili

Mengenai asal mula suku bangsa Kaili-sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Menurut pendapat N. Adriani dalam tulisannya mengatakan bahwa penduduk asli Kabupaten Donggala adalah termasuk dalam rumpun Suku Toraja Barat. Adriani dalam tulisannya mengadakan pembagian atas 3 golongan besar suku bangsa Toraja; yaitu Toraja Barat menempati Kabupaten Donggala, Toraja Timur di Poso dan Toraja Selatan atau Toraja-Sadang di Makalo, Rantepao, Masemba dan Mamas.⁴⁾ Namun pendapat N. Adriani ini mendapat banyak protes, baik dari kalangan ilmuan dari luar Tanah Kaili dan terutama di kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan cendekiawan bangsa Kaili.

Kalau kita memperhatikan bukti-bukti yang dapat memperkuat pendapat N. Adriani pada kenyataannya kurang dijumpai. Unsur-unsur kebudayaan suku bangsa Toraja tidak me-

3) Wawancara dengan Bapak Simba Laiya Poleganti 5 Nopember 1983 di Kabonena Palu.

4) Tanah Kaili, Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala, Palu 1956, hal. 19.

nunjukkan persamaan yang berarti dalam unsur-unsur kebudayaan suku bangsa Kaili. Bentuk rumah tempat tinggal suku bangsa Kaili lebih banyak persamaan dengan bentuk rumah suku bangsa Bugis. Dari segi bahasa umpamanya bercampur baur antara bahasa Bugis, Makassar, Manado dan sebagainya. Begitu pula ciri-ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan suku-suku Bugis, Makassar, Mandar. Kecuali orang-orang yang tinggal di gunung (To Lare) memiliki ciri-ciri fisik seperti: rambut ombak, kulit agak gelap dan kasar, bentuk tubuh kokoh kuat. Hal itu mungkin disebabkan karena mereka tinggal di tengah hutan pada gunung dan jarang memakai baju.

Dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat suku bangsa Kaili, diperoleh jawaban bahwa mereka lebih suka dikatakan sebagai rumpun suku bangsa Bugis. Sebaliknya mereka sangat tidak suka apabila dikatakan sebagai suku bangsa Toraja Barat.

B. Sistem Kesatuan Hidup dan Kekerabatan

1. Pola tempat tinggal

Pola tempat tinggal masyarakat Donggala dan Palu, khususnya suku bangsa Kaili sebelum Hindia Belanda datang di Tanah Kaili dapat dikatakan hampir sama dengan pola tempat tinggal suku bangsa lain pada kota-kota di Indonesia. Pola pemukiman masyarakat di Kota Donggala – Palu terdiri atas tiga macam yaitu (1) Pola perkampungan menyebar atau *Boya*, (2) Pola perkampungan mengelompok padat atau *Ngapa*, (3) Pola perkampungan di antara kedua pola tersebut di atas atau *Kinta*.⁵)

a. Pola perkampungan menyebar (boya).

Proses terbentuknya suatu pemukiman yang disebut *Boya* adalah berasal mula dari beberapa keluarga mendirikan rumah pada tempat-tempat tertentu yang biasanya hanya

5) Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Masyarakat Terhadap Lingkungannya Daerah Sulawesi Tengah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Palu, 1983, hal. 22.

terdiri atas beberapa rumah tangga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang masih dekat. Biasanya boya mempunyai nama-nama tersendiri yang diberikan berdasarkan peristiwa-peristiwa sosial yang penting. Umpamanya nama pohon besar yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Suatu boya mungkin dapat disamakan dengan *kindret*, yaitu suatu komunitas yang anggota-anggota masyarakatnya merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang saling tolong menolong dalam kegiatan sosial ekonomi dan sebagainya.

- b. Pola perkampungan yang lebih besar dari pada boya (*kinta*) adalah merupakan pola perkampungan boya yang telah bertambah penduduknya menuju menjadi suatu kampung atau desa.
- c. Pola perkampungan mengelompok padat (*ngapa*) adalah merupakan perhubungan dari *kinta* yang sudah menjelma menjadi suatu kampung atau desa. Anggota masyarakatnya sudah bersifat keterasing dan sudah mulai tidak saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, terutama yang tidak punya kekerabatan.

Dapat ditambahkan bahwa pemukiman penduduk Donggala dan Palu pada zaman kerajaan pada umumnya berpusat pada wilayah yang memiliki sumber air (*matauve*) atau disekitar sungai (*binangga*). Pemukiman semacam itu biasanya menjadi pusat kerajaan (*kagau*). Di Donggala, salah satu pemukiman padat pada waktu itu adalah *de boya*. Pada mulanya hanya merupakan pemukiman menyebar (*boya*), kemudian setelah mengalami pertumbuhan penduduk, pemukiman itu berubah menjadi pemukiman padat (*ngapa*). *Boya* inilah yang berkembang menjadi pusat Kota Donggala yang letaknya persis di mulut Pelabuhan Donggala. Di sekitarnya mengalir sebuah sungai (Sungai Donggala) yang menjadi sumber kebutuhan air penduduk. Sedangkan di Kota Palu, Kampung Lere dan Ujuna merupakan pemukiman

padat (ngapa) pada zaman kerajaan, yaitu terletak di pesisir barat muara sungai Palu.

Mengenai bentuk rumah tempat tinggal masyarakat Donggala dan Palu adalah berupa rumah panggung yang terdiri atas tiga bagian yang masing-masing mempunyai fungsi secara khusus yaitu: (1) bagian atas dekat atap yang disebut *pomoakan* (loteng) yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan benda-benda pusaka; (2) bagian tengah yang disebut *rarabanua* (badan rumah) yang berfungsi untuk tempat tidur, makan, istirahat, menerima tamu dan prabot-prabot rumah tangga; (3) bagian bawah rumah yang disebut *kapeo* (kolong rumah) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan binatang ternak. Hal ini membuktikan bahwa penduduk asli pada mulanya seluruhnya adalah petani.

Apabila dilihat dari sudut lapisan sosial, maka bentuk rumah suku Kaili khususnya terbagi atas jenis yaitu:

- (a). *Banua Mbaso*, yaitu rumah panggung besar yang didiami oleh keluarga raja dan berlantai papan, dinding papan, atap seng dan ukurannya 31 x 11,31 meter. Banua Mbaso terbagi atas beberapa ruangan dengan fungsi masing-masing yakni: (a) ruangan depan (*lonta karavana*) yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu; (b) ruang tengah (*lonta tatangana*) yang terbagi lagi atas beberapa ruangan yaitu: ruangan pertemuan raja, ruangan tidur raja, ruangan tidur keluarga raja; (c) ruangan belakang (*lonta rarana*) yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu perempuan, tempat makan, kamar tidur pembantu; (d) ruangan dapur yang bangunannya terpisah dan dihubungkan oleh sebuah jembatan.
- (b). *Banua Kataba*; yaitu rumah panggung yang agak kecil yang berukuran 17 x 8 meter yang didiami oleh keluarga bangsawan dengan ciri-ciri: beratap rumbia, lantai papan dan dinding papan. Pembagian ruangan sama dengan pembagian ruangan banua mbaso tersebut di atas.

(c). *Tinja Kanjai*; yaitu rumah panggung yang lebih kecil bentuknya dengan ukuran 4 x 4 meter. Ciri-cirinya berlantai bambu, dinding gaba-gaba dan atap daun rumbia yang semua bagian-bagian rumah dihubungkan dengan pengikat. Pembagian ruangnya terbagi atas: ruangan depan yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu/tempat tidur tamu, ruangan tengah berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, dan ruangan belakang yang berfungsi sebagai ruangan makan dan dapur. Selain rumah tempat tinggal, ada juga bangunan untuk upacara adat yang disebut *baruga* dan *bantaya*. *Baruga* dibangun berdampingan dengan rumah tempat tinggal raja, sedangkan *Bantaya* dibangun pada suatu boya untuk keperluan rakyat. Bangunan rumah adat tersebut berfungsi sebagai:

- a. Balai pertemuan bagi pamong desa
- b. Tempat melaksanakan pesta perkawinan
- c. Tempat perdamaian desa/kampung
- d. Tempat bermalam tamu desa/kampung yang banyak jumlahnya.
- e. Tempat melaksanakan pesta adat seperti: pesta pancen, minta hujan (*vunja*) dan sebagainya.

2. Pelapisan Sosial (stratifikasi sosial)

Sistem pelapisan sosial masyarakat suku bangsa Kaili berdasarkan pada keanggotaan kaum kerabat kepala masyarakat. Golongan masyarakat yang dianggap lebih tinggi status dan derajatnya adalah golongan keturunan bangsawan yang menduduki tahta kerajaan (magau). Secara lengkapnya, pelapisan sosial masyarakat Kaili adalah:

- a. Golongan Raja (Magau);
- b. Golongan keturunan bangsawan (Madika);
- c. Golongan keturunan orang biasa (To dea); dan
- d. Golongan keturunan hamba (watua).⁶⁾

6) Wawancara dengan H. Djafar Lapasere di Palu, Tgl. 20 September 1983.

Golongan pertama adalah golongan keturunan bangsawan yang berhasil menduduki tahta kerajaan (menjadi raja). Mereka dianggap sebagai golongan yang paling tinggi status dan derajatnya karena selain sebagai keturunan manusia luar biasa juga karena mereka sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat.

Golongan kedua (*Madika*) adalah golongan keturunan bangsawan yang tidak menjadi raja (*magau*), akan tetapi hanya menjadi wakil/pembantu raja.

Dasar penilaian masyarakat adalah karena mereka merupakan keturunan manusia luar biasa, yaitu *To Malanggai* (pemberani) dengan *To Manuru* (perempuan dari kayangan).⁷⁾ Gadis itu diambil, kemudian diperisterikan oleh *To Malanggai*. Perkawinan antara *To Malanggai* dan *To Manuru* akhirnya melahirkan anak yang menjadi bangsawan. Dari keturunan bangsawan inilah ada yang menjadi raja dan ada yang menjadi wakil raja.

Mengenai sebutan *madika* bagi golongan bangsawan, muncul setelah sistem pemerintahan diktator berubah menjadi sistem demokrasi (hidup teratur). Pada waktu kekuasaan *To Malanggai*, masyarakat merasa tertekan dan tidak aman karena kepemimpinannya diktator. Namun setelah terjadi perkawinan antara *To Malanggai* dengan *To Manuru*, maka sistem pemerintahan berubah dan terutama setelah keturunannya menggantinya menjadi raja. Masyarakat merasa bebas dan tidak tertekan atau merasa merdeka. Dengan perasaan merdeka bagi masyarakat, maka golongan bangsawan ini dianggap sebagai golongan yang memerdekakan masyarakat, sehingga disebut sebagai golongan merdeka (*madika*).

Golongan *madika* ini adalah merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya relatif kecil. Apalagi setelah masyarakat suku bangsa Kaili mengalami kemajuan dibidang pendidikan,

7) H. Muh. Djaruddin Abdullah, *op-cit*, hal. 17.

maka sistem pelapisan sosial ini semakin lama semakin menjadi kabur. Pada zaman Hindia Belanda, nampak adanya perubahan tentang dasar penilaian tinggi rendahnya derajat dan status seseorang. Golongan bangsawan dan raja dianggap lebih tinggi status dan derajatnya karena selain keturunan orang luar biasa, juga karena memiliki pengetahuan (kepandaian). Hal ini disebabkan karena pada zaman kolonial, hanya anak-anak raja yang pro pemerintah kolonial mendapat fasilitas pendidikan.

Golongan ketiga (*to dea*) adalah merupakan golongan masyarakat biasa yang sudah jauh hubungan kekerabatan dengan bangsawan atau raja. Golongan ini merupakan jumlah terbesar dari anggota masyarakat. Sedangkan golongan keturunan hamba (*watua*) adalah sebagai keturunan para pembantu rumah tangga bangsawan atau raja-raja tempo dulu. Golongan hamba ini dianggap paling rendah status dan derajatnya, karena selain mereka merupakan orang-orang rampasan perang juga kemampuan ekonomi relatif rendah. Golongan hamba ini hanya sebahagian kecil dibanding dengan masyarakat biasa (*to dea*).

3. Sistem kekerabatan

a. Adat-istiadat lingkungan hidup

Dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Kaili juga dikenal upacara adat pada tingkat-tingkat umur sepanjang hidup setiap individu atau disebut *stages along the life cycle*. Tingkat-tingkat umur yang sering diperingati oleh keluarga suku bangsa Kaili antara lain seperti :

1) Upacara masa bayi

Pada masa bayi ini upacara-upacara yang dilakukan adalah :

Memotong tali pusat (*nompudu valaa mpuse*), yaitu pemisahan antara tali pusat dan *playenta* yang dilakukan secara sakral. Tujuannya adalah menghindari terjadinya gangguan roh *playenta* pada diri si bayi.

Upacara turun tanah (nanatauraka ngana), yaitu sang bayi pertama kali menginjakkan kakinya di tanah. Dengan selanjutnya upacara turun tanah ini, sang bayi sudah dapat dibawa ke luar rumah dengan harapan tanpa gangguan dari mahluk-mahluk halus.

Upacara naik ayunan (nosaviraka ritoya), yaitu sang bayi pertama kali menaiki ayunan. Upacara ini bertujuan agar sang bayi terhindar dari gangguan mahluk halus.

Upacara menggunting rambut (nosombe bulua nungana), yaitu pada umur kira-kira satu tahun sang bayi pertama kali dipotong rambutnya dengan upacara tertentu. Pemotongan rambut itu pertama-tama dilakukan oleh tokoh agama kemudian dilanjutkan oleh orang-orang tua secara bergantian. Biasanya pengguntingan itu berlangsung pada waktu pembacaan barazanji sedang dilakukan.

2) Upacara masa anak-anak

Pada masa anak-anak dan menjelang dewasa, ada beberapa upacara dilakukan antara lain:

- a) Khitanan (nosuna), yaitu suatu upacara sebagai pertanda anak-anak akan beralih ke tingkat umur dewasa. Selain itu yang terpenting adalah sebagai tanda pengislaman secara resmi bagi sang anak
- b) Upacara menggosok gigi (nokeso), yaitu bagi anak-anak yang menjelang dewasa, terutama bagi perempuan diadakanlah upacara menggosok gigi (alat yang digunakan menggosok gigi adalah batu khusus yang telah disiapkan sebelumnya). Tujuan upacara ini adalah agar sang anak dapat menginjak umur dewasa tanpa gangguan penyakit, panjang umur, murah rejeki dan dapat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela.

3) Upacara perkawinan

Dalam upacara perkawinan ini melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a) Masa dipertunangkan (nitangka), yaitu para orang tua biasanya sepakat antara kedua belah pihak menjodohkan anaknya sewaktu masih kecil. Biasanya orang tua pada waktu melahirkan anak, sudah dijodohkan dengan anak teman atau kerabatnya. Dengan persepakatan kedua belah pihak orang tua seperti itu, maka anak-anak diawasi dengan ketat dan dilarang bergaul bebas dengan anak-anak lain jenis yang sudah dewasa. Apabila terjadi pelanggaran adat dalam muda-mudi, maka pelanggaran (pria) dikenakan denda berupa seekor domba, kambing atau kerbau sesuai besar-kecilnya pelanggaran yang diperbuat untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti ini maka anak gadis harus dijaga dan dipingit. Kalau ia ke luar rumah untuk keperluan menghadiri pesta dan sebagainya, anak-anak gadis khususnya dan perempuan umumnya memakai dua buah sarung untuk menutupi seluruh badannya, sehingga yang kelihatan hanyalah sedikit di bagian mukanya.
- b) Peminangan (neduta), yaitu setelah anak-anak yang dipertunangkan menjadi dewasa, maka dilakukanlah peminangan menurut adat berdasarkan pada derajat anak yang akan dikawinkan. Kalau anak itu adalah turunan raja, maka berlaku adat *Pitumpole* yaitu yang berhak membicarakan peminangan itu adalah dewan hadat yang terdiri atas tujuh orang yang masing-masing mewakili wilayah kekuasaannya (yang berada pada wilayah Pitampole). Demikian pula kalau anak raja yang akan dikawinkan itu berada pada kekuasaan Patanggota, maka yang berhak menghadiri dan membicarakan peminangan itu adalah empat orang anggota hadat. Biaya upacara peminangan itu seluruhnya ditanggung oleh kata Patanggota atau kata Patanggota.

c. Pengantaran harta

Dalam pengantaran harta dari pihak pria, juga tergantung dari adat yang berlaku berdasarkan derajat anak yang akan kawin. Untuk anak raja yang berasal dari adat Pitumpole, maka barang-barang yang akan diantar ke rumah perempuan masing-masing berjumlah tujuh buah yaitu seperti: daun sirih, gambir, pinang, kapur, kerbau, emas, piring, mangkok, dulang berkaki dan bahkan disertai tujuh orang dayan-dayan (dari golongan hamba) untuk dipersembahkan kepada calon isterinya. Untuk anak bangsawan yang bukan raja yang ingin kawin dengan golongan orang biasa, maka kelengkapan barang-barang bawaan seperti di atas hanya *Limampole*, yaitu masing-masing jenis barang terdiri atas lima buah. Khusus golongan orang biasa yang ingin melakukan perkawinan, peminangan dilakukan sendiri oleh kedua pihak orang tua. Maharnya (Sunda) hanya terdiri atas: sebidang tanah, seekor kerbau, sebelas pohon kelapa dan lain-lain.

d) Upacara pernikahan

Sebelum acara akad nikah dilaksanakan, maka ada beberapa acara yang mendahuluinya yaitu malam pacar tiap rumah calon pengantin. Selain itu diadakan pula acara mencukur rambut di rumah pihak wanita. Kedua calon pengantin dicukur bulu-bulu yang tumbuh pada bagian alis dan tengkuknya dengan harapan mereka dalam keadaan bersih memasuki suasana hidup baru. Menjelang akad nikah dimulai, pengantin pria berpakaian adat kebesaran menunggang kuda disertai oleh anggota adat menuju ke rumah pengantin wanita. Sesampainya di depan tangga, pengantin pria dijemput oleh calon mertua kemudian langsung didudukkan di pelaminan. Selanjutnya akad nikah dilakukan oleh petugas (imam) di depan tokoh-tokoh adat dan para undangan.

e) **Upacara mandi bersama**

Sebagai penutup acara perkawinan, diadakanlah upacara mandi bersama di depan pintu pada hari ke tiga sesudah akad nikah. Bahan-bahan campuran air yang akan dipakai mandi adalah:

- kembang-kembang yang harum;
- daun-daun yang harum;
- mayang kelapa dan mayang pinang.

Selesai mandi, kedua pengantin berdiri kemudian dipasang sarung adat yang terbuat dari kulit kayu. Sarung kulit kayu itu dipasang dan dikeluarkan tiga kali secara berturut-turut. Sesudah acara mandi dan pemasangan sarung kulit kayu ini, maka selesailah rangkaian acara perkawinan tersebut.

4) **Masa tua**

Pada masa tua, upacara yang paling terakhir dilakukan dalam rangkaian kehidupan setiap manusia adalah upacara kematian. Dalam upacara kematian, ada kebiasaan suku bangsa Kaili golongan bangsawan menyimpan mayat dalam peti kayu selama 40 hari untuk menunggu kedatangan kerabat yang datang dari jauh. Selama 40 hari itu, kerabat berkumpul melakukan acara-acara tradisional seperti mayat dikipas-kipas oleh dayan-dayan (hamba). Setelah agama Islam masuk di Tanah Kaili, kebiasaan itu ditinggalkan dan diganti dengan pengajian tiap malam yang disebut *Nangaji Batara*. Selain itu, juga diadakanlah *tahlilan* yaitu diadakan selamat (baca doa) mulai malam ke-3, ke-7, ke-10, ke-20, ke-30, ke-40 dan ke-100 bagi keluarga yang mampu.

b. **Istilah-istilah keturunan dan kekerabatan**

Dalam kehidupan keluarga suku bangsa Kaili, mereka menggunakan istilah keturunan dan kekerabatan menurut bahasa daerahnya. Dalam prinsip keturunan umpamanya, digunakan istilah: *anata* (anak), *nonoana* (kemenakan), *makumpu*

(cucu), *mania* (menantu). Sedangkan dalam prinsip kekerabatan digunakan istilah *Toama* (ayah), *mangge* (paman), *sampesuvu* (saudara), *Sarara Sanggani* (sepupu sekali), *Sarara ruanggani* (sepupu dua kali), *Sampesuvu langgai* (saudara laki-laki), *Sampe-suvu mombine* (saudara perempuan), dan masih ada istilah-istilah lain yang belum sempat diungkapkan dalam tulisannya ini.

Dalam melakukan komunikasi antar kerabat dan keturunan, suku bangsa Kaili menggunakan bahasa daerah sendiri yang disebut bahasa Kaili. Akan tetapi bahasa Kaili itu sendiri atas beberapa dialek dan nama tersendiri menurut daerahnya. Ada 14 macam dialek bahasa Kaili, antara lain; Bahasa Kaili Doi di Banawa, Ledo di Palu, Da'a di Biromaru, Tara di Parigi, Edo di Dolo dan sebagainya.

C. Pemerintahan Tradisional

Sebelum Hindia Belanda datang ke Tanah Kaili, masyarakat suku bangsa Kaili di Donggala dan Palu telah mengenal beberapa zaman pemerintahan tradisional; yaitu: (1) Zaman Tomalanggai (pemberani dan diktator), (2) Zaman Tomanuru (manusia keturunan dewa dari kayangan), (3) Zaman Kemerdekaan (Pemerintahan Maradika).⁸⁾

1 Zaman Tomalanggai

Dalam zaman ini, masyarakat wilayah Donggala dan Palu masih hidup mengembara di pegunungan mencari bahan makanan yang berupa hewan-hewan buruan, buah-buahan dan sebagainya. Kehidupannya tidak tenteram karena saling kejar mengejar antara satu dengan lainnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang menang dalam peperangan turun ke lembah membuat perkampungan dan menetap bersama dengan kelompok masyarakat yang dikalah. Dalam kelompok masyarakat seperti itu terdapat seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan dan keberanian untuk memimpin dan menguasai yang lainnya. Orang yang

8) Hi. Muh. Djaruddin Abdullah, op-cit, hal. 16-24.

memiliki kemampuan fisik dan keberanian inilah menjadi pemimpin dan penguasa yang disebut *Tomalanggai*. Kepemimpinannya dikatakan diktator karena ia dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya tanpa memperdulikan penderitaan rakyat. Dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum rimba, masyarakat merasa tertekan dan tidak bebas karena tindakan-tindakan mereka harus sesuai kehendak Tomalanggai. Dengan demikian masyarakat merindukan suatu kekuasaan dan pemerintahan yang lebih baik dari pada yang sedang dialaminya.

2. Zaman Tomanuru

Sementara masyarakat merindukan suatu pemerintahan yang lebih tenteram, suatu ketika Tomalanggai bersama pasukannya pergi ke hutan berburu rusa. Di tengah hutan mereka melihat serumpun pohon bambu emas atau dalam bahasa Kaili disebut "*Bolo wata mbulawa*" artinya bambu kuning berwarna emas. Tomalanggai tertarik pada bambu emas dan ingin mengambilnya untuk dijadikan tempat air, sehingga pasukannya diperintahkan menebang bambu emas itu. Setelah ditebang, terjadi perubahan cuaca yaitu tiba-tiba menjadi mendung dan hujan deras yang disertai guntur. Tidak lama kemudian cuaca menjadi cerah kembali, dan tiba-tiba terlihat oleh mereka di tempat itu duduk seorang wanita cantik. Wanita cantik itu didekati dan dibawa pulang ke perkampungan dengan menggunakan usungan/pikulan yang terbuat dari bambu kuning. Setelah tiba di perkampungan mereka, wanita ini dijadikan permaisuri dengan melalui pesta besar-besaran selama sebulan. Setelah hidup berumah tangga, mereka dikaruniakan oleh Tuhan seorang putra yang kemudian bertumbuh menjadi besar dan menggantikan kekuasaan ayahnya menjadi pemimpin masyarakat. Putra mahkota ini menjalankan pemerintahan dengan baik dan memperlihatkan suatu perubahan besar-besaran dari sistem pemerintahan ayahnya. Dengan demikian masyarakat yang dipimpinnya memberi gelar "*Tobaraka*" artinya orang pembawa berkat dan memiliki kesaktian.

Sistem pemerintahan *to baraka* sangat disenangi oleh rakyatnya karena dengan pemerintahan yang dilandasi kejujuran dan kebijaksanaan, mereka merasakan suatu selera hidup baru yaitu hidup bebas tidak tertekan oleh penguasa dan sesamanya. Dari keturunan Tomalanggai-Tomanuru inilah munculnya bangsawan-bangsawan Kaili yang sebahagian menempati posisi menjadi raja. Dari kalangan anak-anak bangsawan inilah mula timbulnya perasaan merdeka, dan menimbulkan perasaan merdeka di kalangan masyarakat lainnya. Dengan demikian keturunan bangsawan diberi gelar "*madika*". Dengan gelar *Madika* ini, mereka semakin memperluas kekuasaannya dengan jalan mengawini anak kampung yang orang tuanya dipandang berpengaruh di dalam kampung tersebut. Dengan kawin-mawin pada tiap-tiap kampung, maka di kalangan masyarakat banyak mulai muncul perasaan kemerdekaan dari kekuasaan tunggal pemerintahan diktator. Dengan demikian berakhir pulalah kekuasaan Tomalanggai dan Tomanuru (*to baraka*) pada sekitar abad ke-16.

3. Zaman merdeka

Dalam zaman ini, yaitu pada akhir abad ke-16 pemerintahan dilakukan berdasarkan adat yang berarti suatu negara hukum. Sistem pemerintahan ini dapat dikatakan sudah memiliki unsur demokrasi karena tidak lagi merupakan kekuasaan tunggal, akan tetapi sudah mempunyai badan permusyawaratan rakyat yang disebut Dewan Kerajaan. Wilayah pemerintahan berdasarkan hukum adat Kaili dibagi atas tiga tingkatan yakni: swapraja yang dipimpin oleh *magau* (raja); distrik yang dikepalai oleh *madika* dan Kampung yang dikepalai oleh *kapala*.

Pada swapraja-swapraja itu dikenal tiga susunan pemerintahan yaitu pat anggota, pitunggota dan walunggota. Pat anggota artinya empat orang memegang pemerintahan. Pitunggota artinya tujuh orang memegang pemerintahan. Walunggota artinya delapan orang memegang pemerintahan. Pemerintahan yang ber-

ada pada wilayah patanggota, dikendalikan oleh empat orang dengan susunan sebagai berikut:

1. Ponggawa (relevan dengan menteri dalam negeri sekarang).
2. Pabicara (relevan dengan menteri penerangan sekarang).
3. Baligau (relevan dengan menteri luar negeri).
4. Galara (relevan dengan menteri kehakiman).

Susunan pemerintahan ini dikepalai oleh seorang yang bergelar *madika matua* (relevan dengan perdana menteri dan merangkap sebagai menteri dalam negeri). Adapun susunan pemerintahan yang berada pada wilayah pitunggota dikendalikan oleh enam orang yang dipimpin oleh seorang yang bergelar *madika malolo* (relevan dengan raja muda atau wakil presiden sekarang). Susunan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1. Madika Malolo (sebagai raja muda yang berfungsi sebagai wakil raja);
2. Madika Matua (relevan dengan perdana menteri);
3. Tadulako (relevan dengan menteri keamanan/pertahanan);
4. Sabandara (relevan dengan menteri perhubungan laut);
5. Ponggawa (relevan dengan menteri dalam negeri);
6. Galara (relevan dengan menteri kehakiman);
7. Pabicara (sebagai menteri penerangan).

Sedangkan susunan pemerintahan yang berada pada wilayah *walunggota* merupakan dewan pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja (magau). Susunan lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Magau (raja), sebagai pemegang tertinggi kekuasaan yang dipilih dan dilantik oleh Dewan Hadat.
2. Madika Malolo (sebagai wakil raja) yang juga dipilih dan dilantik oleh Dewan Hadat.
3. Madika Matua
4. Ponggawa
5. Galara
6. Tadulako

7. Pabbicara
8. Sabandara.⁹⁾

Pemerintahan raja-raja di Donggala dan Palu pada waktu itu diperkuat oleh alat pertahanan yang disebut lasykar pertahanan rakyat yang anggota-anggotanya diambil dari kaum pria dewasa yang sehat. Pemilihan mereka menjadi anggota lasykar adalah merupakan kewajiban untuk mempertahankan kerajaan. Perlengkapan senjata para anggota lasykar ini adalah tombak, parang, keris dan sumpitan. Sedangkan pimpinan atau opsirnya memakai tanda yaitu: topi sebagai topi waja (terbuat dari kayu) yang bagian depannya dipasang bentuk tanduk kerbau (terbuat dari besi), pada tangan sebelah kanan memegang *tokotampi* (tombak di ujungnya memakai ekor kuda sebagai tanda keperwiraan), dan pada tangan kirinya memegang prisai (kaliawo) dan memakai kelewang (guma).

Lasykar-lasykar tersebut ditugaskan menjaga rumah raja-raja dengan tujuan menjaga keamanan dan sewaktu-waktu disuruh menjalankan perintah raja. Dalam keadaan gawat, lasykar-lasykar dapat berkumpul melalui panggilan *tintinggaban* (bunyi beduk dari baruga).

Demikianlah pemerintahan tradisional raja-raja dari abad ke-16 sampai masuknya penjajah Belanda, masyarakat merasakan kemerdekaan hidup sehingga pada zaman itu disebut zaman kemerdekaan. Masyarakat suku Kaili pada waktu itu bertekad mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan:

"Malei raa mabubu,
maputi buku ratimbe,
kana kupemate ngataku"

yang artinya "Merah darah tertumpah, putih tulang terpotong, kematianku untuk negeriku".¹⁰⁾

9) Tanah Kaili, op-cit, hal. 20-21.

10) Hi. Muh. Djaruddin Abdullah, op-cit, hal. 21-24.

Kalau kita kembali mengkaji lebih mendalam tentang sistem pemerintahan tradisional suku bangsa Kaili yang telah diuraikan di atas, maka nampak dengan jelas bahwa munculnya aristokrat di kalangan mereka bukanlah berdasarkan ukuran keturunan ataupun kasta, tetapi muncul dari kekuatan fisik yang hebat dan dibarengi dengan keberanian (tomalnggai). Hal itu nampak sekali ketika "hukum rimba" berlaku di dalam kehidupan mereka. Ketika itu tampilah "Tomalnggai" sebagai salah seorang yang terkuat yang dapat menaklukkan semua lawannya. Dengan keberanian dan kekuatan fisik yang dimilikinya, maka tomalnggai terpilih menjadi pemimpin di kalangan mereka. Walaupun kemunculannya menjadi pemimpin tidak berdasarkan hasil pemilihan dan lagi pula kepemimpinannya bersifat diktator. Akan tetapi patut dimaklumi karena situasi dan kondisi norma-norma yang berlaku pada waktu itu yang menghendaknya demikian. Tanpa kekerasan dan kediktatoran dalam memimpin, maka kepemimpinannya tidak berarti apa-apa. Sifat diktatornya pula menyebabkan ia dapat mempersunting gadis cantik yang diduda sebagai manusia dari kayangan (penjelmaan dewa kayangan):

Kemudian keturunannya yang berhasil menggantikannya sebagai pemimpin masyarakat, dapat melahirkan sistem pemerintahan yang dapat dikatakan bersifat demokratis. Sifat jujur dan bijaksana yang dimilikinya sehingga ia disenangi oleh masyarakat dan diberi gelar "*tobaraka*", artinya orang yang membawa berkah dalam kehidupan manusia.

Dari golongan *tobaraka* inilah yang menurunkan orang-orang bangsawan di kalangan masyarakat suku bangsa Kaili yang sebagian dapat menduduki tahta kerajaan. Sifat demokratis yang pernah dimiliki oleh *tobaraka* itu diwariskan kepada golongan bangsawan yang dapat melahirkan perasaan merdeka di kalangan masyarakat. Dengan demikian golongan bangsawan mendapat gelar "*madika*", yaitu orang-orang yang membawa suasana ketenangan dan kemerdekaan di kalangan masyarakat.

D. Beberapa Kerajaan

Seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu tentang pemerintahan tradisional raja-raja bahwa raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada wilayah tertentu. Wilayah tempat raja berkedudukan itu disebut kerajaan (kagau). Menurut catatan sejarah yang ada, sebelum kedatangan Hindia Belanda, di Donggala dan Palu terdapat beberapa buah kerajaan besar dan kecil yang masing-masing dikuasai dan dipertahankan oleh rajanya masing-masing.

Di dalam buku "*Tanah Kaili*" diceriterakan bahwa di wilayah Palu (Kabupaten Donggala sekarang) terdapat satu kerajaan yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu kerajaan Bangga. Kerajaan Bangga yang terletak \pm 30 km di sebelah Timur kota Palu dianggap sebagai salah satu pusat kerajaan di Sulawesi Tengah pada waktu itu. Rajanya adalah seorang perempuan (Wumbulangi) yang sangat bijaksana dalam pemerintahannya. Kepentingan-kepentingan rakyatnya sangat diperhatikan sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Selain kebijaksanaan yang dimilikinya, ia juga terkenal dengan kecantikannya sehingga raja-raja tetangga banyak yang jatuh hati dan ingin mempersuntingnya.

Di antara raja-raja yang ingin mempersuntingnya, hanya Raja Pakawa (*Mbawa Lembah*) yang berhasil diterima pinangannya. Pesta perkawinannya dilaksanakan di kerajaan Bangga selama empat puluh hari empat puluh malam dengan sangat meriah yang dihadiri hampir seluruh masyarakat dari kedua kerajaan. Dengan perkawinan antara raja *Mbawa Lembah* dengan raja *Wumbulangi*, maka kerajaan Bangga dan kerajaan Pakawa berkabung menjadi satu kerajaan, yakni Kerajaan Bangga. Raja *Wumbulangi* diangkat menjadi Magau dan *Mbawa Lembah* menjadi raja muda (*Madika Malolo*). Beliau bersedia menjadi wakil dari *Wumbulangi* sebagai pertanda kecintaan terhadap isterinya.

Perkawinan antara kedua raja ini mempunyai tujuan ganda, yakni selain karena tertarik atas kecantikan dan kebijaksana-

an yang dimiliki oleh raja Wumbulangi, juga karena ingin lebih mempererat tali persaudaraan antara kedua kerajaan, sehingga semakin kuat posisinya terhadap kerajaan-kerajaan lainnya. Keturunan raja Bangga yang bernama *Irawala Lembah* yang menggantikan ibunya menjadi raja Bangga, akhirnya kawin dengan anak perempuan Madika Palu yang bernama *Gili Reme* atau *Pue Bongo*. Dengan perkawinan antara Raja Bangga Irawala Lembah dengan Gili Reme, kerajaan Bangga dan kerajaan Palu semakin mempererat tali persahabatan.

Kemudian di dalam catatan sejarah yang lain dikemukakan bahwa Lembah Palu yang lebih dikenal dengan nama Tanah Kaili pada mulanya terdapat 4 (empat) buah kerajaan yang besar, yakni:

1. Kerajaan Palu;
2. Kerajaan Tawaeli;
3. Kerajaan Bora dan;
4. Kerajaan Sigi.

Dari ke empat kerajaan tersebut, Kerajaan Sigi merupakan kerajaan yang paling besar dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Karena itu sering disebut bahwa Kerajaan Sigi sebagai kerajaan Sulawesi Tengah dengan pusat pemerintahannya di Bora. Diceriterakan oleh tokoh masyarakat bahwa kerajaan Sigi menjadi besar dan disegani karena Kerajaan Sigilah yang pertamanya mengadakan hubungan dengan Kerajaan Bone dari Sulawesi Selatan.¹¹⁾ Beberapa bukti yang dapat memperkuat pernyataan di atas seperti gelar dan nama-nama turunan bangsawan suku bangsa Kaili. Di kalangan masyarakat suku bangsa Kaili ditemukan nama-nama daeng, andi, petta, ponggawa dan sebagainya yang kesemuanya istilah yang berasal dari bahasa Bugis dan Makassar.

Menurut catatan sejarah, raja pertama Kerajaan Sigi adalah seorang perempuan yang bernama *Nili Najo* atau *Ngginjajo* yang

11) Wawancara dengan H. Djafar Laposero, di Pau Tgl. 20-9-1983.

berkedudukan di Sigi – Palu. Setelah raja pertama meninggal, kurang jelas siapa penggantinya menjadi raja. Akan tetapi cucunya, yang bernama Tondate Dayo yang naik tahta Kerajaan Sigi dan dapat mempersatukan seluruh kerajaan yang ada di Lembah Palu. Daerahnya membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Luas wilayah kekuasaannya tersimpul dalam suatu kalimat yang berbunyi "*Ranteng panau ranteng pandaka*" yang artinya orang yang menguasai barat dan timur. Dengan demikian, *Tondate Dayo* terkenal sebagai raja Sulawesi Tengah pada waktu itu. Perkawinan antara Tondate Dayo dengan Sitti Manuru dari Labuan yang menurunkan pemangku-pemangku kerajaan di Palu secara berganti-ganti, seperti: Pariusi, Ijazah Parampasi.^{1 2)}

Hal yang menarik perhatian dalam uraian di atas adalah dari kedua kerajaan (kerajaan Bangga dan Sigi) yang pernah mengalami kejayaan dan terkenal, keduanya diperintah oleh raja perempuan. Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh raja laki-laki tidak demikian halnya. Kedua kerajaan itu terkenal dan disegani, hal itu mungkin disebabkan karena rajanya adalah perempuan. Apalagi pada zaman kerajaan, kaum hawa masih sangat kurang yang dapat tampil sebagai pemimpin. Kedua raja perempuan tersebut dianggap sebagai manusia yang luar biasa, bahkan warga masyarakat melihat raja Bangga Wumbulangi sebagai penjelmaan dewa dari kayangan yang sengaja diutus oleh Tuhan yang membimbing manusia di bumi ini.

Dalam tahun-tahun berikutnya setelah terjadi penggantian raja dan terjadi peperangan antar kerajaan, terjadi perkawinan antar kerajaan dan bahkan terjadi pewarisan, maka kerajaan di wilayah Palu terdiri atas :

1. Kerajaan Palu,
2. Kerajaan Sigi,
3. Kerajaan Tawaeli,

1 2) Tanah Kaili. Op-cit, hal. 29-30.

4. Kerajaan Biromaru,
5. Kerajaan Kulawi,
6. Keranaan Parigi dan
7. Kerajaan Moutong.^{1 3)}

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 muncul kerajaan Sigi – Dolo sebagai kerajaan terkenal di Sulawesi Tengah. Kerajaan Sigi – Dolo dipimpin oleh seorang raja yang bernama Toi Dompou yang berhati keras dan membawa kerajaannya disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Dan bahkan raja Toi Dompou inilah yang paling keras menghadapi kedatangan Hindia Belanda.

Di wilayah Donggala terdapat juga kerajaan yang besar dan terkenal, yaitu Kerajaan Banawa, Kerajaan Banawa termasuk salah satu di antara tujuh swapraja yang ada di wilayah Tanah Kaili (Donggala–Palu). Kerajaan Banawa sebagai salah satu swapraja, memiliki susunan pemerintahan yang disebut Pitunggota. Dengan demikian terdapat tujuh daerah kekuasaan yang disebut distrik yang masing-masing dipimpin langsung oleh Madika. Daerah kekuasaan Pitunggota di kerajaan Banawa pada waktu itu ialah:

1. Daerah Ganti yang diperintah oleh Aru Ganti yang bernama Lamarauna
2. Daerah Lero yang diperintah oleh Aru Lero yang bernama Impodu
3. Daerah Kabonga yang diperintah oleh Aru Kabonga yang bernama Laduku
4. Daerah Toaya yang diperintah oleh Aru Toaya yang bernama Daeng Bone
5. Daerah Kola-Kola diperintah oleh Aru Kola-Kola yang bernama Lawado
6. Daerah Towale yang diperintah oleh Aru Towale yang bernama Makarumpa

13) Perkampungan di Kota sebagai wujud Pola Adaptasi Daerah Sulawesi Tengah, IDKD, 1982/1983, hal. 16-17.

7. Daerah Bale yang diperintah oleh Aru Bale yang bernama Malonda

Ada dua daerah distrik yang tidak masuk dalam wilayah pemerintahan Pitunggota, yaitu daerah Banawa (8 km di sebelah timur Kota Donggala) dan daerah Pantoloan (49 km di sebelah utara Kota Donggala atau 19 km di sebelah utara Kota Palu). Daerah Banawa adalah tempat kelahiran raja Banawa IV yang bernama Lasa Banawa dan daerah Pantoloan adalah tempat kelahiran Raja Banawa V yang bernama Makagili atau Pue Nggeu. Kedua wilayah itu tidak masuk daerah kekuasaan Pitunggota, hal itu mungkin disebabkan karena daerah kelahiran raja-raja.

Di samping daerah Pitunggota yang telah diuraikan di atas ada lagi tiga wilayah yang termasuk dalam lingkungan kerajaan Banawa, yaitu Balaesang, Dampelas dan Sodjol. Akan tetapi ke tiga wilayah itu masing-masing diperintah oleh Raja (Magau) sendiri-sendiri. Dengan demikian ke tiga wilayah itu dapat dianggap sebagai kerajaan tersendiri karena memiliki raja masing-masing. Ketiga wilayah itu terletak antara 100–200 km di sebelah utara Kota Palu, yaitu di pesisir pantai barat Kabupaten Donggala sekarang.

Mengenai nama raja-raja Banawa tidak seluruhnya tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1869, Kerajaan Banawa diperintah oleh Lasa Banawa dengan gelar Pue Mputih (raja ke IV). Setelah raja Lasa Banawa meninggal, ia digantikan oleh Makageli Tome-doda dengan gelar PuE Nggeu (raja ke V). Dan pada tahun 1902, Kerajaan Banawa diperintah oleh Lamarauna yang bergelar Aru Ganti (raja ke VI).

Pada zaman pemerintahan raja Lamarauna (raja ke VI), terdapat tiga orang raja yang kuat di wilayah Donggala, yaitu:

1. Raja Lamarauna alias Aru Ganti;
2. Raja Lamalonda alias Aru Bale, dan
3. Raja Pettalolo alias Walikota Donggala.

Raja-raja inilah yang sementara membenahi dan mengembangkan wilayahnya ketika Hindia Belanda memulai aksinya penjajahannya.

Demikianlah beberapa kerajaan di Tanah Kaili yang masing-masing pernah mengalami kejayaan dan kemajuan pada zaman-zaman tertentu ketika masa pemerintahan raja-raja tertentu pula. Sebelum Hindia Belanda menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut, maka para raja merupakan pucuk pimpinan tertinggi yang berhak mengurus urusan rumah tangga kerajaannya masing-masing. Akan tetapi mulai tahun 1888 ketika Hindia Belanda memasuki kerajaan-kerajaan tersebut, maka hak para raja dalam mengurus kerajaannya sudah mulai berkurang. Kemudian mulai pada tahun 1904, para raja semakin berkurang kekuasaannya dan bahkan tinggal sebagai lambang atau simbol belaka dalam kerajaan. Para raja dijadikan sebagai alat oleh Belanda untuk menguasai rakyat beserta seluruh sumber-sumber ekonomi yang penting di wilayah Tanah Kaili.

BAB IV

DONGGALA – PALU DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Kontak Dengan Hindia Belanda

Sebelum Hindia Belanda datang ke wilayah Tanah Kaili (Donggala – Palu), maka bangsa Portugis telah lebih dahulu mengadakan hubungan dagang dengan raja-raja suku bangsa Kaili, yaitu kira-kira pada abad 16–16 Masehi. Kedatangan bangsa Portugis ke Tanah Kaili berlangsung secara damai dan melalui jalur perdagangan. Antara suku bangsa Kaili dengan bangsa Portugis saling membutuhkan secara timbal balik, saling tukar-menukar barang, sehingga hubungan antara kedua suku bangsa berlangsung secara aman dan damai. Bukti-bukti peninggalan bangsa Portugis di wilayah Tanah Kaili adalah berupa bentuk dan model pakaian. Sampai sekarang model dan bentuk pakaian yang mempunyai persamaan dengan pakaian Portugis masih dapat dijumpai pada masyarakat Kaili yang berdomisili di wilayah bekas kerajaan Kulawi (80 km dari kota Palu sekarang).

Selain itu wilayah Tanah Kaili telah mendapat kunjungan dari bangsa Melayu Tua dan menetap di beberapa daerah pedalaman. Mereka mengadakan kawin-kawin dengan penduduk asli. Sampai sekarang masih dapat ditandai keturunannya, yaitu

mempunyai warna kulit lebih bersih dan selera makannyapun berbeda dengan selera makan penduduk asli. Kedatangan bangsa Melayu Tua tersebut di wilayah Tanah Kaili adalah ingin menjalin hubungan perdagangan dengan masyarakat suku bangsa Kaili, terutama di kalangan raja-raja.

Digambarkan bahwa selama bangsa Portugis berada di Tanah Kaili, situasi ekonomi dan politik cukup baik dan bahkan dikatakan suatu zaman yang gemilang. Namun zaman gemilang itu segera menjadi kacau setelah Hindia Belanda memasuki Tanah Kaili. Kedatangan Hindia Belanda mengadakan hubungan dagang dengan raja-raja suku bangsa Kaili, membuat bangsa Portugis semakin terasing sehingga sering terjadi bentrokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Hal ini membuat bangsa Portugis tidak dapat bertahan lama di Tanah Kaili menjalankan misi perdagangannya. Kira-kira pada tahun 1900 putuslah hubungan antara raja-raja Kaili dengan bangsa Portugis.¹⁾

Kedatangan Hindi Belanda di kerajaan Banawa melalui jalur perdagangan VOC dan diperkuat oleh perjanjian dengan raja-raja yang berbentuk kontrak jangka panjang dan jangka pendek. Kerajaan yang pertama-tama melakukan penanda tanganan perjanjian dengan Belanda adalah Kerajaan Parigi, yaitu pada tahun 1863 (*Large Kontrack*) dan tahun 1917 ditanda tangani pula *Karte Verklaring*. Kemudian menyusul Kerajaan Banawa dengan *Large Kontrack* pada tahun 1888 dan *Karte Verklaring* tahun 1904. Sesudah penanda tanganan perjanjian di Kerajaan Banawa, maka kerajaan-kerajaan lain di lembah Palu segera didatangi pula, seperti kerajaan Palu pada tahun 1888 (*Large Kontrack*) dan tahun 1921 *Karte Verklaring*. Kemudian menyusul Kerajaan Tawaeli pada tahun 1888 (*Large Kontrack*) dan tahun 1912 *Karte Verklaring*, Kerajaan-kerajaan Biromaru, Sigi dalam tahun 1891 *Large Kontrack* dan 1980 *Karte Ver-*

2) Sejarah Perkembangan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala, Humas Kabupaten Donggala, Palu, tanpa tahun, hal. 4 (berupa stensilan).

klaring, Kerajaan Moutong pada tahun 1896 dan Kerajaan Kula-wi pada tahun 1908.²⁾

Dengan demikian dari tahun 1863 sampai dengan tahun 1908 kerajaan-kerajaan yang ada di Tanah Kaili praktis telah dikuasai oleh Hindia Belanda dengan cara penanda tangan perjanjian, baik jangka panjang maupun perjanjian jangka pendek. Sesudah diperlakukannya *Karet Verklaring* (Perjanjian Jangka Pendek) oleh Belanda, maka semakin terbatasliah kekuasaan raja-raja di semua kerajaan Tanah Kaili dalam mengurus urusan rumah tangga kerajaan masing-masing. Sebaliknya semakin kuatlah kedudukan dan kekuasaan Hindia Belanda dalam melaksanakan misi perdagangannya yang bersifat monopoli serta politik yang bersifat mengadu domba.

Demikianlah proses penaklukan kerajaan-kerajaan di Tanah Kaili oleh Hindia Belanda yang menggunakan waktu selama kurang lebih 20 tahun, yakni dari tahun 1888 sampai dengan tahun 1908. Kerajaan yang mula-mula ditaklukkan adalah kerajaan Banawa dan Palu, kemudian menyusul Tawaeli. Sesudah kerajaan-kerajaan pantai dikuasai, kemudian beralih kepada kerajaan-kerajaan daratan seperti Biromaru, Sigi dan Dolo. Dan yang terakhir dikuasai adalah Kerajaan Kulawi yang berada di pegunungan.

Kalau diperhatikan secara seksama tentang urutan waktu dan prioritas pertama penaklukan kerajaan-kerajaan tersebut, nampak bahwa Hindia Belanda menggunakan penaklukan strategis politis. Dua kerajaan yang mula-mula ditaklukkan adalah Banawa dan Palu. Kerajaan Banawa adalah kerajaan pantai di mana terletak pelabuhan laut terbesar di Sulawesi Tengah pada waktu itu. Dengan didudukinya kerajaan Banawa berarti Belanda praktis telah menguasai urat nadi perhubungan laut yang sangat menguntungkan komunikasi antara tentara Belanda lainnya yang ada di Manado, Poso dan Toli-Toli. Selain itu bidang per-

1) Hi. Muh. Djaruddin Abdullah, *op-cit*, hal. 24-25.

ekonomian praktis pula dikuasainya, karena pada Pelabuhan Donggala Kerajaan Banawa merupakan pusat ke luar masuknya barang-barang dagangan yang sangat menentukan kelangsungan hidup kerajaan-kerajaan lainnya.

Sedangkan Kerajaan Palu yang unsur-unsur pimpinan masyarakat atau staf kerajaan pada umumnya mempunyai hubungan kekerabatan dengan raja-raja yang ada di Boromaru, Sigi, Dolo dan Kulawi. Dengan menguasai Kerajaan Palu berarti dapat mempermudah menaklukan kerajaan-kerajaan lainnya. Walaupun dalam proses menaklukan Kerajaan Sigi, Biromaru, Dolo dan Kulawi mengalami hambatan; tetapi toh akhirnya berhasil dikuasai oleh Belanda karena banyak mendapat petunjuk dan bantuan dari pihak kerajaan Palu yang telah dikuasainya lebih dahulu.

Keberhasilan Hindia Belanda dalam menaklukan kerajaan-kerajaan di Tanah Kaili adalah karena politiknya yang bersifat mengadu domba. Kerajaan-kerajaan yang dahulunya bersahabat, akhirnya menjadi berselisih dan bermusuhan satu sama lain akibat politik adu domba yang sangat licik dari Belanda. Sistem adu-domba yang dilancarkan oleh Hindia Belanda pada waktu itu ialah melakukan fitnah antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Dengan fitnah itu maka timbullah permusuhan di kalangan raja-raja. Selain itu, apabila ada keturunan raja yang sedang berselisih memperebutkan kedudukan atau tahta, maka Belanda memberi bantuan salah satu pihak sehingga terjadilah permusuhan yang menimbulkan banyak korban. Dalam keadaan bermusuhan dan lemah semacam itu, Belanda mempergunakan kesempatan melakukan pencaplokan dan menjadikannya sebagai daerah jajahan. Sedangkan bagi kerajaan yang tidak berselisih, dilancarkan tuduhan-tuduhan sekedar alasan untuk bertindak membatalkan perjanjian-perjanjian, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Taktik politik adu-domba yang licik yang dilancarkan oleh Hindia Belanda seperti itu, akhirnya raja-raja dan rakyat setem-

pat semakin kacau dan tidak berdaya. Dengan demikian ± pada tahun 1905, Hindia Belanda telah menguasai seluruh bidang-bidang ekonomi dan bidang pemerintahan. Namun kegiatan-kegiatan Hindia Belanda yang semakin memperlihatkan aksi penjajahannya, akhirnya membuat rakyat hilang kesabarannya dan sadar untuk mulai menggalang persatuan kembali untuk mengadakan perlawanan. Di beberapa kerajaan sudah mulai tumbuh semangat ingin merdeka yang semakin hari semakin mendorong melakukan protes dan perlawanan terhadap Hindia Belanda.

B. Aksi Perlawanan Masyarakat Tanah Kaili

Sebagai ilustrasi, dalam bahagian ini akan diuraikan pula beberapa aksi perlawanan rakyat Sulawesi Tengah pada umumnya dan Tanah Kaili (Donggala—Palu) khususnya. Uraian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang terjadinya aksi tersebut dan perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan sebagainya.

Seperti halnya dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin perlawanan terhadap Hindia Belanda yang sedang melancarkan aksi penjajahannya. Maka di Tanah Kaili juga terjadi perlawanan yang sengit yang dipimpin oleh raja-raja dan tokoh masyarakat lainnya. Aksi perlawanan raja-raja bersama masyarakatnya di Tanah Kaili khususnya dan Sulawesi pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Perang Donggala ± 1902.³⁾

Pada tahun 1900, zaman pemerintahan raja Banawa V yang bernama Mokogili Tomedoda alis Pue Nggeu; raja Tombo-lotutu dari pantai Timur melarikan diri menghindari pengejaran

3) Tanah Kaili, *ibid*, hal. 35-40.

tentara Belanda. Dan bersembunyi di Banawa. Pelarian raja Tombolotutu ke Donggala (Kerajaan Banawa) mengakibatkan raja Banawa dituduh menyembunyikannya. Dengan tuduhan itu, raja Banawa V ditangkap dan dibuang ke Makassar pada tahun 1902 (meninggal di tempat pembuangannya). Peristiwa penangkapan dan pembuangan raja Banawa V (Pue Nggeu) tersebut merupakan latar belakang terjadinya perang Donggala pada beberapa tahun kemudian.

Sesudah raja Banawa V (Pe Nggeu) dibuang dan meninggal di pengasingannya, maka pada akhir tahun 1902 muncul raja Banawa yang VI yang terdiri atas tiga orang yakni: Lamarauna sebagai Aru Ganti, Lamalonda sebagai Aru Bale dan Pettalolo sebagai walikota Donggala. Ketiga raja tersebut masing-masing mempunyai kekuasaan menurut wilayahnya, namun hubungan ketiganya cukup baik karena selain diikat oleh satu kerajaan (Kerajaan Banawa), juga masih memiliki hubungan darah yang dekat.

Ketiga raja tersebut, dua di antaranya (Lamarauna dan Pettalolo) dapat bekerjasama dengan Hindia Belanda. Sedangkan Lamalonda (Aru Bale) yang merupakan kemenakan raja Banawa V sama sekali tidak mau bekerjasama dengan Hindia Belanda. Walaupun ia termasuk anggota hadat Pitunggota bentukan Belanda dan telah menanda tangani perjanjian (*Verklaring*) akan tetapi ia inerasa tidak terikat oleh perjanjian itu sehingga tidak pernah menghindari konperensi Hadat yang dilakukan apabila orang Belanda hadir dalam pertemuan itu. Sikap protes dan membangkang yang diperlihatkan oleh Aru Bale alias Lamalonda tersebut karena ia sadar bahwa Hindia Belanda ingin menjajahnya. Dan semakin besar kebenciannya terhadap Belanda setelah pamannya Pue Nggeu dibuang dan meninggal di Makassar.

Walaupun Raja Lamarauna dan Pettalolo berkali-kali memberikan nasihat Lamalonda, akan tetap pada pendiriannya bahwa tidak mau bekerjasama dengan Hindia Belanda dan tidak

dapat menerima adanya kekuasaan Belanda dalam daerahnya. Karena sikap protes dan membangkang yang diperlihatkan oleh Lamalonda selama itu, maka Belanda menganggapnya sebagai hal yang berbahaya dan merupakan penghalang besar dalam usaha penjajahan. Dengan demikian Tuan Petoro yang berkedudukan di Donggala mengusulkan kepada gubernur Belanda yang berkedudukan di Makassar agar raja Bale, Lamalonda di buang karena membahayakan kedudukan Belanda di Donggala.

Usul Tuan Petoro di Donggala untuk mengasingkan raja Bale, rupanya disetujui oleh gubernur di Makassar. Dengan demikian datanglah sebuah kapal perang Belanda berlabuh di Pelabuhan Donggala dengan maksud ingin menangkap raja Bale (Lamalonda) secara kekerasan. Kedatangan residen Belanda bersama tentara perangnya di Pelabuhan Donggala dijemput oleh Tuan Petoro bersama Pettalolo. Setelah diadakan pembicaraan, Pettalolo mengusulkan agar Belanda tidak menempuh jalan kekerasan karena jalan damai masih bisa dilakukan. Akan tetapi usul Pettalolo tidak dikabulkan dan Belanda tetap ingin menempuh jalan kekerasan.

Sementara kapal perang Belanda berlabuh di Donggala dan perundingan antara pihak Belanda dengan Pettalolo sedang dilakukan, maka Lamalonda bersama 200 orang prajuritnya berangkat mengepun Istana Pettalolo. Usaha Pettalolo untuk mengajak pihak Belanda menempuh jalan damai, nampaknya membuat Lamalonda semakin curiga terhadap Pettalolo yang dianggap bersekongkol dengan Belanda untuk penangkapan dirinya. Dengan kecurigaan itu, pada waktu Pettalolo menukuni tangga menuju kantor Tuan Petoro, tiba-tiba Lamalonda menikamnya dari belakang yang disertai komando kepada pasukannya "*Timbemo Ngana*", artinya mulai dan perangilah. Dengan komando itu, Pasukan Lamalonda yang bersenjatakan parang dan tombak menyerbu ke tengah-tengah tentara Belanda dan terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini menimbulkan banyak korban di antara

kedua belah pihak, termasuk Pettalolo dan seorang pengawalnya yang bernama Haji Nontji yang mayatnya dikuburkan berdampingan dekat mesjid Donggala.

Setelah peperangan berhenti, Belanda minta pertanggungjawaban kepada Lamarauna atas kematian Pettalolo dan memerintahkan agar Lamalonda ditangkap. Pemerintah Belanda itu dirundingkan oleh Lamarauna bersama dengan Mohammad Amir (anak Pettalolo). Hasil perundingannya, Mohammad Amir mengusulkan agar jangan diambil tindakan terhadap Aru Bale (Lamalonda) atas kematian ayahnya. Yang penting dipikirkan adalah bagaimana cara agar ke tiga kerajaan di Banawa bisa menjadi rukun dan aman kembali. Berdasarkan permintaan Mohammad Amir kepada Lamarauna yang disampaikan kepada pihak Belanda, maka Lamalonda diperkenankan kembali ke tempat kedudukan semula menjadi raja Bale.

Dalam peristiwa pertempuran antara pihak Belanda dengan Kerajaan Bale, walaupun tidak berhasil mengusir Hindia Belanda dari wilayah Kerajaan Benawa, akan tetapi Hindia Belanda sudah menjadi segan terhadap Aru Bale, dan sampai pada akhir kedudukan Belanda di kerajaan Benawa tidak pernah berbuat seenaknya terhadap Kerajaan Bale. Dengan peperangan antara Belanda dengan Kerajaan Banawa pada waktu itu, maka tercatat dalam sejarah lokal pahlawan-pahlawan Donggala seperti: Pettalolo, Hi. Nontji, Hi. Hasan, Lamalonda dan sebagainya.

2. Perang Sigi ± 1905—1908⁴⁾

Seperti uraian pada bagian terdahulu bahwa pada akhir abad ke-19 dan permulaan ke-20, kerajaan yang terkuat di Sulawesi Tengah adalah Kerajaan Sigi-Dolo yang dipimpin oleh Raja Toi Dompu. Raja Toi Dompu adalah orang yang keras hati dan berpendirian teguh. Ia sama sekali tidak mau mengadakan kerja

4) Tanah Kaili, Op-cit, hal. 32-35.

sama dengan Belanda. Setiap ajakan Belanda untuk mengadakan perjanjian kerjasama selalu ditolakny, karena beliau mengetahui bahwa Belanda akan menanamkan penjajahannya. Dengan sikap Raja Toi Dompu seperti itu, maka pihak Belanda menganggap sebagai penghalang besar dalam melaksanakan dan mencapai cita-citanya. Karena itu Toi Dompu harus disingkirkan dengan jalan kekerasan, dengan taktik tuduhan sebagai alasan untuk menangkapnya.

Pada suatu waktu Belanda mengumumkan bahwa seekor kuda kesayangannya hilang yang dicuri oleh Raja Toi Dompu. Dengan tuduhan itu, Belanda mempunyai alasan untuk menangkap Raja Tol Dompu. Dari Poso (pada waktu itu menjadi pusat pertahanan Belanda di Sulawesi Tengah), Belanda mempersiapkan pasukannya melalui Parigi dan Sausu menuju Kerajaan Sigi untuk menangkap Toi Dompu. Setibanya tentara Belanda di Sigi – Dolo, maka terjadilah pertempuran sengit yang menimbulkan banyak korban di antara kedua belah pihak. Namun karena kepandaian dan peralatan Belanda lebih tinggi, maka akhirnya Raja Toi Dompu berhasil ditangkap dan di tahan di Palu. Peristiwa tertangkapnya Raja Toi Dompu menimbulkan aksi yang lebih hebat di kalangan masyarakat Sigi, yang dipimpin oleh Lamakarate dan Lamasatu. Pertempuran sengit itu terjadi di Kalukubula yang menimbulkan banyak korban di pihak Belanda. Dengan demikian Belanda terpaksa mempergunakan tentara cadangannya yang ada di Palu.

Sementara Raja Toi Dompu dipersiapkan pengasingannya ke Pulau Jawa, dua orang utusan dari Sigi (Pue Langa Tomain Intolepo), menghadap pada Belanda di Palu agar Toi Dompu dibebaskan. Namun permintaannya ditolak, dan bahkan kedua orang itu ditahan. Mereka dapat dibebaskan apabila dapat menebus 100 ekor kerbau dan 200 ekor domba. Tersiernya berita bahwa kedua orang utusan rakyat Sigi juga ditahan oleh Belanda, maka rakyat Bora dan Biromaru mempersiapkan pasukan untuk mengadakan serangan umum di Palu. Akan tetapi rupa-

nya rencana itu diketahui oleh Belanda melalui spionase, maka Belanda lebih dahulu melakukan penyerangan.

Pada waktu Belanda mengadakan penyerangan ke Bora, masyarakat telah menyingkir ke gunung-gunung membuat benteng pertahanan. Dan hanya delapan orang pemuda yang tinggal yang ditugaskan mengintai di mana Belanda akan membuat pertahanan dan perkemahan. Karena Bora dalam keadaan kosong, maka tentara Belanda langsung membuat perkemahan kemudian istirahat tanpa kecurigaan karena tidak ada perlawanan. Dalam keadaan tidak siaga Belanda di perkemahan, maka kedelapan pemuda itu melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Bersamaan dengan itu, rakyat Bora yang bersembunyi di bukit-bukit ikut menyerbu yang dipimpin oleh Tuwaja dengan stafnya antara lain Lasoso. Dalam pertempuran itu, Komandan dan berpuluh-puluh tentara Belanda yang tewas, sehingga tentara Belanda lainnya melarikan diri ke Dolo. Pada waktu berikutnya, terjadi lagi pertempuran antara masyarakat Bora dengan tentara Belanda. Namun karena Belanda semakin banyak jumlahnya dan peralatan perang yang serba lengkap, maka masyarakat Bora terpaksa mengundurkan diri memasuki benteng pertahanannya di gunung-gunung.

Setelah dua kali terjadi pertempuran sengit di Bora, maka Belanda menarik kesimpulan bahwa rakyat Bora tidak akan dapat ditaklukkan dengan jalan kekerasan. Selain itu Belanda mengetahui bahwa Pue Langa yang berada dalam tahanannya adalah pemimpin rakyat Bora yang sangat ditaati perintahnya. Dengan bujukan dan janji yang muluk-muluk, akhirnya Pue Langa diantar oleh Belanda ke Bora memerintahkan rakyatnya agar kembali ke rumah masing-masing. Dengan demikian rakyat Bora bermunculan dari gunung-gunung kembali ke rumahnya dan Pue Langa dibebaskan oleh Belanda.⁵⁾ Sesudah itu tidak ada lagi perlawanan rakyat Bora terhadap Belanda. Sedangkan

5) Desa Bora, adalah pusat kerajaan Sigi-Dolo, letaknya ± 25 km di sebelah Timur kota Palu.

To Dompu diasingkan ke Pulau Jawa dan meninggal di tempat pembuangannya.

Peristiwa pertempuran antara rakyat Bora dengan tentara Belanda yang bersifat lokal itu, cukup berarti di kalangan masyarakat setempat. Mereka cukup menghargai jasa-jasa tokoh masyarakat yang ikut berperang melawan Belanda dan menganggapnya sebagai pahlawan bangsa yang gugur dalam pertempuran, terutama rajanya Toi Dompu yang meninggal di tempat pengasingannya di Jawa. Dengan keberanian yang dimiliki oleh rakyat Sigi, Bora dan Biromaru, maka taktik perang yang dipergunakan melawan tentara Belanda patut pula dihargai. Walaupun peralatan perang yang dipergunakan sangat terbatas dan tradisional.

3. Perang Kulawi ± 1904–1908 ⁶⁾

Kulawi adalah daerah pegunungan dan termasuk salah satu kerajaan dalam wilayah Donggala – Palu yang terletak ± 73 km di sebelah Timur kota Palu. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Kerajaan Kulawi diperintah oleh seorang raja yang bernama Toi Torengke. Raja Kulawi ini adalah termasuk pemberani, tegas dan bijaksana, sehingga rakyat mematuhi segala perintahnya. Sifat keberanian dan ketegasannya terbukti bahwa dalam setiap ajakan Belanda untuk mengadakan kerjasama selalu ditolaknya. Karena sikap membangkang yang diperlihatkan oleh Raja Kulawi Toi Torengke, maka Belanda mulai mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Kerajaan Kulawi.

Sebelum penyerangan dimulai oleh Belanda, terlebih dahulu diutus dua orang yakni Lamarauna dari Donggala Jodjo Buri dari Palu untuk menemui Raja Kulawi supaya menyerah saja dan tidak usah mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Kedua utusan Belanda dari Palu itu diterima oleh Raja Kulawi, dan kepadanya diberikan jawaban bahwa Toi Torengke sama

6) Tanah Kaili, *ibid*, hal. 40-43.

sekali tidak mengizinkan Belanda menginjakkan kakinya di wilayah Kulawi. Dan kalau berani melanggarnya, akan terjadilah pertempuran.

Sekembalinya kedua orang utusan Belanda tersebut, Toi Torengke sudah menduga bahwa Belanda akan mengadakan serangan. Oleh sebab itu segera diberangkatkan 1.500 orang pasukan ke gunung Momi (benteng pertahanan rakyat Kulawi yang terkenal strategis dan kuat) yang diperlengkapi dengan 500 pucuk senjata api (berbagai macam meriam dan senapan) serta berbagai macam senjata tradisional seperti tombak, parang, keris, sumpit, panah dan onggokan batu besar. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Toi Torengke tersebut diketahui oleh pihak Belanda, sehingga Belanda mempersiapkan pula tentara pilihan dengan peralatan yang lengkap untuk menyerang Kerajaan Kulawi.

Perlu dijelaskan bahwa untuk mencapai ibu kota Kerajaan Kulawi, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah gunung Momi, yaitu benteng pertahanan rakyat Kulawi yang cukup strategis. Dengan demikian Belanda harus berhati-hati dalam usaha menyerang Kerajaan Kulawi. Pada suatu waktu yang telah ditetapkan (tahun 1904), serangan Belanda mulai dilancarkan melalui gunung Momi. Pasukan Kerajaan Kulawi yang telah lama dipersiapkan menyebutnya dengan serangan meriam, senapan, panah, sumput dan gulingan batu yang mematikan. Dengan serangan itu, Belanda tidak dapat menahannya, sehingga terpaksa mengundurkan diri ke pangkalannya di salah satu kampung yang bernama Kampung Tuwa. Pertempuran antara rakyat Kulawi dengan pihak Belanda berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan menimbulkan banyak korban di pihak Belanda. Selama peperangan berlangsung, praktis air sungai Palu tidak dapat dipergunakan karena banyak mayat yang hanyut di sungai itu.

Kegagalan Belanda terhadap serangan Kerajaan Kulawi membuat mereka semakin giat mencari jalan lain untuk mencapai ibukota Kerajaan Kulawi. Belanda sudah memastikan

tertangkap dan Belanda menguasai Kerajaan Kulawi, serta menaikkan bendera putih merah maka Belanda memerintahkan kepada raja Kulawi agar semua pasukannya yang berada di Gunung Momi supaya menyerah dan dengan ancaman bahwa apabila anjuran itu tidak dilaksanakan, maka raja bersama keluarganya akan dibunuh, sehingga raja Kulawi terpaksa melakukan perintah itu. Karena rakyat dan pasukan kerajaan sangat patuh kepada rajanya, maka anjuran itu dipatuhi. Dengan demikian, rakyat dan semua pasukan yang ada di gunung Momi kembali ke pusat kerajaan dan menyerah kepada Belanda.

Sesudah terjadi pertempuran pada ketiga kerajaan tersebut di atas, maka praktis kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Donggala – Palu telah dikuasai oleh Hindia Belanda. Kekuasaan Hindia Belanda yang sdah semakin menindas dan menyiksa masyarakat Donggala – Palu khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya berlangsung sampai tahun 1942.

Pada awal tahun 1942, barulah muncul kembali perlawanan dari pihak kerajaan bersama dengan masyarakat, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan nama Gerakan Merah Putih. Gerakan Merah Putih ini berpusat di Gorontalo yang dipimpin oleh Nani Wartanobe dan Kusno Dhanupoyo, kemudian diikuti oleh masyarakat Sulawesi Tengah seperti: di Toli-Toli, di Luwuk dan di Poso.⁷⁾ Ketiga peristiwa gerakan Merah Putih di Sulawesi Tengah ini melalui proses sesuai dengan daerah masing-masing sebagai berikut:

a. Gerakan Merah Putih di Toli-Toli

Pada tanggal 25 Januari 1942, terjadi pemberontakan dan pembunuhan terhadap Kepala Polisi Belanda Inspektur Bartje. Dengan terbunuhnya kepala Polisi Belanda tersebut, maka semua pejabat pemerintahan Belanda berhasil ditangkap dan ditahan oleh pihak Gerakan Merah Putih. Dengan tertangkapnya

7) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen P dan K, Jakarta, 1982, hal. 9-24.

bahwa dengan menyerang Kulawi melalui Gunung Momi tidak mungkin dapat berhasil. Dengan petunjuk Intje Muhammad (penunjuk jalan Belanda), diperoleh keterangan bahwa hanya Madika Tuwa yakni yang bernama Jaraba yang mengetahui jalan lain menuju Kulawi. Dengan keterangan itu, Jaraba (Madika Tuwa dimana Belanda mengambil pangkalan) dipanggil menghadap Belanda. Pada mulanya Madika Tuwa tidak mau memberitahukan Belanda tentang jalan pintas yang dimaksud itu, akan tetapi karena ia disiksa dengan dipangng di atas api, maka terpaksa memberitahukannya. Jalan pintas yang dimaksud itu adalah dengan mengikuti aliran Sungai Miu ke hulu sampai kepada Kota Kulawi. Dengan informasi itu, Belanda merasa puas dan optimis akan menyerang Kerajaan Kulawi dengan mudah tanpa perlawanan.

Pada waktu itu tentu Belanda yang berpangkalan di Tuwa telah memperoleh bantuan pasukan dari Palu dan Manado. Kemudian diberangkatkan ke Kerajaan Kulawi melalui Sungai Miu. Bersamaan pemberangkatan pasukan Belanda yang melalui aliran Sungai Miu, sebahagian tentara Belanda melancarkan serangan di Gunung Momi dengan siasat agar pasukan Kerajaan Kulawi tidak mengetahui serangan yang melalui Sungai Miu. Taktik perang yang dilakukan oleh Belanda itu ternyata berhasil, sehingga serangan yang dilakukan melalui aliran Sungai Miu dapat berhasil memasuki ibu kota Kerajaan Kulawi. Ibu kota Kerajaan Kulawi pada waktu itu agak sepi karena sebahagian besar pasukan Kerajaan dipusatkan pada Momi untuk menghadapi serangan yang sedang dilancarkan Belanda. Sedangkan penduduk yang tidak ikut berperang diungsikan ke gunung-gunung.

Ketika Belanda memasuki pusat Kerajaan Kulawi, Raja Kulawi Toi Torengke kebetulan berada dalam istananya yang hanya dikawal oleh beberapa pasukannya. Dengan demikian ia tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga dapat ditangkap dengan mudah oleh tentara Belanda. Setelah raja Kulawi Toi Torengke

tokoh-tokoh penjajah tersebut maka praktis kekuasaan berada pada tangan kelompok Gerakan Merah Putih. Gerakan inilah yang mengatur pemerintahan dan keamanan yang dipimpin oleh ID Aruy.

Setelah kekuasaan berada sepenuhnya di tangan kelompok Gerakan Merah Putih, maka pada tanggal 1 Pebruari 1942, sang Merah Putih dikibarkan di depan kantor PSII Toli-Toli yang diiringi Lagu Indonesia Raya. Pengibaran Sang Merah Putih di bumi Toli-Toli adalah lebih awal tiga tahun setengah sebelum pengibaran Sang Saka Merah Putih di Pegangsaan Timur Jakarta. Pengibaran bendera Merah Putih di Toli-Toli dipimpin oleh M. Salim Hi. Mallu. Pengerek bendera adalah M. Nawir Hi. Hamid dan Abu Baada. Peristiwa kudeta dan pengibaran Bendera Merah Putih di Toli-Toli tersebut diketahui oleh Belanda di Donggala, sehingga seminggu kemudian pasukan Belanda menyerang Toli-Toli yang mengakibatkan terbunuhnya pejuang-pejuang Merah Putih seperti: ID Aruy, H.L. Waani, Kakaleo, Pering, Siswoyo, Suparmán, Languju. Para pejuang yang gugur dalam pertempuran itu, dikuburkan bersama dan dibangun sebuah Tugu Pahlawan di depan Kantor Bupati Tingkat II Toli-Toli pada zaman Jepang. Kemudian pada tahun 1950, kuburan itu dipindah ke Taman Pahlawan dengan nama Tugu Proklamasi. Dan pada tahun 1974, namanya diganti menjadi Tugu Pancasila.

b. Gerakan Merah Putih di Luwuk Banggai

Pada tanggal 6 Pebruari 1942, di rumah seorang pedagang Tionghoa Theng Fu Yung di kampung Pagimana diadakan rapat oleh Tokoh-tokoh Pergerakan Merah Putih. Keputusan rapat yang diambil adalah akan mengadakan pemberontakan dan menggulingkan pemerintahan penjajah Belanda yang berkedudukan di Luwuk. Dari keputusan rapat, ditunjuklah TS Abdullah sebagai pemimpin pemberontakan yang dibantu oleh beberapa anggota. Kemudian Team ini membentuk lagi pasukan pemberontak Pemuda Merah Putih yang terdiri atas: Ince Umar

Dahlan sebagai Komandan I, AR Lanasir sebagai Komandan II, serta beberapa anggota seperti YS Monoarfa dan sebagainya.

Pada tanggal 11 Pebruari 1942 setelah selesai shalat Jum'at, pasukan Gerakan Merah Putih yang berjumlah 12 orang diberangkatkan menuju Luwuk. Jarak antara Pagimana dengan Luwuk ± 64 km, sehingga pasukan pemberontak (Gerakan Merah Putih) baru tiba di Luwuk pada jam 03.00 tanggal 12 Pebruari 1942. Setelah memasuki kota Luwuk, mereka pertama-tama menguasai stasiun radio dan kapal SS Urania. Tepat pukul 10.00 pada hari itu, seluruh aparat pemerintah Belanda berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya dilaksanakan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda (Gezaghebber F. Walrabbe sebagai HPB) ke tangan pihak Gerakan Merah Putih (Dr. Soetaryo sebagai pimpinan pergerakan). Selesai serah terima jabatan, bendera Merah Putih Biru diturunkan dari tiangnya lalu bendera Merah Putih dinaikan dengan upacara diiringi lagu Indonesia Raya.

Setelah situasi dikuasai oleh pasukan Gerakan Merah Putih, maka dibentuklah pemerintahan nasional dengan istilah Komite 12 yang dipimpin oleh SA Amir (Eks raja Banggai), dan dibantu oleh 11 (sebelas) staf lainnya (tanggal 16 Pebruari 1942). Dengan terbentuknya pemerintahan nasional (Komite 12) Daerah Banggai, maka pemerintahan ditata kembali, terutama di bidang keamanan untuk menjaga serangan balasan Belanda dari tempat-tempat lain.

c. Gerakan Merah Putih di Kerajaan Tojo – Poso

Di Kerajaan Tojo dengan ibu kota Ampana Kabupaten Poso terjadi pula perebutan kekuasaan oleh Pemuda Merah Putih dari tangan penjajah Belanda. Pergerakan di Kerajaan Tojo ini berbeda dengan pergerakan yang terjadi di kedua tempat tersebut di atas, karena di Ampana Poso, raja Tojo sendiri yang langsung memimpin pergerakan itu, yaitu Raja Tanjumbulu. Pada bulan Desember 1941, raja Tanjumbulu berangkat ke

Kampung Malei untuk mengadakan perundingan dalam rangka rencana aksi melawan Belanda. Di Malei raja Tanjumbulu mengadakan perundingan dengan tiga orang pengikut setianya yakni: Masewa Daeng Palewang sebagai penasihat raja, Lasongkeng Daeng Palewang sebagai seorang guru kantau dan Abdul Latief Manghitung. Hasil perundingan yang diperoleh adalah supaya rakyat setempat disiapkan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda.

Sementara raja Tanjumbulu mengadakan perundingan di Malei, Kerajaan Tojo mendapat kunjungan tamu dari Gorontalo utusan dari Nani Wartabone sebagai Pimpinan Gerakan Merah Putih atau Kepala Pemerintahan Nasional Gorontalo. Karena raja tidak ada di tempat, maka menantunya yang bernama Gunu Datupamusu diangkat menjadi pejabat kerajaan dan menerima utusan tersebut. Utusan dari Gorontalo itu datang ke Ampana pada tanggal 19 Pebruari 1942 dengan membawa pesan dari Pimpinan Gerakan Merah Putih Gorontalo, supaya raja bersama rakyat Ampana melakukan aksi merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Pesan itu diterima dengan baik oleh pejabat raja dan mengumumkan kepada rakyatnya tentang maksud itu.

Pada tanggal 21 Pebruari 1942 dikeluarkan pernyataan bahwa seluruh rakyat Ampana menyatakan diri telah bebas dari penjajahan Belanda. Kemudian disusul dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Bersamaan dengan itu diperintahkan agar semua kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah-rumah dan perahu-perahu mengibarkan bendera Merah Putih. Untuk menjaga kemungkinan serangan Belanda dari Poso, maka dibentuklah suatu komite pemberontak yang diketuai oleh RG Datupamusu dan dibantu oleh lima orang anggotanya. Komite tersebut bertugas mengatur pemerintahan, mengatur pertahanan dan mengadakan penyelidikan terhadap keadaan Belanda di Poso. Berdasarkan hasil penyelidikan kurir yang dikirim ke Poso, ternyata bahwa persiapan Belanda untuk menyerang Ampana cukup kuat. Dengan demikian,

pasukan Gerakan Merah Putih harus disatukan di Bongka untuk membendung kedatangan tentara Belanda dari Poso.

Pada tanggal 22 Februari 1942, tiba sebuah kapal di Ampana dengan membawa 9 (sembilan) orang militer Belanda lengkap dengan persenjataannya. Dengan kedatangan tentara Belanda itu, maka Gunu Datupamusu mempersiapkan seluruh rakyatnya untuk melawan tentara Belanda. Sementara R G Datupamusu mempersiapkan pasukannya di Bongka, pada tanggal 23 Februari 1942 rombongan raja Tanjumbulu tiba dan langsung di depan pasukan menyampaikan pesan agar rasa persatuan tetap dibina dalam menghadapi serangan Belanda. Tidak lama kemudian, pasukan Belanda yang dipimpin oleh kontroler Maslem dan Kapten Abenk tiba di Bongka.

Sebelum terjadi pertempuran, Belanda melancarkan politik liciknya sehingga sebahagian pasukan Gerakan Merah Putih berpihak kepadanya. Setelah pasukan Gerakan Merah Putih menjadi pecah. Belanda mulai melancarkan serangan dengan menggunakan sungai Bongka sebagai garis demarkasi. Dalam pertempuran itu, 30 orang pasukan Gerakan Merah Putih ditahan oleh Belanda, sehingga pasukan Kerajaan Tojo semakin kewalahan. Berhubung situasi semakin genting maka raja Tanjumbulu bersama pengawalnya mengundurkan diri ke kaki gunung, kemudian ke Tanjung Api, terus ke Pulao Togeana dan akhirnya ke Gorontalo. Dengan menyingkirnya raja Tanjumbulu ke Gorontalo maka Belanda mengadakan penangkapan dan pembunuhan terhadap pasukan Gerakan Merah Putih di Ampana. Selama Raja Tanjumbulu berada di Gorontalo, maka Raja Gunu Datupamusu yang lolos dari pengejaran Belanda yang tetap mengkoordinir dan mengatur Kerajaan Tojo, Bongka dan Ampana. Demikianlah situasi perlawanan masyarakat Kerajaan Tojo, dan Raja Tanjumbulu baru kembali ke kerajaannya setelah Jepang memasuki Ampana (Poso) pada bulan Juni 1942.

Demikianlah antara lain aksi perlawanan yang dilaksanakan oleh rakyat Donggala – Palu khususnya dan rakyat Sulawesi

Tengah pada umumnya. Latar belakang munculnya aksi perlawanan adalah tidak adanya kecocokan antara masyarakat dengan pemerintah kolonial Belanda. Ketidakcocokan itu bersumber dari: masalah perbedaan agama, kerja paksa dan pajak, tindakan kekerasan dan masalah kekuasaan. Dari sekian masalah itu menyatu dalam diri setiap orang yang membuatnya hilang kesabaran dan munculnya keberanian. Kesadaran dan keberanian semakin meningkat setelah adanya pengaruh organisasi-organisasi politik seperti SI, PNI, Parkindo dan organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Alkhairat, Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah agama Islam dan kegiatan-kegiatan politik. Keresahan yang sudah menumpuk akhirnya meledak dalam bentuk peperangan yang tidak lagi memperdulikan antara kakak dengan adik atau kerabat lainnya.

Dampak sosial yang timbul akibat peperangan adalah terjadinya perpecahan di kalangan golongan raja dan bangsawan. Mereka yang ikut membantu Belanda dalam peperangan dicap sebagai penghianat. Dan sebaliknya mereka yang memusuhi Belanda semakin ditindas dan bahkan banyak yang dibunuh. Keturunan-keturunan mereka tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Dampak lainnya adalah kehidupan ekonomi semakin parah sampai datangnya Bala Tentara Jepang mengambil alih kekuasaan.

C. Masalah Pendudukan Jepang ⁸⁾

Bertepatan pada tanggal 11 Januari 1942, Bala Tentara Jepang melakukan pendaratan pertama di wilayah Indonesia, dan pada waktu itu Manado sudah jatuh ke tangan Jepang. Dengan demikian di wilayah Sulawesi Tengah para penjajah Belanda memusatkan pasukannya di kedua tempat yakni Kota Palu dan Kota Poso. Kemudian pada bulan April 1942, pasukan Angkatan

8) Ibid, hal. 25-35.

Laut Jepang tiba di Donggala dengan kapal penjelajah bersama beberapa kapal pemburu torpedo. Sebelum pendaratan dimulai, Pelabuhan Donggala dihujani bom sehingga bangunan sepanjang pantai hancur rata dengan tanah. Setelah itu tentara Jepang mendarat dan langsung mencari pejabat-pejabat pemerintah Belanda, tetapi ternyata Asisten Residen Donggala De La Vuento dan Gezaghebber Palu Feliks bersama keluarganya telah menyingkir. Dengan demikian hanyalah raja-raja setempat yang ditemukan oleh tentara Jepang.

Setelah kota Donggala dikuasai oleh Jepang, mereka melanjutkan perjalanan dan mendarat di Palu bersama 30 orang angkatan laut. Di Kota Palu, Jepang menemukan tentara Belanda yang sudah menyerah dan langsung diadakan serah terima kekuasaan dari Belanda dan Jepang, sesudah serah terima kekuasaan dilakukan maka para bekas KNIL yang ditemukan, sebahagian dijadikan polisi Jepang (Jompo), sebahagian diizinkan hidup secara sipil sebagai tahanan kota dan sebahagian lainnya menjadi petani. Kecuali orang-orang Belanda/Indo Belanda, diangkut ke Manado untuk jadi tahanan.

Tidak lama setelah pendaratan pasukan *Kaigun* Jepang di Donggala dan Palu, *Kepala Polisi* Kaisar Suco dari Makassar tiba di Donggala yang bertindak mewakili Pemerintah Jepang menyerahkan urusan pemerintahan kepada raja-raja setempat. Situasi pemerintahan yang dikendalikan oleh para raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Setelah itu petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang dari Manado datang. Mulailah pengisian jabatan kepala pemerintahan yang ditinggalkan Belanda dengan menggunakan istilah bahasa Jepang. Jabatan asisten residen diganti dengan *ken kanriken*, dan jabatan kontroler serta *gezaghebber* diganti dengan *bunken kanriken*. Kesemua jabatan seperti itu dipegang oleh orang Jepang, sedangkan raja-raja setempat tetap diakui, hanya gelarnya diubah menjadi bahasa Jepang yaitu *suco*. Pada pemerintahan Jepang, petugas aparat pemerintahan orang Indonesia tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya seperti biasa.

Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1942, tentara Jepang yang dipimpin oleh Miyamoto mendarat di Toli-Toli dan mengambil alih kekuasaan dari tangan orang Belanda. Yang memegang kekuasaan kerajaan di Toli-Toli pada waktu pendaratan tentara Jepang adalah RM Pusadan, di mana kekuasaannya tetap diakui oleh orang Jepang. Pengambil alihan kekuasaan pemerintahan dari orang Belanda ke tangan orang Jepang di Toli-Toli berjalan dengan damai tanpa rintangan, seperti halnya dengan pengambil alihan kekuasaan pemerintahan di Donggala dan Palu.

Setelah wilayah dan pemerintahan Toli-Toli dikuasai oleh orang Jepang, maka tentara Jepang yang ada di Manado dan Palu mengarahkan perhatiannya ke Poso. Sebelum tentara orang Jepang mendarat di Poso, terlebih dahulu mengutus Ratumbanua dari Manado menyampaikan pesan agar pimpinan Belanda Van Dalen bersama anak buahnya menyerah dan semua perlengkapan persenjataan digudangkan. Perintah pimpinan Jepang pada mulanya dipatuhi oleh Van Dalen, akan tetapi setelah datang pimpinan Belanda dari tentara yang bernama De Jang bersama 200 orang pasukannya langsung menemui Van Dalen agar membatalkan penyerahannya. Kedua pimpinan Belanda ini bersama pasukannya bergabung dan masuk ke hutan bergerilya.

Dengan gagalnya misi Ratumbauna tersebut maka pada bulan Mei 1942, tentara Jepang dari *Kaigun* yang dipimpin oleh Nakagawa berangkat ke Poso. Keberangkatan tentara Jepang ke Poso adalah bermaksud untuk mengadakan serah terima kekuasaan pemerintahan dari Belanda. Akan tetapi karena pertahanan Belanda di Poso cukup kuat, maka pada bulan Juni 1942 didatangkan lagi 100 orang tentara Jepang dari Manado dengan menggunakan kapal motor Bitung II. Setibanya tentara bantuan Jepang, maka serangan pertama dilakukan terhadap kubu pertahanan Belanda di Kolonadale dengan kekuatan 16 truk tentara Jepang. Serangan tentara Jepang disebut oleh ten-

tara Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menyebabkan gugurnya pimpinan perang Jepang yang bernama Maeda. Dengan tewasnya Maeda membuat tentara Jepang semakin mengamuk dan berhasil menduduki kota Kolonadale pada tanggal 26 Juni 1942.

Pada tanggal 27 Juni 1942 semua rombongan pasukan Jepang berkumpul di kota Kolonadale dan langsung menduduki bekas tangsi militer Belanda serta menempati beberapa rumah penduduk. Pada waktu tentara Jepang menduduki Kota Kolonadale, semua tentara Belanda telah mengundurkan diri ke hutan-hutan, sehingga tentara Jepang membagi diri ke luar mencari pasukan Belanda yang sedang bergerilya di hutan-hutan. Dengan demikian segera terjadi pertempuran yang mengakibatkan banyak korban di antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran itu 7 (tujuh) orang perwira Jepang yang tewas bersama ratusan prajuritnya. Tempat terjadinya pertempuran itu (Korondoda) adalah merupakan daerah yang paling banyak memakan korban pasukan Jepang sehingga mereka melakukan pembakaran mayat secara besar-besaran.

Untuk memperingati peristiwa yang banyak menelan korban itu, dibuat 7 (tujuh) buah tugu peringatan untuk tujuh perwira Jepang yang tewas. Selama pemerintahan Jepang (1942-1945) setiap orang yang lewat di tempat itu diharuskan memberi hormat kepada tujuh tugu tersebut. Barang siapa orang yang lewat di tempat itu dan tidak memberi hormat maka ia dipanggil menghadap Jepang dan diberi hukuman. Setelah pertempuran di Korondoda, pasukan De Jong dan Van Dalen menjadi kocar-kacir dan akhirnya pada bulan Agustus 1942, kedua tokoh Belanda itu berhasil ditangkap oleh tentara Jepang. Setelah Jepang menduduki seluruh daerah yang pernah menjadi basis perjuangan Belanda, maka seluruh wilayah Sulawesi Tengah praktis dikuasai oleh Jepang. Dengan demikian berlakulah sistem administrasi pemerintahan Jepang berdasarkan Undang-Undang No. 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942. Su-

sunan pemerintahan tetap seperti semula, hanya istilah-istilah kepangkatan yang dirubah ke dalam istilah Jepang seperti raja menjadi *suco*, kepala distrik menjadi *gunco* dan kepala kampung menjadi *sonco*.

Karena Sulawesi Tengah merupakan wilayah dari residen Manado pada masa pemerintahan Belanda, maka beslit raja-raja diterbitkan oleh Jepang dari Manado dalam bahasa Jepang. Selain istilah kepangkatan yang diuraikan di atas, masih ada istilah kepangkatan yang dipergunakan oleh pejabat Jepang, yaitu *vunken kanrikan* (lebih tinggi dari pada *suco*) dan *ken kanrikan* (lebih tinggi daripada *bunken kanrikan*). Kota Donggala merupakan kedudukan Jepang yang berpangkat Ken Kanrikan, yang membawahi tiga tempat *bunken kanrikan* yaitu Donggala, Palu dan Parigi. Sedangkan *bunken kanrikan* Donggala membawahi dua daerah kerajaan yaitu Banawa dan Tawaeli. Kemudian *bunken kanrikan* Palu membawahi tiga daerah kerajaan yaitu Palu, Sigi, Dolo, dan Kulawi. Adapun *bunken kanrikan* Parigi membawahi dua daerah kerajaan yaitu Parigi dan Moutong.

Selama pendudukan Jepang di Kota Donggala dan Palu, peranan raja-raja hanya sekedar pembantu pemerintah Jepang. Para raja diperalat untuk mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja demi kepentingan penyediaan perbekalan perang. Rakyat dikerahkan tenaganya bekerja paksa selama 10 hari, kemudian digantikan oleh rombongan lain. Apabila ada yang bermalas-malas atau tidak mematuhi perintah mandor akan mendapat hukuman yang sangat menyiksa. Selain itu, mereka dikenakan pajak yang cukup tinggi yang tidak mampu dipikulnya. Barang siapa yang tidak melunasi pajak yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan hukuman. Dan bahkan yang lebih kejam lagi, semua hasil pertanian rakyat dirampas oleh tentara Jepang. Demikianlah pendudukan dan penjajahan Jepang berlangsung secara kejam selama kurang lebih tiga setengah tahun, dan berakhir setelah dikalahkan oleh tentara Sekutu bersama NICA.

D. Masa Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

1. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan⁹⁾

Saat-saat diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, tentara Sekutu mengarahkan perhatiannya ke Indonesia sehingga tentara Jepang mulai merasa terancam. Pada waktu itu, terjadi pertempuran di lautan Pasifik (1943) sehingga Sulawesi Utara dijadikan tempat pemusatan tentara Jepang, baik dari kelompok *kaigun* maupun kelompok *rikigun*. Semua tentara Jepang yang ada di pusat-pusat kerajaan di Sulawesi Tengah dan Utara ditarik dari pangkalan masing-masing untuk berkumpul di Manado sebagai persiapan menghadapi tentara sekutu NICA.

Setahun kemudian yakni dalam bulan September 1944, Pulau Morotai direbut dan dijadikan sebagai salah satu pangkalan tentara Sekutu. Dari pangkalan ini tentara sekutu melancarkan pemboman ke arah pusat-pusat pertahanan tentara Jepang seperti Sulawesi Utara dan Tengah. Selain serangan bom yang dilancarkan, juga dilancarkan serangan melalui laut dengan cara menyebarkan mata-mata ke berbagai pusat kerajaan di Sulawesi Tengah dan Utara. Pengiriman mata-mata itu melalui kapal selama dengan bertujuan untuk menyelidiki posisi dan kekuatan tentara Jepang yang masih bertahan di tempat-tempat tersebut.

Pada tanggal 6 September 1944, Pelabuhan Bitung dihancurkan oleh bom-bom tentara sekutu. Selanjutnya tanggal 7 September 1944 kota Manado mendapat giliran. Kemudian tanggal 8 September 1944, kota Langoan dihancurkan. Dengan hancurnya kota Manado maka pusat pemerintahan militer dan sipil Jepang diindahkan ke kota Tondano yang dipimpin oleh Laksamana Hamanaka dengan Kepala stafnya Takasaki. Berhubung semakin terdesaknya tentara Jepang oleh serangan tentara sekutu maka Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia

9) Ibid, hal. 59-65.

dengan cara menjanjikan kemerdekaan. Dengan janji itu maka disiapkanlah di Tondado suatu Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia, yang anggota-anggotanya terdiri atas: EHW Palengkahu (ketua), Dr. RCL Senduk, D.A. Th. Gerungan, H.D. Manopo, ERD Warow dan lain-lain.

Sejalan dengan pembentukan badan tersebut di atas, maka pada tanggal 1 April 1944, *bunken kanriken* membuka sekolah (kursus) kader pemerintahan di Tondano. Pada saat pembukaan kursus tersebut, bendera Merah Putih dikibarkan bersama dengan bendera *hinomaru*. Mereka yang ikut kursus adalah para pemuda, pejabat dari semua instansi yang dipersiapkan untuk melanjutkan pemerintahan kelak. Adapun nama-nama peserta kursus yang diutus dari Sulawesi Tengah adalah: AB Djanggola dari Palu, Lalanto Mene Lamakarate dari Biromaru, Bede Djeloi dari Kulawi dan Wangko Lembah Talasa dari Poso. Kursus kader pemerintahan yang dilaksanakan oleh Jepang itu, sangat penting artinya bagi pejuang-pejuang Indonesia dalam menyambut kemerdekaan yang sudah diambang pintu.

Beberapa bulan kemudian pada tanggal 23 Oktober 1944 menjelang kapitulasi Jepang, tokoh-tokoh pejuang gerakan Merah Putih tahun 1942 dari Luwuk ditawan di Manado yakni Y.S. Monoarfa bersama dengan teman-temannya. Kemudian setelah mereka dibebaskan dari tahanan dan ingin kembali ke Luwuk, mereka diberi mandat untuk menyampaikan kepada masyarakat Gorontalo, Poso dan Luwuk tentang janji "Kemerdekaan Indonesia". Sementara dalam perjalanan dari Manado menuju Luwuk, mereka menerima selebaran dari pesawat sekutu yang berisi pemberitahuan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan sekutu akan datang menggantikannya. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu sangat cepat tersebar di Sulawesi Tengah karena pesawat-pesawat sekutu menyebarkan selebaran dari udara. Di Palu dan Donggala, selebaran-selebaran itu berbunyi agar penduduk menjauhi tempat-tem-

pat militer Jepang, supaya rakyat jangan lagi membantu Jepang dan tak lama lagi sekutu akan datang.¹⁰⁾

Pada tanggal 15 Agustus 1945, di atas Kota Poso pesawat sekutu menyebarkan pamflet yang berwarna kuning berisikan pemberitahuan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Tetapi isi selebaran itu disangkal dan dilarang beredar oleh Jepang, namun Abdul Latief Mangitung berhasil memperoleh selembar pamflet tersebut sehingga pada tanggal 16 Agustus ia berangkat ke Poso untuk mencek kebenaran isi pamflet itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, kira-kira pukul 15.00 sore, Abdul Latief Manghitung mendapat berita dari seorang Jepang mengatakan bahwa "bangsa Indonesia sudah merdeka". Mula-mula berita itu tidak terlalu dipercaya karena dianggap pancingan tentara Jepang. Namun berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia semakin jelas dan pasti setelah mendapat informasi dari orang Jepang lainnya mengatakan bahwa berita itu didengar melalui siaran radio Jepang. Dengan demikian semakin menyebarlah berita tentang proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah dan disambut baik terutama bagi anggota Gerakan Merah Putih 1942 yang dibekukan oleh Jepang selama pemerintahannya.

2. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 diumumkan oleh Soekarno – Hatta pada pagi harinya di Jakarta maka pada malam harinya Abdul Latief Mangitung bersama-sama anggota Gerakan Merah Putih mengadakan pertemuan dan menghasilkan terbentuknya Organisasi Laskar Tanjumbulu. Susunan personalia Organisasi Laskar itu adalah:

- a. Abdul Latief Mangitung sebagai komandan;
- b. Yap Saci Ciong sebagai wakil,
- c. A.L. Pangemanan sebagai kepala staf;
- d. R. Mangolo sebagai wakil kepala staf;

10) Menurut Haras Siregar, pada waktu itu Jepang telah mempersiapkan lubang-lubang panjang untuk menguburkan tokoh-tokoh masyarakat dan raja-raja yang direncanakan untuk dibunuh secara massal melalui pemancungan. Namun rencana itu belum dilaksanakan, lalu sekutu datang.

- e. To Sayang sebagai kepala bagian perlengkapan;
- f. Saleh Topetau sebagai pasukan tempur,
- g. Jafar, bagian persenjataan;
- h. Lapasendrang, bagian kesejahteraan;
- i. Lanokang, sebagai penghubung.

Sehari setelah pembentukan Organisasi Laskar tersebut yakni tanggal 18 Agustus 1945, Topetau bersama Jafat datang melapor kepada Komandan bahwa mereka telah berhasil mengambil beberapa pucuk senjata dari tentara Jepang. Tujuan pembentukan Organisasi Laskar ini adalah untuk menghadapi kedatangan sekutu dan NICA yang akan menjajah kembali Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945 Abdul Latief Mangitung mengadakan perjalanan ke luar daerah Poso untuk menyebarkan berita Proklamasi tersebut. Daerah-daerah yang dikunjungi adalah:

- 1) Kampung Malei sebagai Pusat Markas Induk untuk menyampaikan kepada Muhammad Amin Dahlan agar mengkoordinasi semua pasukan
- 2) Ampana sebagai Pusat Gerakan Merah Putih 1942 untuk menghubungi RG Datupamusu dan Abu Saleh.
- 3) Kecamatan Bunta untuk menghubungi Haji Sanusi Mangonco dengan kawan-kawan.
- 4) Kecamatan Pagimana – Luwuk untuk menghubungi AR Lanasir dan Laicu Lanasir.

Sementara Gerakan Merah Putih membangkitkan kembali anggota-anggotanya dan membentuk Organisasi Laskar untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru-baru diproklamkan, maka pada tanggal 21 Agustus 1945 Jepang melakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada raja-raja. Penyerahan kekuasaan pemerintahan itu dilakukan berturut-turut kepada raja-raja setempat. Untuk wilayah Poso diserahkan kepada Raja Muda WL Talasa, untuk wilayah Palu – Donggala diserahkan kepada Raja Banawa Rohana Lamarauna, dan untuk wilayah Luwuk diserahkan kepada S. Amiruddin Amir. Sesudah penye-

rahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang ke tangan raja-raja maka pemerintahan diambil alih sepenuhnya kembali oleh raja-raja setempat. Sedangkan orang-orang Jepang satu persatu hilang meninggalkan wilayah Sulawesi Tengah karena sudah menyerah kepada sekutu sejak tanggal 15 Agustus 1945.

Menurut catatan harian dari RG Datupamusu, tidak lama sesudah berita Proklamasi didengar di Poso, maka pada tanggal 25 Agustus 1945 tibalah di Poso AN Hajarati dan Hamzah Ilahude sebagai utusan Gubernur Sulawesi Dr. G S S J Ratu-
langi dari Makassar. Kedatangan kedua utusan itu adalah bertujuan untuk membentuk pemerintahan nasional di Poso dan memberi penerangan tentang Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu kedatangan AN Hajarati dan Hamzah Ilahude, bendera Merah Putih dikibarkan di atas tiang dan diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah selesai upacara bendera, diadakanlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk pimpinan Partai Politik. Pada pertemuan itu (dihadiri ± 40 orang) diberikan penjelasan tentang Proklamasi Kemerdekaan dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan tersebut. Pada pertemuan itu dibentuk pula Dewan Pemerintahan Nasional yang dikepalai oleh Wangko Lembah Talasa dan dibentuk pula Dewan Pertahanan Nasional dengan pimpinan Ibrahim Muhammad. Selain itu, R.G. Datupamusu diutus ke Palu untuk membawa 9 (sembilan) dokumen/surat propaganda Merah Putih masing-masing untuk: Raja Tagunu di Parigi, Raja Lamakampali di Tawaeli, Raja Janggola di Palu, Raja Rohana Lamarauna di Banawa, Raja Lamasaera di Borimaru, Raja Djiloi di Kulawi, Raja Kutu Tombolotutu di Moutong, Tjatjo Djarah Kepala Pemerintahan di Palu, dan Kepala Polisi di Palu.

Setelah terdengarnya berita bahwa Indonesia sudah merdeka dan dikibarkannya bendera Merah Putih dipusat-pusat kerajaan yang dipelopori oleh anggota Gerakan Merah Putih, maka

pada umumnya rakyat menyambutnya dengan gembira. Mulai saat itu anggota-anggota Gerakan Merah Putih aktif kembali menyusun strategi perjuangan untuk menantang sekutu bersama tentara NICA yang akan menjajah kembali. Akan tetapi pasukan Gerakan Merah Putih tidak dapat berbuat banyak karena selain belum memiliki persenjataan yang lengkap, juga bekas-bekas KNIL yang telah mengambil alih masalah keamanan menyambut baik kedatangan tentara sekutu/NICA. Malahan sebelum sekutu datang, di pasae Palu terjadi penangkapan massal terutama warga masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan karena kedapatan menyimpan lencana Merah Putih. Pada waktu itu rakyat mulai terpecah dua, ada yang tetap pro kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ada pula yang kontra. Golongan masyarakat yang tetap pro adalah para anggota partai politik dan anggota Gerakan Merah Putih. Sedangkan yang kontra adalah para bekas KNIL, raja-raja dan rakyat pengikut raja yang telah terpengaruh bujukan dari kurir sekutu dan tentara NICA.

Pada akhir tahun 1945, mendaratlah pasukan NICA di Parigi dan Palu bersama seorang pejabat Belanda L. Barow bekas kontroler di Parigi sebelum Jepang datang. Walaupun sebelum kedatangan pasukan NICA di Palu telah datang RG Datupamusu dari Poso membawa surat kepada raja-raja Parigi, Palu dan Donggala supaya tetap berjuang mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak kedatangan Belanda. Akan tetapi raja-raja setempat sudah berobah pendirian dan dengan senang hati mau menerima kedatangan Belanda kembali tanpa menyadari bahwa kedatangan kedua kalinya itu akan menjajah kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya.

Akibatnya pada tanggal 31 Januari 1946, Belanda/NICA mengadakan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Republikan seperti: HM Yoto Daeng Pawindu (Ketua Gerakan Merah Putih Sigi — Dolo); H. Lasangka, Lakacinta dan Daeng Pawara L.

(Pimpinan Merah Putih Dolo), Thayeb Lacinala (Pimpinan Merah Putih Bora); M. Dj. Abdullah (Staf Pimpinan Merah Putih Sigi – Dolo dari Kaleke); Waluntina (Pimpinan Merah Putih di Palu) dan Said Ali Sahibu (Pimpinan Merah Putih Tawaeli). Demikian pula tokoh-tokoh pejuang dari Donggala mengalami hal yang sama seperti: Alexander Monoarfa, Alwi Muhammad, Mohammad Amu, Umar Papeo, Andi Baro serta Abdul Gani. Tokoh-tokoh Republikan yang ditangkap itu karena mereka pernah mengadakan rapat di Sidera (\pm 8 km dari Palu) untuk melakukan perlawanan terhadap tentara NICA. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan Markas Polisi NICA dan mengalami penyiksaan yang cukup keras dan penghinaan dari kaki tangan Belanda.

Selain itu, pada bulan Mei 1947 terjadi pula penangkapan tokoh-tokoh Republikan di Luwuk seperti: Kairupan, Joseph Siwj, Abdul Azis Larekeng, Abdul Muis Larekeng, Taher Litepo, Atjo Matarang dan lain-lain. Tokoh-tokoh Republikan yang ditangkap di Luwuk karena mereka adalah bekas Jumbo yang pro kepada perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Merekapun mengalami siksaan dan penghinaan sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam tahanan seperti halnya dengan tahanan dari Palu dan Donggala. Setelah mengalami penyiksaan dan penghinaan yang cukup menyakitkan, maka mereka mengalami pemeriksaan di daerah masing-masing. Bagi mereka yang tidak terlalu berat kesalahannya dapat dibebaskan kembali. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai kesalahan agak berat, diberangkatkan ke Manado diadili oleh Pengadilan Militer Belanda. Sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Belanda di Manado, maka ada yang dijatuhi hukuman sampai 12 tahun penjara, ada yang dikenakan 10 tahun, 8 tahun dan yang paling rendah 2 tahun penjara.

Demikianlah keganasan tentara NICA di Sulawesi Tengah berlangsung beberapa tahun, kemudian membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), di mana raja-raja diangkat menjadi kepala pemerintahan swapraja yang hanya dapat menjalankan tugas se-

suai dengan kehendak pemerintah NIT. Sementara itu perjuangan melalui kelaskaran tetap digalakkan oleh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dan berusaha membina masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan. Gelora pergerakan perjuangan kemerdekaan mulai muncul dan semakin meningkat setelah terbentuknya suatu organisasi persatuan pegawai Indonesia (PERPI) pada tanggal 6 Juni 1949 di Palu. Kemudian pada bulan Juli 1949 dibentuk lagi satu wadah yang menghimpun organisasi-organisasi yang ada bernama Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (IPPRI) yang berpusat di Palu.

Sementara IPPRI melakukan kegiatan-kegiatan menggalang persatuan di kalangan anggota-anggotanya, pemerintah NIT membentuk Dewan Perwakilan Rakyat di Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sulawesi Tengah. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, maka terdapatlah satu wadah yang akan bekerjasama dengan partai politik dan organisasi lainnya untuk memperjuangkan agar membubarkan NIT untuk kembali bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil pemilihan anggota-anggota DPRD tahun 1949 dilantik di kota Poso pada tanggal 30 Agustus 1949. DPRD Sulawesi Tengah inilah yang memindahkan kekuasaan dari asisten residen Belanda kepada kepala daerah Sulawesi Tengah di Poso. Pada waktu itu sudah terbentuk Dewan Raja-Raja di Poso yang dikepalai oleh RM Poesadan. Berdasarkan Keputusan DPRD Sulawesi Tengah maka Ketua Dewan Raja-Raja RM Poesadan diangkat sebagai kepala daerah Sulawesi Tengah.

Sesudah diadakan Konprensi Meja Bundar (KMB), maka pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Peristiwa penyerahan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 disambut baik oleh masyarakat Sulawesi Tengah dengan ucapan resmi menaikkan bendera Merah Putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Dengan selesai-

nya penyerahan kembali kedaulatan pemerintahan Indonesia, maka pada tahun 1950 pembebasan tahanan-tahanan, baik tahanan politik maupun tahanan militer mulai dilaksanakan secara bertahap. Para tahanan yang sudah dibebaskan termasuk tahanan dari Palu – Donggala bergabung kembali dan membentuk organisasi Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (IPPRI) di Palu. Organisasi IPPRI ini bekerjasama dengan DPRD, Partai Politik, Organisasi Pemuda dan Massa yang ada di Palu – Donggala berjuang untuk mempercepat bubarnya NIT dan terbentuknya Negara Republik Indonesia.

Setelah mengadakan pertemuan antara eksponen pejuang dan konsultasi dengan raja, maka dibuatlah pernyataan bersama pada tanggal 2 April 1950 untuk dikirim kepada wakil Sulawesi Tengah dalam Parlemen NIT di Makassar yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Imade Geria/Rinol DPR empreshotel Makassar kami partai-partai pergerakan Sulawesi Tengah di Palu koma Tawaeli koma Wani koma Donggala koma dan Sigi-Dolo terdiri dari 29 Partai koma memutuskan setuju dan menyokong adanya gerakan pembubaran NIT dengan segera dan terbentuknya Kesatuan RI titik habis "IPPRI".

Palu, 3 April 1950
ttd. Rambeng-Abdullah ¹¹⁾

Sebagai kelanjutan perjuangan maka pada tanggal 30 April 1950, I Made Geria dan M. Dj. Abdullah mengadakan rapat di rumah kediaman Tjatjo Ijazah (kepala pemerintahan kewedanaan Palu). Rapat itu dihadiri oleh: pimpinan partai dan organisasi massa, pemerintahan dan kepolisian; anggota parlemen NIT wakil Sulawesi Tengah; anggota DPRD dan wakil Organisasi Wanita (isteri Sedar). Rapat memutuskan mendukung dan mempertahankan maksud kawat yang telah dikirim pada tanggal 3

11) M. Dj. Abdullah, *op-cit*, hal. 52.

April 1950 kepada anggota parlemen NIT di Makassar. Selain itu juga diputuskan bahwa P A Raming ditugaskan menemui raja-raja di Donggala, Tawaeli, Sigi-Dolo, Kulawi dan Parigi untuk meminta dukungan dan ikut bertanggung jawab atas isi kata tersebut. Pada waktu itu terjadi pengambil alihan secara damai masalah keamanan dari tangan polisi ke tangan PKR (Penjaga Keamanan Rakyat).

Setelah P A Raming kembali dari tugasnya dan membawa pernyataan dukungan raja-raja, maka pada tanggal 6 Mei 1950 diadakan Rapat Akbar di lapangan Nasional Palu yang dihadiri oleh massa rakyat, pemuda, guru-guru, Dinas dan Instansi, Pimpinan Partai Politik dari Palu, Biromaru, Dolo dan sekitarnya. Dalam rapat raksasa itu, tampil Tjatjo Ijazah berbicara menyampaikan sebuah maklumat sebagai berikut:^{1 2})

MAKLUMAT

Pucuk Pimpinan Badan Keamanan Rakyat (B K R)

1. Mulai 6 Mei 1950 jam 7.00 pagi, Kerajaan Palu, Sigi-Dolo dan Kulawi beserta seluruh rakyatnya memproklamkan "telah melepaskan diri dari Negara Indonesia Timur" dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.
2. Segala urusan pemerintahan harus melalui pucuk pimpinan BKR.
3. Segala urusan umum tetap berjalan seperti biasa seperti urusan pemerintahan, sekolah-sekolah, toko-toko harus dibuka, kegiatan pasar harus berjalan seperti biasa.
4. Kalau masuk atau keluar anderofdeling Palu harus seizin dengan BKR.
5. Jam malam diberlakukan mulai jam enam petang sampai jam lima pagi.

12) Ibid, hal. 53-54.

6. Keamanan dijaga oleh polisi Republik Indonesia dan Badan Penjaga Keamanan Rakyat.
7. Pemeriksaan rumah-rumah dan bangunan-bangunan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memegang izin dari Ketua BKR.
8. Segala senjata api termasuk senapan angin berkaliber 5½ harus diserahkan dalam tempo tiga hari sampai 9 Mei 1950 pukul 12.00 tengah hari. Yang boleh memegang senjata api hanya Polisi Republik Indonesia dan APRI.
9. Diserukan kepada umum agar dapat membantu keamanan.
10. Jam malam tidak berlaku bagi mereka yang memegang surat izin istimewa dari pucuk pimpinan BKR.
11. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hal ini akan dilakukan tindakan keras.
12. Selesai.

Penjaga Keamanan
 Bagian Polisi: ttd. Lumowa
 Bagian BKR : ttd. Soengkowo.

Palu, 6 Mei 1950
 Pucuk Pimpinan BKR
 ttd. Tjatjo Ijazah.

Maklumat ini dikirim kepada :

1. Pemerintah Pusat Nit di Makassar.
2. Pemerintah Sulawesi Tengah di Poso dan persuratkabaran di Palu serta ditempel dalam ruangan terbuka untuk disebar luaskan pada masyarakat.

Setelah pernyataan dicetuskan maklumat tersebut, maka pucuk pimpinan pemerintahan darurat daerah Republik Indonesia memerintahkan bahwa pejabat pemerintahan dan pimpinan SMP yang berkebangsaan Belanda supaya tetap tenang di rumah masing-masing dalam penjagaan BKR sampai saatnya mereka diberangkatkan ke Poso dikumpulkan bersama dengan orang-orang Belanda lainnya. Demikian pula di daerah-daerah lain seperti Toli-Toli, Luwuk, Banggai dan Poso terjadi aksi perlucutan senjata dari tangan Polisi NIT dan mengambil alihan kekuasaan dari tangan pejabat Belanda.

Dengan adanya aksi-aksi dan gerakan-gerakan massa di Sulawesi Tengah serta daerah-daerah lain di wilayah NIT yang menginginkan dibubarkannya NIT dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka anggota parlemen NIT merasa perlu mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta. Pada tanggal 12 Mei 1950 berangkatlah Ir. Putuhena (perdana menteri) dan Henk Rondonuwu (menteri penerangan) ke Jakarta untuk mengadakan perundingan.

Pada tanggal 19 Mei 1950, tercapailah persetujuan antara Pemerintah RIS dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk dan melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan demikian pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai ke Merauke. Dan berdirilah kembali Propinsi Sulawesi di mana Sulawesi Tengah sebagai salah satu wilayahnya. Untuk mengendalikan pemerintahan di Sulawesi Tengah diangkatlah BW Lopian sebagai acting gubernur yang menjalankan tugas dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 1 Juli 1951.^{1 3)}

Demikianlah situasi di Sulawesi Tengah pada umumnya dan Palu – Donggala khususnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai tahun 1951. Sesudah itu rakyat bersama pemerintah mulai kembali menata pemerintahannya dan membangun daerahnya yang telah mengalami kerusakan akibat perang. Kemudian perjuangan rakyat Sulawesi Tengah beralih kepada penuntutan status Kabupaten Sulawesi Tengah menjadi Propinsi Sulawesi Tengah. Dan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah tersebut baru berhasil pada tanggal 13 April 1964, yang dijadikan sebagai hari ulang tahun Propinsi Sulawesi Tengah.

13) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, op-cit, hal. 137-138.

BAB V PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI

A. Sistem Sosial

1. Perkembangan Pola Pemukiman

Seperti yang diuraikan pada Bab III di atas bahwa pada zaman kerajaan, pola pemukiman di Donggala dan Palu pada umumnya bersifat menyebar. Namun setelah Hindia Belanda datang, pola pemukiman yang menyebar berubah menjadi pemukiman pada. Mereka yang pada mulanya membangun rumahnya disepanjang pesisir sungai atau sekitar kebun-kebun, telah dipindahkan mendekati pusat kerajaan atau dipinggir jalan-jalan raya yang telah dibuat Belanda. Pemindahan mereka itu atas perintah Belanda melalui para raja. Hal itu dilakukan oleh Belanda agar dapat lebih mudah menguasai dan mengawasi rakyat yang sangat dibutuhkan tenaganya dalam usaha pembuatan jalan-jalan raya dan penagihan pajak. Pada waktu itu, Belanda membangun rumah sebagai pangkalannya (Pos) di tempat ketinggian, yakni di Gunung Bale (pada Kota Donggala) dan di Lolu (pada Kota Palu). Dengan demikian pengawasan dapat lebih mudah dilakukan, baik terhadap rakyat maupun terhadap serangan musuh. ¹⁾

1) Wawancara dengan Bapak H. Djafar Lapasere (Pensiunan Peg. Pamongpraja dan anggota DPRD Tkt. I), tanggal 10 Agustus 1983 di Palu.

Kedatangan Hindia Belanda dan suku-suku bangsa asing lainnya di Donggala dan Palu, membawa pengaruh terhadap perubahan nilai mengenai pola pemukiman penduduk setempat, baik dari segi menentukan arah maupun dalam bentuk rumah. Dari segi menentukan kearah mana rumah itu menghadap, pada mulanya masyarakat lebih suka memilih menghadap ke Barat atau ke timur. Dan lagi pula lebih suka memilih lokasi pemukiman di dekat sungai (binangga). Namun setelah datang pengaruh Belanda, maka masyarakat sudah dapat membangun rumahnya tanpa memilih arah dan lokasi jauh dari sungai. Walaupun pada mulanya perubahan dalam hal ini dipaksa oleh situasi dan keadaan, apalagi menyangkut masalah nilai-nilai tradisional. Akan tetapi karena dipaksakan, akhirnya secara beransur-ansur terjadilah pergeseran nilai tersebut.

Mengenai bentuk rumah umpamanya, pada mulanya penduduk Kota Donggala dan Palu memilih rumah panggung seperti bentuk rumah orang Bugis-Makasar. Setelah Hindia Belanda dan orang-orang Cina datang, maka bentuk rumah batu (rumah beton) sudah mulai dikenal dikalangan penduduk. Kemudian secara perlahan-lahan masyarakat meniru bentuk rumah beton tersebut dan mengganti rumah panggung yang dimilikinya. Sampai pada zaman kemerdekaan (tahun 1950an) penduduk Kota Donggala dan Palu sudah banyak yang memiliki rumah beton (rumah batu). Teknik pembuatan rumah batu tersebut tidak mempergunakan batu bata (batu merah). Tehnik pembuatan rumah batu tersebut idak mempergunakan batu bata (batu merah) seperti tehnik pembuatan rumah batu ditempat-tempat lain. Melainkan hanya menggunakan campuran batu kerikil, pasir dan semen (campuran beton).²⁾

Terjadinya pergeseran nilai tentang bentuk rumah dan tehnik pembuatannya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,

2) Wawancara dengan Bapak H.M. Yondi Maranua (Pensiunan Pegawai Negeri), tanggal 2 Oktober 1983 di Tawaeli.

karena wilayah Kota Donggala dan Palu memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga tidak akan terjadi banjir. Dengan demikian rumah batu lebih cocok digunakan. Kedua, karena wilayah Donggala dan Palu termasuk daerah waspada terhadap gempa. Ketiga, karena di wilayah Donggala dan Palu cukup banyak tersedia batu kerikil dan pasir sebagai bahan bangunan yang tidak perlu dibeli. Dan keempat, karena pada waktu itu belum ada batu bata (batu merah) yang dijual di Kota Donggala dan Palu.

Dari tahun ke tahun bentuk rumah panggung semakin berkurang dan digantikan oleh rumah batu. Sampai sekarang tidak banyak lagi penduduk kota yang memiliki rumah panggung tradisional seperti itu. Yang tetap bertahan mempertahankan dan memelihara bentuk rumah panggung adalah penduduk yang bermukim di sekitar bekas kerajaan, termasuk rumah ada (sao raja) atau bekas rumah raja yang sudah dipugar.

Mengenai pola pemukiman yang mengelompok menurut etnis nampak adanya perubahan. Pada awal kedatangan Hindia Belanda di Donggala, terdapat pemukiman suku bangsa Bugis di pusat Kota Donggala. Kelompok pemukiman orang Bugis itu terdapat pada Desa Boya yang dipimpin oleh seorang Bangsa-wan Bugis yang bernama Pettalolo. Demikian pula Etnis Cina mengelompok pada sekitar Pasar Donggala, sedangkan penduduk asli mengelompok pada pinggiran kota. Namun beberapa tahun kemudian (\pm tahun 1950-an) setelah terjadi kawin mawin antara kelompok Etnis, maka secara berangsur-angsur kelompok pemukiman etnis berubah menjadi pemukiman yang heterogen.

Demikian pula halnya pola pemukiman di Kota Palu, terjadi pengelompokan pemukiman menurut etnis. Di Kampung Lere umpamanya terdapat pemukiman kelompok etnis Kaili, yaitu pusat Kerajaan Palu. Di kampung Baru terdapat kelompok pemukiman etnis Bugis dan Minangkabau sebagai penziar agama Islam. Di Kampung Kamonji terdapat kelompok pemukiman etnis Arab sebagai penziar agama Islam melalui pendidik-

an Alkhairat. Di Kampung Ujuna terdapat kelompok pemukiman etnis Cina yang menguasai perdagangan dan membuka toko-toko. Demikian pula di Palu Timur terdapat pengelompokan pemukiman. Di Kampung Maesa umpamanya terdapat kelompok pemukiman etnis Minahasa, di Kampung Besusu terdapat kelompok pemukiman etnis Kaili (penduduk asli) dan sebagainya. Namun karena perkembangan kota semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya arus migrasi, maka terjadilah asimilasi antar etnis, terutama dalam hak perkawinan. Akhirnya kelompok pemukiman menurut Etnis berubah menjadi pemukiman yang bersifat heterogen.

Dapat ditambahkan bahwa daerah Sulawesi Tengah umpamanya dan Kota Palu khususnya merupakan daerah pertemuan berbagai macam kelompok etnis, sehingga terjadi percampuran unsur-unsur kebudayaan antar kelompok etnis. Pada zaman Hindia Belanda, ada dua unsur budaya yang sangat besar pengaruhnya; yakni pengaruh budaya Bugis dan budaya Minahasa/Manado. Pengaruh kebudayaan Bugis sangat nampak pada bentuk rumah penduduk asli, baik mengenai proses pembuatannya maupun mengenai bentuknya. Begitu pula mengenai bahasa, anak-anak penduduk asli dalam mempelajari Al Quran menggunakan bahasa Bugis (huruf lontara). Atau dalam pemberian nama seperti : Andi, Daeng, Petta dan sebagainya. Begitu pula dalam upacara-upacara peralihan tingkatan umur setiap orang (*life cycle*) banyak persamaan dengan orang-orang Bugis.

Adapun kebudayaan Minahasa/Manado banyak memberi pengaruh kepada logat bahasa, baik dalam penggunaan bahasa daerah maupun dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Seperti umpamanya dalam penggunaan kata-kata pergi-jo, biar-jo, sudah-jo dan sebagainya. Demikian pula dalam kehidupan muda-mudi banyak dipengaruhi oleh budaya Minahasa/Manado. Pengaruh kedua kebudayaan tersebut tidak bersamaan datangnya. Pengaruh kebudayaan Bugis lebih dahulu dan diperkirakan sudah ada sejak jaman kerajaan ketika kerajaan Bone mengada-

kan hubungan dengan kerajaan Banawa (Donggala) kira-kira pada abad ke-16. Sedangkan pengaruh kebudayaan Minahasa (Manado) baru mulai menanjak pada jaman kolonial, yaitu ketika orang-orang Minahasa (Manado) datang bersama-sama Belanda (diambil menjadi pegawai Pamongpraja). Pada waktu itu, pada umumnya orang-orang Minahasa (Manado) menjadi pegawai baik guru maupun sebagai pegawai kantor pemerintahan kolonial.

2. Perubahan Pandangan tentang Pelapisan Sosial

Seperti yang dikemukakan pada sub bagian bab III di atas bahwa pelapisan sosial yang paling menonjol di kalangan masyarakat Kota Donggala dan Palu pada zaman sebelum kedatangan Hindia Belanda adalah berdasarkan pada keanggotaan kaum kerabat kepala masyarakat. Yang dianggap paling tinggi derajatnya adalah pemimpin masyarakat. Dengan demikian, golongan raja (magau) yang menduduki tahta kepemimpinan masyarakat yang dianggap paling tinggi status sosialnya dalam pandangan masyarakat. Penilaian anggota masyarakat tentang tingginya status raja (magau) tersebut bukan semata-mata disebabkan karena raja-raja menempati posisi tertinggi (pimpinan) dalam masyarakat. Akan tetapi juga karena dianggap sebagai penjelmaan dari dewa-dewa yang mempunyai kesaktian dan kekuatan gaib. Sifat kesaktian dan gaib yang dimilikinya sehingga dianggap pula sebagai tempat tergantungnya nasib manusia golongan biasa dan hamba. Dengan pandangan yang demikian, maka warga masyarakat memberikan penghormatan yang luar biasa dan mematuhi segala perintahnya. Apa saja yang dikatakan atau diinginkan oleh raja, harus dipatuhi oleh warga masyarakat; sekaligus anak gadisnya yang diminta oleh raja untuk dijadikan permaisuri.

Kharisma raja-raja seperti sangat menonjol pada zaman kerajaan dan bahkan masih nampak pada zaman Belanda. Dengan demikian pemerintah tahu bahwa untuk menguasai rakyat

lagi pengklasifikasian antara golongan bangsawan dengan masyarakat biasa. Hal itu mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena orang-orang yang dapat menduduki pimpinan masyarakat tidak lagi berdasarkan dengan keturunan. Akan tetapi berdasarkan dengan pendidikan. Siapa saja yang berpendidikan dan mampu memimpin, maka dialah yang menduduki tahta yang tersedia. Kedua, karena golongan Bangsawan sudah banyak kawin-mawin dengan golongan masyarakat biasa (to dea). Ketiga, karena sifat-sifat kebangsawanan yang dimiliki oleh turunan bangsawan semakin luntur. Sering ada anak-anak bangsawan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela oleh masyarakat.

Lain halnya dengan pelapisan sosial yang ketiga, yaitu golongan masyarakat biasa (to dea). Karena sistem nilai dalam masyarakat berubah (terutama dalam hal aristokrasi), maka golongan masyarakat biasa yang memiliki kemampuan dan pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kelapisan sosial yang ke tiga. Karena ilmu pengetahuan dan titel yang dimilikinya, maka golongan masyarakat biasa dapat menggantikan kedudukan para bangsawan dan raja-raja dalam pemerintahan. Sedangkan golongan keturunan hamba (watua) hanya dikenal pada zaman kerajaan, dan setelah kedatangan Hindia Belanda sistem perbudakan dilarang. Dengan demikian secara berangsur-angsur golongan keturunan hamba hilang dalam stratifikasi sosial di Donggala dan Palu. Mereka secara berangsur-angsur melebur masuk ke dalam golongan masyarakat biasa (to dea) melalui proses kawin-mawin.

Berdasarkan dengan uraian di atas tentang perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat Kota Donggala dan Palu, maka dapat disimpulkan bahwa pada zaman kerajaan dikenal adanya 4 (empat) macam pelapisan sosial berdasarkan keturunan. Ke empat lapisan itu dikenal dan ditaati secara hebat oleh warga masyarakat, baik dalam pengertian konsep maupun dalam realitasnya. Hal itu disebabkan karena sistem nilai yang berlaku

maka pimpinannya (rajanya) perlu dirangkul dan tetap diakui sebagai raja. Dengan diakuinya raja-raja tetap menduduki jabatannya dan diberi tugas sebagai pembantu Pemerintah Belanda, maka raja merasa bangga dalam kedudukannya. Namun setelah Belanda berhasil menanamkan kekuasaannya dan menguasai bidang-bidang pemerintahan, bidang-bidang ekonomi, bidang-bidang pendidikan dan sebagainya; mulailah kewenangan dan kekuasaan raja-raja secara berangsur-angsur dikurangi. Sejalan dengan semakin berkurangnya kewenangan dan kekuasaan raja, dengan semakin tidak mempunya membela rakyat, maka kepercayaan rakyat mulai berkurang pula. Pandangan rakyat terhadap status sosial golongan raja-raja mulai berubah dan semakin berkurang sampai pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia.

Pelapisan sosial yang kedua adalah golongan bangsawan, yaitu orang-orang yang termasuk kerabat raja-raja yang dianggap turunan dewa dari langit. Golongan ini dianggap sebagai urutan kedua dalam pelaposan sosial karena hanya bersifat kebangsawanan dan tidak menduduki tahta sebagai raja. Golongan bangsawan ini dianggap menempati lapisan kedua dalam stratifikasi sosial karena mereka memiliki sifat-sifat mulia seperti: jujur, sopan, murah hati dan sebagainya. Selain itu, dari golongan bangsawan inilah mula-mula munculnya raja yang memimpin rakyat menjadi lebih teratur. Pandangan warga masyarakat terhadap kedudukan golongan bangsawan dalam pelapisan sosial berlangsung sampai pada zaman kemerdekaan. Bentuk-bentuk penghargaan dan penghormatan masyarakat dapat dilihat dalam jamuan makan umpamanya dalam pesta-pesta adat yang dilakukan. Dalam jamuan makan umpamanya, golongan bangsawan biasanya mendapat tempat yang istimewa dan piring nasinya berlapis (piring bersusun).³⁾

Namun tampaknya pandangan semacam ini lama-kelamaan bergeser pula. Dalam pergaulan sehari-hari tidak terlalu nampak

1) Wawancara dengan Bapak Simba Laiya Poleganti (anggota hadat Palu), tanggal 5 Januari 1984 di Kabonena Palu Barat.

adalah masih bersifat tradisional. Sedangkan padazaman Hindia Belanda sampai pada zaman Jepang, ke empat strata sosial itu tidak seketat lagi pada zaman kerajaan. Secara konsep memang masih dikenal empat macam. Tetapi secara realitas hanya 3 (tiga) strata saja, karena lapisan hamba (watu) sudah tidak ada lagi. Kemudian pada jaman kemerdekaan (1950-an), secara konsep masih dikenal ke empat strata sosial tersebut. Namun secara faktualnya hanya dua lapisan saja, yakni golongan keturunan bangsawan dan masyarakat biasa. Itupun tidak terlalu ketat lagi penggolongannya. Hal itu disebabkan karena pendidikan manusia semakin maju dan sistem nilai yang bersifat otoriter telah tergeser dan digantikan oleh sistem nilai yang bersifat demokratis.

3. Hubungan Sosial

Hubungan sosial yang dimaksud di sini adalah hubungan antara perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia, terutama yang berdasarkan atas wilayah dan suku bangsa di Kota Donggala dan Palu. Dalam hal hubungan sosial ini, penduduk asli yakni orang-orang Kaili dijadikan sebagai fokus terjadinya hubungan sosial. Bentuk-bentuk hubungan sosial yang akan diuraikan di sini adalah berupa kerja sama (*co-operation*), persaingan (*comperation*) dan juga dapat terbentuk pertentangan (*confliet*).⁴⁾

a. Kerja sama antar kelompok etnis

Sebelum dan sesudah kedatangan Hindia Belanda di Donggala dan Palu (abad ke-17-19), keadaan kehidupan manusia masih terkebelakang. Baik dari segi kehidupan keagamaan maupun dalam sego sosial - ekonomi terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan tantangan alam seperti itu, manusia merasa tergantung kepada sesamanya untuk memperoleh bantuan sehingga timbullah kerja sama di antara manusia.

4) Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Universitas Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 199.

Dalam hal kehidupan keagamaan umpamanya, orang-orang Minangkabau (Sumatera) dapat bekerja sama dengan penduduk asli dan etnis lainnya dalam menyiarkan agama Islam. Setelah terjadi proses kawin-mawin di antara kelompok etnis, maka orang Minangkabau menyerahkan segala alat adat kebesarnya kepada raja-raja seperti: boneka kuning, panji orang-orangan puode, jijiri, bulo dan bunyi-bunyian. Penyerahan itu dilakukan sebagai tanda persahabatan dan untuk memepererat kerja sama, terutama dalam hal penyiaran agama Islam.⁵⁾ Alat-alat adat kebesaran seperti itu masih dapat dijumpai sampai sekarang, terutama apabila ada acara pesta perkawinan atau kematian keluarga raja dan bangsawan..

Selain dari pada itu, kelompok etnis Bugis sejak dahulu kala telah mengadakan kerjasama dengan penduduk asli. Seperti diketahui bahwa orang-orang Bugis terkenal sebagai perantau dan pelaut (pelayar), sehingga semua kepulauan di Indonesia terdapat orang Bugis. Demikian pula halnya dengan di wilayah Donggala dan Palu telah lama berdomisili orang-orang Bugis. Seperti yang dikemukakan dalam buku Tanah Kaili bahwa pada zaman Sawerigading, kerajaan Bone di Sulawesi Selatan telah mengadakan hubungan persahabatan dengan raja Banawa (Donggala) melalui suatu perjanjian.⁶⁾ Sejak itu telah terjadi hubungan sosial antara kedua kelompok etnis, baik dalam hal perkawinan, pertanian, mencari ikan, berdagang maupun dalam hal penyiaran agama Islam. Orang-orang Bugis banyak memberi dorongan dan pelajaran bagi penduduk asli, seperti: mengajar membaca Al Qur'an dengan menggunakan bahasa Bugis, mengajar membuat perahu dan alat penangkap ikan, dan mengajar dalam hal-hal pertanian.⁷⁾

Hubungan sosial dan kerjasama semacam itu berlangsung secara rukun dan damai dari zaman kerajaan sampai zaman ke-

5) H. Muh. Djaruddin Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*, op-cit, hal. 20-21.

6) *Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala*, op-cit, hal. 14.

7) Wawancara dengan Bapak H. Djafar Lapasere (anggota DPRD. Tkt I Sulawesi Tengah), tanggal 20-9-1983 di Palu.

merdekaan, dan bahkan sampai sekarang. Dengan demikian kelompok etnis Bugis dan etnis Kaili dapat menciptakan integrasi sosial yang kuat dan merasa memiliki hubungan tali persaudaraan sejak dahulu sampai sekarang.

Demikian pula halnya dengan kelompok etnis lainnya, tetap terjadi hubungan sosial yang wajar, kelompok etnis Jawa umpamanya yang pada mulanya sengaja didatangkan oleh Belanda untuk ditugaskan mengajar penduduk asli membuat dan mengolah sawah serta menanam pohon kelapa. Kegiatan-kegiatan orang Jawa seperti itu cukup berarti bagi kemajuan sistem pertanian kelompok etnis Kaili.

b. Persaingan antar kelompok etnis dan wilayah

Walaupun telah dikatakan di atas bahwa di dalam kehidupan masyarakat Donggala dan Palu terdapat unsur kerja sama pada kelompok-kelompok etnis tertentu. Akan tetapi karena manusia membutuhkan makanan, tempat tinggal dan kedudukan yang lumayan; maka pada akhirnya dapat menimbulkan oposisi di antara mereka. Pada zaman Hindia Belanda, oposisi menonjol terjadi antara penduduk asli dengan kelompok etnis Minahasa (Manado). Hal itu disebabkan karena Belanda memberikan prioritas utama kepada orang-orang Minahasa untuk diangkat menjadi pegawai pamong praja. Selain itu, orang-orang Minahasa memiliki agama yang berbeda dengan penduduk asli.⁸⁾

Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat sering pula terjadi di kalangan masyarakat Donggala dan Palu. Persaingan semacam itu, terjadi, baik antar kelompok etnis maupun antar kelompok etnis dalam wilayah yang berbeda. Peristiwa-peristiwa pergantian pimpinan masyarakat secara tiba-tiba dan terpaksa pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa dalam jiwa masyarakat telah tertanam sifat bersaing dan nilai yang bersifat lokal. Masyarakat memiliki

8) Wawancara dengan Bapak H. Djaruddin Abdullah (anggota DPRD Tkt. I Sulawesi Tengah), Tgl. 10 September 1983 di Biromaru.

pandangan bahwa yang paling cocok memimpin adalah penduduk asli itu sendiri. Pandangan seperti itu biasanya terdapat pada kelompok masyarakat yang memiliki rasa rendah diri yang tebal, sehingga mereka mempunyai keinginan yang kuat sekali untuk mengejar kedudukan yang terpandang sangat tinggi dalam masyarakat.

Selain persaingan antar kelompok etnis, sering pula terjadi persaingan inter kelompok etnis dalam wilayah yang berlainan. Kelompok masyarakat yang berada di bagian Timur umpamanya bersaing dengan kelompok masyarakat yang ada di bagian Barat dan sebagainya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena latar belakang sejarah, di manapimpinan-pimpinan masyarakat yang muncul pada mulanya adalah orang yang memiliki kekuatan fisik yang hebat dan berasal dari wilayah kelompok masyarakat tertentu. Dengan dasar itu, maka setiap kelompok masyarakat pada wilayah tertentu yang pernah memiliki tokoh yang kuat dan pemberani (to malanggan), merasa kelompoknya lebih baik dan pantas menjadi pemimpin tertinggi dalam masyarakat.

Dengan latar belakang sejarah dan pandangan seperti itu, maka persaingan yang menonjol di kalangan masyarakat Donggala dan Palu khususnya adalah untuk mencapai kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat. Tentu saja persaingan dibidang-bidang lain tetap ada, seperti bidang ekonomi, agama, kebudayaan dan perbedaan ras. Namun persaingan dalam bidang-bidang tersebut tidak sehebat dengan persaingan untuk mengejar kedudukan.

B. Kegiatan-kegiatan Perekonomian

1. Jenis-jenis Mata pencaharian dan Defferensiasi Kerja.

Mengenai persentasi penduduk berdasarkan jenis-jenis mata pencaharian di Kota Donggala dan Palu dalam kurun waktu 1900-1950-an, belum dapat dikemukakan secara pasti dalam tulisan ini. Hal itu disebabkan oleh karena tidak ditemukan data-data lengkap tentang hal itu. Oleh karena itu dalam uraian

ini hanya merupakan istimewa menurut jenis-jenis lapangan pekerjaan. Jenis-jenis lapangan pekerjaan yang berarti pada waktu itu adalah: bercocok tanam, beternak, mencari ikan, tukang dan buruh, pegawai pamongpraja dan pedagang.

b. Bercocok tanam

Pada zaman kerajaan sampai pada zaman Jepang, penduduk Kota Donggala diperkirakan 80% memilih lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Areal pertanian yang tersedia yang berupa pegunungan cukup luas. Dengan demikian, areal pertanian yang tersedia sebagian besar ditanami kelapa dan selebihnya ditanami jagung, kacang-kacangan, palawija dan sebagainya. Hasil pertanian yang utama di Donggala adalah kelapa, yaitu sebagai barang ekspor berupa kopra, minyak goreng. Sedangkan hasil tanaman lainnya relatif kurang karena hanya merupakan tanaman sisipan. Untuk mengetahui gambaran hasil-hasil pertanian penduduk Donggala pada tahun 1947, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.1
**Hasil-hasil Pertanian di Kota Donggala
pada tahun 1947**

No.	Jenis Produksi	Banyaknya	Keterangan
1.	Minyak Goreng	877.893	liter
2.	Kelapa biji	60.857	biji
3.	Kopra	15.250	ton
4.	Damar	480	ton
5.	Rotan	367	ton
6.	Kacang tanah kupas	57	ton
7.	Kacang tanah kulit	36	ton
8.	Kedelai	43	ton
9.	Kentang	3	ton
10.	Sayur-sayuran	3	ton
11.	Asam jawa	3	ton

Sumber : Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan RI Kabupaten Donggala, Palu..

Berdasarkan dengan angka-angka dalam tabel di atas, nampak bahwa hasil pertanian kelapa sangat menyolok sekali bila dibandingkan dengan hasil-hasil bumi lainnya. Produksi pertanian kelapa inilah yang menjadi barang ekspor utama yang dapat menunjang kelangsungan hidup Kota Donggala. Sedangkan produksi padi dan jagung sangat kurang sekali, dan bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak ada. Hal itu disebabkan oleh karena tidak terdapat lahan pertanian padi di wilayah Kota Donggala, terutama lahan persawahan.

Seperti halnya dengan penduduk Kota Donggala, maka penduduk kota Palu diperkirakan 95% memilih lapangan pekerjaan di bidang pertanian dalam kurun waktu yang sama. Hal itu dimungkinkan karena lahan pertanian yang berupa lembah (Lembah Palu) cukup luas. Aneka warna bercorak tanam yang ada berdasarkan jenis-jenis tanaman adalah: pertanian kelapa, padi, jagung, kacang-kacangan, palawija dan sebagainya. Penanaman kelapa pada waktu itu dilakukan secara besar-besaran, sehingga pada tahun 1943 terdapat 5.990 ha kebun kelapa. Tiap 1 (satu) ha memuat ± 100 pohon kelapa. Dengan demikian terdapat ± 599.000 pohon kelapa di sekitar Kota Palu. Setiap satu pohon kelapa diperkirakan dapat memproduksi 6000 biji kelapa atau $\pm 1,2$ ton kopra pertahun. Dengan demikian, secara keseluruhan produksi kopra setiap tahun diperkirakan mencapai ± 718.800 ton. Sistem pemetikannya dilakukan sekali dalam tiga bulan dengan mempergunakan tenaga buruh (tukang panjat). Imbalan jasa kepada tukang panjat bisa berupa uang atau bisa juga berupa kelapa. Hasil-hasil pertanian lainnya yang agak menonjol adalah padi, yakni ± 15 ton gabah pertahun dengan areal seluas kira-kira 5.690 ha sawah. Sedangkan jagung sebanyak 10 ton pertahun dengan luas areal ± 970 ha ladang.⁹⁾ Untuk menge-

9) Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala, op-cit, hal. 53-59.

tahui hasil-hasil pertanian penduduk kota Palu pada tahun 1947, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2
Hasil-hasil Pertanian di kota Palu
pada tahun 1947

No.	Jenis Produksi	Banyaknya	Keterangan
1.	Kelapa	718.800 ton	kopra
2.	P a d i	15 ton	gabah
3.	Jagung	10 ton	tongkol
4.	Ketela	3 ton	buah
5.	U b i	3 ton	buah
6.	Kedelai	3 ton	butir

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan RI Kabupa-
ten Donggala, Palu.

Berdasarkan dengan angka-angka dalam tabel V.2 di atas, maka nampak bahwa produksi pertanian yang paling menonjol adalah kopra. Produksi kopra ini merupakan barang ekspor yang besar dan dapat menunjang pembangunan kota Palu pada waktu itu. Adapun hasil-hasil pertanian lainnya seperti padi dan jagung hanya sekedar untuk dimakan. Itu pun belum mencukupi kebutuhan pangan penduduk kota Palu secara keseluruhan. Hal itu disebabkan oleh karena sistem bercocok tanam di sawah pada waktu itu masih bersifat tradisional. Sampai pada tahun 1949, para petani di Palu belum mengenal penggunaan bajak. Dengan demikian sistem bercocok tanam yang dilakukan adalah "Paruja", yakni pada waktu musim tanam datang (musim hujan), semua kerbau atau sapi dihalau turun ke sawah sehingga tanah sawah diinjak-injak sampai berlumpur dan dapat ditanami padi.¹⁰⁾ Faktor lain yang tidak memungkinkan produksi padi

10) Ibid.

sawah yang memadai adalah masalah air. Walaupun lahan persawahan cukup luas dan tenaga kerja cukup, akan tetapi belum adanya irigasi yang memadai dan lagi pula curah hujan sangat rendah. Dengan demikian pengelolaan lahan persawahan tidak dapat dilakukan secara kontinyu.

Dapat ditambahkan pula bahwa pada zaman kedudukan Jepang, kegiatan pertanian di kedua kota ini diatur oleh pemerintah Jepang. Penduduk dikerahkan tenaganya untuk bekerja paksa di kebun-kebun persawahan Jepang. Penduduk ditempatkan pada barak-barak dan dipekerjakan selama 10 hari tanpa gaji dan makan, kecuali mereka sendiri yang membawa makanan. Jam kerja mereka mulai waktu hari terbit sampai mata hari terbenam. Kegiatan kerja paksa seperti itu berlangsung selama 10 hari kemudian diaplos oleh kelompok lain. Selain mereka disuruh bekerja paksa, hasil-hasil pertanian rakyat diambil oleh Jepang dimasukkan ke dalam gudang sebagai persiapan makanan pasukannya. Dengan demikian, penduduk betul-betul kekurangan makanan pada waktu itu.¹¹⁾

Demikianlah berita-berita tentang kegiatan penduduk di bidang pertanian pada tahun 1940-an yang dapat di peroleh. Sedangkan data-data mengenai kegiatan pertanian pada tahun 1950-an belum diperoleh secara pasti. Namun diperkirakan bahwa produksi pertanian pada waktu itu mungkin semakin menurun. Hal itu disebabkan karena terjadinya perluasan kota yang sudah barang tentu menggunakan lahan pertanian penduduk. Berpuluh-puluh hektar tanah pertanian dan kebun kelapa di sekitar kota Palu telah berubah menjadi lokasi pemukiman penduduk dan perkantoran. Dengan keadaan yang demikian, terpaksa sebahagian para petani beralih kepada mata pencaharian di bidang lain.

11) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, Proyek IDKD, Jakarta, 1982, hal. 41-42.

b. Beternak hewan

1) Sistem Pelaksanaannya.

Peternakan hewan termasuk salah satu jenis lapangan pekerjaan yang sudah tua usianya di kalangan masyarakat Kota Donggala dan Palu. Peternakan hewan itu mula-mula dilakukan oleh raja-raja karena memiliki banyak tenaga kerja yang dapat dipergunakan (hamba atau *watua*). Kemudian lama-kelamaan, masyarakat biasa (*to dea*) ikut juga beternak secara kecil-kecilan. Seperti diketahui bahwa Kota Donggala dan Palu termasuk daerah yang beriklim panas sehingga cocok untuk melaksanakan peternakan, utamanya jenis binatang seperti kambing dan domba.

Sistem peternakan yang dilakukan adalah bersifat tradisional. Untuk jenis ternak seperti sapi, kerbau dan kuda dilepas di padang penggembalaan selama bertahun-tahun. Nanti ada keperluan, barulah binatang ternak itu ditangkap atau dihalau ke perkampungan, yaitu seperti keperluan pengolahan sawah dengan sistem paruja, untuk keperluan kuda beban atau sapi penarik gerobak. Para penggembala bertugas mengawasi pada waktu-waktu tertentu dan menghalau atau menangkapnya apabila diperlukan oleh tuannya. Sedangkan jenis ternak kambing dan domba juga dilepas di padang penggembalaan mulai pagi sampai sore hari. Jadi penggembala bertugas melepaskannya setiap pagi hari dan menghalaunya kembali ke kandang pada petang hari. Pada umumnya peternak kambing, domba, peternak sapi, kuda dan kerbau dalam jumlah terbatas; kandang ternaknya dibuat di bawah kolong rumah.^{1 2)}

Sistem peternakan seperti itu memang memungkinkan dilakukan pada waktu itu, karena daerah penggembalaan ternak cukup luas yang hampir sama luasnya dengan lahan pertanian yang ada, baik yang berupa sawah maupun ladang. Luas wilayah

12) Wawancara dengan Bapak H. Djaruddin Abdullah di Biromaru Palu, tanggal 9 September 1983.

yang digunakan sebagai daerah pengembalaan ternak (*tempat panginan*) pada tahun 1947 adalah \pm 4.200 ha yang terdiri atas lembah dan lereng-lereng gunung.^{1 3}) Namun sistem peternakan bebas seperti itu mengakibatkan kerusakan fatal terhadap lahan pertanian. Terjadi penggundulan di mana-mana, baik didataran rendah maupun di lereng-lereng gunung yang dampak negatif cukup terasa sampai sekarang.

Mengenai jumlah peternak pada waktu itu tidak ditemukan data secara pasti, namun diperkirakan 90% rumah tangga melakukan peternakan, termasuk peternakan kambing secara kecil-kecilan pada setiap rumah. Dapat ditambahkan bahwa dari tahun 1900–1940-an kendaraan penduduk yang paling populer adalah kuda dan gerobak yang ditarik oleh sapi Bengkulu. Dengan demikian hampir setiap rumah tangga terdapat ternak kuda atau sapi. Walaupun peternakan yang dilakukan setiap rumah tangga hanya merupakan mata pencaharian sampingan, akan tetapi cukup membantu dalam dinamik sosial masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang transportasi.

2) Jenis-jenis dan jumlah ternak

Jenis binatang ternak yang ada di wilayah Kota Palu dan Donggala pada tahun 1900–1950-an adalah: kuda, sapi, kambing, domba, kerbau dan babi, ayam dan sebagainya. Jumlah binatang ternak tiap jenisnya bervariasi menurut kegunaan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Terutama pada masa kedudukan tentara Jepang, produksi peternakan menurun dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena ternak-ternak penduduk diambil secara paksa oleh Jepang untuk kepentingan perang.^{1 4}) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan biakan binatang ternak dalam tabel berikut:

13) Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala Op-cit, hal. 54.
14) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, op-cit.

Tabel V.3
Jumlah Ternak
Masyarakat Donggala dan Palu tahun 1947¹⁵⁾

No.	Jenis ternak	Jumlah (ekor)	Persentase (%)
1.	Kambing	13.890	33
2.	Kerbau	11.091	26
3.	Domba	10.991	26
4.	Sapi	3.737	7
5.	Kuda	2.012	5
6.	Babi	1.298	3
Jumlah		43.019	100

Berdasarkan dengan data-data dalam tabel di atas tentang jumlah ternak tiap jenis binatang tahun 1947, maka nampak bahwa jenis ternak kambing menempati urutan pertama (33%). Data-data itu menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam beternak kambing. Hal itu dimungkinkan karena wilayah Kota Donggala dan Palu termasuk beriklim panas, sehingga cocok untuk peternakan kambing. Demikian pula peternakan domba termasuk berhasil (26%), karena faktor iklim pula ikut mempengaruhinya. Produksi ternak kambing dan domba, selain dikonsumsi oleh masyarakat setempat juga dikirim ke luar daerah (antar pulau).

Sedangkan ternak kerbau (istilah setempat disebut hewan) menempati urutan kedua, yakni ± 26%. Dengan jumlah ternak kerbau ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat petani untuk dipergunakan dalam mengolah areal persawahan. Sesuai dengan sistem pengelolaan sawah pada waktu itu (paruja), maka masyarakat memang perlu memiliki kerbau yang banyak. Tanpa kerbau yang banyak, maka sistem paruja sudah barang tentu mema-

15) Ibid.

kan waktu yang relatif lama. Demikian pula jenis ternak lain seperti sapi dan kuda tetap menunjukkan kemajuan dalam peternakan. Sapi selain digunakan sebagai bahan konsumsi masyarakat, juga digunakan sebagai tenaga penarik gerobak atau barang-barang berat seperti kayu-kayu besar dan sebagainya. Sedangkan ternak kuda, selain dipergunakan sebagai alat transport (kuda tunggang, kuda beban dan kuda dokar) juga dipergunakan sebagai kuda pacu.

c. Mencari ikan

Selain bertani dan beternak, mencari ikan juga dijadikan sebagai mata pencaharian hidup masyarakat Donggala dan Palu; baik sebagai mata pencaharian hidup utama maupun mata pencaharian hidup sampingan. Masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan memiliki pengetahuan tentang cara mencari ikan, maka mencari ikan itu dijadikan sebagai mata pencaharian hidup utamanya. Akan tetapi merekapun berkebun/bersawah dan beternak sebagai mata pencaharian hidup sampingan. Sebaiknya masyarakat petani yang menjadi mata pencaharian hidup tauamnya, di samping itu toh juga mencari ikan sebagai mata pencaharian hidup tambahan. Hal itu dimungkinkan karena wilayah kedua kota ini terletak di pesisir pantai Teluk Palu. Dengan demikian sulit dipastikan berapa persen penduduk yang memilih mencari ikan sebagai mata pencaharian hidup utamanya. Namun mereka yang melakukan pencaharian ikan pada umumnya adalah penduduk asli dan suku bangsa Bugis, terutama masyarakat Kota Donggala.

Sistem pengelolaan dan peralatan masih bersifat tradisional. Para nelayan masih mempergunakan perahu layar kecil yang dikemudikan oleh dua orang. Selain itu, alat-alat penangkap ikan yang digunakan masih sangat sederhana seperti: jala, pancing, tambak dan sebagainya. Dengan perahu yang demikian, maka para nelayan hanya dapat melayari sampai $\pm 10-20$ km dari pantai, sehingga hanya dapat menemukan ikan-ikan kecil

dalam jumlah yang relatif kurang. Untuk menambah penghasilannya, para nelayan kadang-kadang menggunakan ilmu gaib sebagai alat bantu peralatannya yang masih bersifat tradisional.

Pembagian kerja dan hasil belum ada aturan yang tegas, hal itu disebabkan karena dalam satu kelompok biasanya terdiri atas orang tua dan anak atau saudara yang masih tinggal dalam satu rumah tangga. Semuanya dapat mengemudikan perahu, melempar jala, melempar pancing atau mengawetkan ikan. Ikan-ikan yang ditangkap, sebahagian dapat dijual di pasar atau di pantai apabila ada pembeli yang datang dan sebahagian lainnya dikonsumsi sendiri. Hasil penjualan ikan biasanya tidak dibagi, akan tetapi diserahkan kepada ibu rumah tangga untuk disimpan sebagai tabungan hari esok.

d. Tukang dan buruh.

Mata pencaharian lain masyarakat Donggala dan Palu pada waktu itu adalah tukang, baik sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang jahit. Pada umumnya yang menjadi tukang kayu atau tukang batu adalah orang-orang Bugis-Makassar. Dalam hal ini, tentu saja lebih mempermudah dalam melaksanakan tugas, karena bentuk rumah penduduk asli adalah sama dengan bentuk rumah orang Bugis-Makassar. Arsitektur tradisional rumah Bugis-Makassar sedikit banyaknya memberi pengaruh terhadap bentuk rumah penduduk asli. Tukang-tukang kayu yang mengerjakan rumah (rumah panggung) penduduk asli sudah barang tentu menerapkan model-model rumah orang Bugis-Makassar yang telah dikuasainya. Mengenai pekerjaan di bidang jahit-menjahit (tukang jahit), pada umumnya dimonopoli oleh orang-orang Banjarmasin. Mereka merantau ke Donggala dan Palu khusus untuk menjadi tukang jahit. Tentu saja suku-suku bangsa lain ada juga yang menjadi tukang jahit seperti suku Bugis dan sebagainya, tetapi tidak seberapa jumlahnya bila dibandingkan dengan orang Banjarmasin.

Adapun penduduk yang memilih pekerjaan utamanya sebagai buruh adalah pada umumnya penduduk asli. Ada yang

menjadi buruh pelabuhan, buruh bangunan dan pemanjat kelapa. Mereka yang menjadi buruh pemanjat kelapa pada umumnya adalah orang-orang dari gunung (Tolare), karena memiliki keahlian dalam memanjat. Dengan keahlian yang dimilikinya, maka biasa hanya satu pohon yang dipanjat kemudian berpindah ke pohon kelapa yang lain dengan melalui pelepah kelapa yang berhubungan satu sama lain. Tentu saja upah yang diperoleh tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka harus mencari mata pencaharian tambahan seperti: menjadi buruh bangunan, mencari rotan atau damar dan sebagainya. Pada tahun 1947, Donggala dan Palu mengeksport rotan sebanyak 367 ton dan damar sebanyak 480 ton.¹⁶⁾

e. Pada zaman Belanda, warga masyarakat Donggala dan Palu hanya sedikit sekali yang menjadi pegawai pamong praja. Mereka yang menjadi pegawai pamong praja adalah orang-orang Minahasa, kerabat raja, orang Jawa, orang Gorontalo. Orang-orang Minahasa yang menjadi pegawai pamong prajadan guru sekolah di Donggala dan Palu sengaja didatangkan oleh Belanda dari Manado. Demikian pula orang-orang Jawa sengaja didatangkan untuk mengurus perkebunan milik Belanda. Orang-orang Minahasa dan orang Jawa yang diangkat menjadi pegawai pamong praja termasuk setia dan tekun bekerja sehingga mereka sangat disukai oleh Belanda. Sedangkan orang Gorontalo pada umumnya bekerja sebagai guru. Adapun golongan raja, yang dapat diterima oleh Belanda menjadi pegawai pamong praja adalah mereka yang memiliki sedikit pendidikan dan mau mengadakan kerja sama dengan Belanda. Sedangkan golongan raja dan bangsawan yang selalu menentang Belanda, tidak diberi kesempatan untuk menjadi pegawai dan bahkan anak-anak mereka tidak akan mendapat fasilitas pada sekolah-sekolah Belanda untuk memperoleh pendidikan.

Akibat karena adanya pengecualian dalam pengangkatan pegawai pamong praja, maka semakin memperlemah integrasi

16) Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala Op-cit, hal. 58.

sosial di dalam masyarakat. Golongan-golongan yang ikut bekerja sama dengan Belanda dianggap sebagai penghianat perjuangan bangsa Indonesia. Golongan Raja atau Bangsawan yang kontra Belanda saling bermusuhan dengan golongan raja atau bangsawan yang pro dengan Belanda. Demikian pula golongan masyarakat umum yang kontra dengan Belanda tidak akrab dengan orang-orang Minahasa yang banyak mengabdikan kepada Belanda.

Demikian pula pada zaman Jepang, orang-orang yang pernah diangkat oleh Belanda menjadi pegawai pamong praja tetap dipakai oleh pemerintah Jepang. Orang-orang yang dianggap berani dan pro pada tentara Jepang diangkat menjadi mandor perkebunan, mandor dalam usaha-usaha kerja paksa dan sebagainya. Keadaan seperti itu berlangsung sampai pada berakhirnya kekuasaan sekutu bersama NICA.

f. Pedagang

Pada zaman Belanda sampai pada zaman Jepang usaha-usaha perdagangan yang agak besar dilakukan oleh para penjahat dan orang-orang non-pribumi. Sedangkan masyarakat setempat (golongan pribumi) hanya dapat melakukan usaha-usaha dagang kecil, itupun hanya sebahagian kecil saja dari warga masyarakat yang melaksanakannya. Seperti umpamanya orang-orang Bugis menjual tembakau, menjual sayur-sayuran, menjual ikan, menjual ubi dan kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Sedangkan barang-barang kebutuhan yang lebih penting seperti: beras, gula pasir, barang-barang bangunan dan sebagainya dikuasai oleh orang Cina dan penjahat. Nanti sesudah kemerdekaan, barulah masyarakat setempat sudah banyak yang melakukan usaha-usaha dagangan.

2. Jaringan Pasar

a. Jalur distribusi barang

Seperti diketahui bahwa di Kota Donggala terdapat pelabuhan, sehingga hasil-hasil bumi Donggala dan Palu yang dapat

di ekspor dikirim melalui Pelabuhan Donggala, baik yang dikirim ke Makassar maupun ke Jawa. Jenis-jenis barang yang dikirim adalah kopra, minyak goreng, kelapa biji, damar, rotan, kacang-kacangan, binatang ternak dan sebagainya. Pada zaman pemerintahan Belanda, ekspor barang-barang dikuasai oleh Belanda dengan menggunakan orang-orang Cina sebagai pedagang perantara. Barang-barang itu dikirim dengan mempergunakan perahu atau kapal untuk kepentingan perang di mana pimpinan Belanda berkedudukan. Demikian pula sebaliknya, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat di datangkan dari Jawa melalui Makassar. Barang-barang yang di impor itu didistribusikan oleh pedagang-pedagang Belanda di dalam kota dan untuk luar kota melalui pedagang-pedagang kecil. Barang-barang impor tersebut antara lain seperti beras, gula pasir, gula merah, sabun, jagung, tembakau, kopi, ikan kering dan sebagainya.

Dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi selama masa pemerintahan Hindia Belanda berjalan seperti sebelumnya. Masyarakat tidak terlalu susah dalam hal kebutuhan sandang dan pangan. Hal itu disebabkan karena arus distribusi barang tetap berjalan seperti biasa walaupun pada waktu itu transaksi yang dilakukan adalah antara barang dengan barang, seperti: kelapa ditukar dengan beras, jagung ditukar ubi, kopi ditukar dengan ubi dan sebagainya. Mata uang yang beredar pada waktu itu adalah mata uang Belanda.

Berbeda halnya dengan pada zaman Jepang, yakni kehidupan ekonomi rakyat sangat susah, Rakyat hidup serba kekurangan baik pangan, sandang maupun obat-obatan. Pada waktu itu rakyat tidak diperbolehkan memperjual belikan barang-barangnya, perdagangan dimonopoli oleh Jepang dengan diatur oleh suatu badan yang disebut (*nantaibo*). Sedangkan badan yang mengurus distribusi barang-barang adalah *kumisi*. Jadi pada waktu itu makanan didistribusikan oleh *kumisi* kepada rakyat, tapi itupun sangat terbatas (semua bahan-bahan ma-

kanan hasil produksi pertanian dikumpul di gudang makanan Jepang), kemudian didistribusikan kepada rakyat sesuai dengan jatah masing-masing. Itu pun hanya berupa jagung, ubi yang dibagi-bagikan kepadanya. Dengan demikian rakyat tidak diberi kesempatan untuk mendistribusikan sendiri hasil pertaniannya. Apabila ada yang kedapatan mengadakan transaksi seperti ayam dengan sabun, maka diberi hukuman berupa kerja paksa.¹⁷⁾

Pada waktu itu (zaman Jepang), barang-barang luks seperti gula pasir, sabun, kopi, bahan pakaian, rokok dan sebagainya hilang dari pasaran. Dengan demikian penduduk berusaha membuat gula merah, merokok dengan daun jagung, menenun kain belacu atau bahan pakaian dari kulit kayu.¹⁸⁾ Kesemuanya itu dilakukan oleh Jepang agar rakyat tidak berdaya untuk mengadakan perlawanan, dan sebaliknya tentara Jepang semakin kuat karena persediaan makanan dan pakaian cukup. Demikianlah keadaan ekonomi rakyat berlangsung sampai berakhirnya kedudukan tentara Jepang. Nanti sesudah perang kemerdekaan, keadaan ekonomi mulai diatur sendiri oleh rakyat bersama pemerintah.

b. Jenis-jenis barang ekspor/impor dan komposisi harga

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang, tidak ditemukan data statistik mengenai jenis barang yang di ekspor atau yang di impor. Demikian pula mengenai komposisi harga, sehingga hanya dapat diperkirakan saja berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengalami peristiwa pada waktu itu. Yang pasti bahwa barang-barang ekspor dari Donggala dan Palu pada waktu itu adalah seperti: kopra, minyak goreng, rotan, damar, binatang ternak dan sebagainya. Sedangkan barang-barang impor adalah seperti: gula pasir, gula merah, beras, jagung, sabun, kopi, tekstil, barang-barang bangunan dan sebagainya.

17) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, op-cit, hal. 42.

18) Wawancara dengan Bapak Yondi Maranua di Tawaeli.

Pada zaman kemerdekaan (1947) ditemukan data statistik mengenai barang ekspor dan barang-barang impor. Barang-barang ekspor dan impor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.4
Barang-barang Impor Donggala—Palu
Tahun 1947

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga/Rp.	%
1.	Beras	703 ton	7.690	87,65
2.	Tembakau	62 ton	259.798	7,73
3.	Ikan kering	15 ton	37.750	1,87
4.	Gula merah	12 ton	61.585	1,50
5.	K o p i	9 ton	14.170	1,13
6.	Jagung	1 ton	700	0,12
	J u m l a h	802 ton	381.693	100

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan RI Kabupaten Donggala.

Sedangkan barang-barang ekspor dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel V.5
Barang-barang Ekspor kota Donggala
dan Palu pada tahun 1947

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga/Rp.	Ket.
1.	Kopra	15.250 ton	3.004.005	
2.	Rotan	367 ton	1.224.387	
3.	Damar	480 ton	390.835	
4.	Kacang tanah kupas	57 ton	61.060	
5.	Kacang tanah kulit	34 ton	15.963	
6.	Kedelai	43 ton	23.819	
7.	Asam Jawa	3 ton	866	
8.	Sayur-sayuran	3 ton	525	
9.	Kentang	3 ton	2.955	
10.	Minyak kelapa	877.893 Ltr.	266.058	
11.	Kelapa biji	60.857 Biji	5.500	
12.	Kerbau	4.265 Ekor	4.995.962	
13.	Kambing	1.748 Ekor	—	
14.	Babi	1.278 Ekor	—	
15.	Domba	346 Ekor	—	
16.	Kuda	34 Ekor	—	

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan RI Kabupaten Donggala.

Dari data-data dalam tabel V.4 di atas nampak bahwa impor beras menempati urutan pertama, kemudian menyusul tembakau di urutan ke dua dan seterusnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa produksi pertanian pada waktu itu belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Donggala dan Palu, terutama bahan makanan pokok. Selain itu masih ada barang-barang impor lainnya yang tidak tercantum dalam tabel di atas, yakni seperti: gula pasir, sabun, tekstil, bahan-bahan bangunan yang kesemuanya harus di impor masyarakat Donggala dan Palu.

Sedangkan barang-barang ekspor menunjukkan bahwa kopra menempati urutan pertama, kemudian urutan ke dua adalah produksi hewan ternak, dan urutan ke tiga adalah rotan.

Mengenai komposisi harga barang-barang didapatkan angka-angka yang pasti. Hanya saja kalau berdasarkan dengan perhitungan harga yang terdapat dalam tabel dianalisa secara mendalam, maka dapat diperkirakan bahwa harga barang-barang adalah seperti di bawah ini:

Tabel V.6
Harga barang-barang di Sulawesi Tengah
Tahun 1947

No.	Jenis barang	Harga (Rp).	Satuan
1.	Kopra	0,20	kg
2.	Beras	0,10	kg
3.	Kelapa	0,09	biji
4.	Kopi	0,50	kg
5.	Gula merah	5,00	kg
6.	Damar	0,80	kg
7.	Jagung	0,07	kg
8.	Ikan kering	2,50	kg
9.	Kerbau	1.175,00	ekor

Sumber: Analisa harga berdasarkan tabel V.4 dan V.5

Tentu saja harga barang-barang tersebut di atas mungkin tidak persis sama, akan tetapi paling tidak menghampiri kebenaran. Sejalan dengan itu, diperoleh pula data dari tokoh masyarakat mengenai harga barang-barang tersebut. Dikatakan bahwa pada ± 1920-an; harga beras adalah 4 sen per liter, gula pasir 8 sen per liter, jagung 3 sen per liter.¹⁹⁾ Sedangkan harga barang-barang lain tidak diingat lagi harganya.

19) Wawancara dengan Bapak Laiya Poleganti (anggota Dewan Hadat Palu), di Kampung Kabonena Palu Barat, 10 Nopember 1983.

3. Badan-badan Sosial

Yang dimaksud dengan badan-badan sosial di sini adalah erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perekonomian rakyat Donggala dan Palu, baik yang bergerak di bidang produksi, distribusi, konsumsi maupun mengenai simpan-pinjam. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sudah barang tentu telah ada badan-badan sosial seperti itu. Namun dokumen-dokumen tentang badan sosial tersebut tidak ditemukan. Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa pada zaman Belanda telah ada badan sosial yang disebut "*Kopra Pons*". Badan ini mengurus masalah perkopraan, baik dari segi produksi maupun dari segi pendistribusian. Badan yang berbentuk koperasi kopra ini dikoordinasi langsung oleh Pemerintah Belanda, dan setiap orang yang mau menjual kelapa/koprapnya harus dijual kepada *Kopra Pons* (koperasi kopra) tersebut. Koperasi kopra ini cukup berperan selama zaman pemerintahan Hindia Belanda, dan nanti menurun atau bahkan berhenti sama sekali setelah bala tentara Jepang datang menduduki Donggala dan Palu. Selain koperasi tersebut di atas, pada tahun 1931 sudah ada pula Bank Rakyat yang berkedudukan di Palu.²⁰⁾

Pada zaman kedudukan Jepang, juga dikenal badan-badan sosial yang mengurus masalah perekonomian. Badan-badan yang mengurus atau menangani perdagangan disebut "*nantaibo*", dan badan yang mengurus secara khusus pendistribusian barang-barang disebut "*kumiai*". Sedangkan badan yang mengurus masalah pertanian rakyat disebut "*nantaku*" dan yang mengurus secara khusus penanaman kapas disebut "*toyoboseki*".²¹⁾ Pada zaman kedudukan Jepang praktis kegiatan-kegiatan perkoperasian ditangani oleh Jepang, sedangkan kegiatan-kegiatan perkoperasian yang pernah dilakukan oleh rakyat berhenti sama

20) Wawancara dengan Bapak H. Rusdy Toana (anggota DPRD Tkt. I Prop. Sulawesi Tengah), tanggal 1 Oktober 1983 di Palu.

21) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, op-cit.

sekali. Hal itu disebabkan oleh karena semua kegiatan-kegiatan pertanian, pendistribusian penjualan barang-barang dilakukan oleh badan-badan sosial yang ditangani secara langsung oleh Jepang.

Nanti pada zaman kemerdekaan, bentuk *Kopra Pons* muncul kembali dengan nama "*Yayasan Kopra*" dan akhirnya berkembang menjadi "*Kooperasi Kopra*". Kooperasi Kopra inilah yang berkembang terus, dan sampai pada tahun 1950-an bermunculanlah kooperasi-kooperasi yang dibina rakyat Donggala dan Palu. Untuk mengetahui badan-badan sosial yang bergerak di bidang perekonomian rakyat tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.7
Jenis-jenis kooperasi menurut tempat dan
bidang usaha pada tahun 1950-an

No.	Nama	Jenis Usaha	Tempat	Tahun berdiri
1.	Rukun Agawe Santoso (RAS)	Konsumsi	Palu	9-12-1950
2.	Sintuwu Todea (Sinto)	Produksi	Palu	3-1-1950
3.	Kooperasi Paboya	Produksi	Palu	11-10-1950
4.	Kooperasi Dolo	Produksi	Palu	4-9-1949
5.	Serikat Dagang Kopra (SDK)	Produksi	Palu	9-4-1951
6.	Buruh Indonesia (B.I.)	Produksi	Palu	1-10-1949
7.	Kooperasi Rakyat Pewunu (KRP)	Produksi	Palu	9-8-1951
8.	Kooperasi Kawatuna	Produksi	Palu	27-9-1950
9.	Kooperasi Usaha Baru	Produksi	Palu	14-9-1950

10.	Kooperasi Rakyat Indo-Tani Kabonena (KRITIK)	Produksi	Palu	15-9-1950
11.	Kooperasi Setia	Produksi	Palu	15-11-1950
12.	Kooperasi Aman	Produksi	Palu	11-10-1951
13.	Kop. Persatuan Dagang Rakyat	Produksi	Palu	28-10-1950
14.	Kooperasi Pegawai Pemerintah Palu (KP3)	Konsumsi	Palu	15-9-1954
15.	Pusat Kop. Kab. Donggala (PUKKAD)	Konsumsi	Palu	9-3-1953
16.	Kooperasi Petani Kelapa (KPK)	Produksi	Palu	10-8-1955
17.	Kooperasi Simpan Pinjam Peg. Pertanian Kab. Donggala (KOPERTAD)	Konsumsi	Palu	1-3-1955
18.	Kooperasi Sentral Organisasi Perekonomian Rakyat Indonesia (SOPRI)	Kop. Desa	Palu	1-1-1953
19.	Kooperasi Buruh	Kooperasi Dua	Donggala	2-10-1952
20.	Kop. Perserikatan Pembeli/Penjual Kopra (PMK)	Produksi	Donggala	1-1-1945
21.	Kooperasi Rakyat Indonesia Tawaeli (KARID)	Konsumsi	Donggala	27-3-1955
22.	Koperasi Pegawai Donggala (KOPDA)	Konsumsi	Donggala	19-2-1955

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan RI, Kabupaten Donggala.

Berdasarkan data-data di atas tentang badan-badan sosial yang dibina dan dikelola oleh penduduk, maka nampak bahwa pada tahun 1950-an dinamik sosial masyarakat Donggala dan Palu sudah mulai meningkat. Sebagian urusan perekonomian ditangani oleh penduduk setempat, walaupun masih dalam tahap kecil-kecilan.

BAB VI
KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

A. Kependidikan

1. Laman Pemerintahan Hindia Belanda
Pada tahun 1910-an di Kota Boneke terdapat dua buah sekolah berkelas tiga (Volksschool) dan satu buah sekolah berkelas dua (Vervolg-school). Kemudian pada kira-kira tahun 1920-an di Kota Boneke didirikan dua sekolah berkelas VI yang diberi nama Sekolah Pemerintahan Sekolah ini diarah oleh orang-orang dengan jumlah murid sebanyak 100 orang. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1930-an dibuka pula sekolah lanjutan yang disebut Holland Indische School (HIS) Sekolah ini diarah oleh orang-orang dengan jumlah siswa 50 orang. Pada masa belian yang diarah pada HIS adalah Batavia Belanda sebagai bahasa pengantar, bahasa Inggris dan Belanda sebagai bahasa kedua.

Sehingga di Kota Palu pada tahun 1940-an dibuka pula empat sekolah berkelas III dan 2 buah sekolah berkelas II (tiga buah sekolah di Kecamatan Palu dan tiga buah sekolah di Kecamatan Hinomara). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya sekolah yang berkelas tiga (Volksschool) dirubah menjadi Sekolah Pemerintahan (berkelas VI) dan Vervolg-school didirikan.

BAB VI

KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

A. Kependidikan

1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Pada tahun 1910-an, di Kota Donggala terdapat dua buah sekolah berkelas tiga (*Volkschool*) dan satu buah sekolah berkelas dua (*Vervolgschool*). *Vervolgschool* merupakan lanjutan dari *Volkschool*. Kemudian pada kira-kira tahun 1920-an, dibuka sekolah yang berkelas VI yang diberi nama Sekolah *Government*. Sekolah ini diasuh oleh tujuh orang guru dengan jumlah murid sebanyak \pm 300 orang. Dalam perkembangan selanjutnya \pm tahun 1930-an, dibuka pula sekolah lanjutan yang disebut *Holland Inlandsche School* (HIS). Sekolah ini diasuh oleh tujuh orang guru dengan jumlah siswa \pm 50 orang. Mata-mata pelajaran yang diajarkan pada HIS adalah. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, Bahasa Inggris, Ilmu Bumi dan sebagainya.¹⁾

Sedangkan di Kota Palu pada tahun 1930-an dibuka pula 4 (empat) Sekolah berkelas III dan 2 (dua) buah sekolah berkelas II (tiga buah sekolah di Kerajaan Palu dan tiga buah sekolah di Kerajaan Biromaru). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, sekolah yang berkelas tiga (*Volkschool*) dirubah menjadi Sekolah *Government* (berkelas VI) dan *Pervolkschool* diubah

1) Wawancara dengan Bapak L. Lamarauna (anggota Dewan Hadat Donggala), Tanggal 20 September 1983 di kota Donggala.

menjadi HIS Sekolah HIS ini adalah sekolah orang-orang Belanda dan keturunan raja/bangsawan yang mau bekerjasama dengan Belanda. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, sekolah-sekolah yang ada di ibu kota kerajaan tidak mampu menampung murid-murid yang mendaftarkan diri, baik dari kota itu sendiri maupun dari pedesaan, maka pada setiap distrik dibuka pula sekolah rakyat umum yang berkelas VI (enam).²⁾

Sistem pengajaran yang diterapkan adalah disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja bangsa Belanda, yakni mata pelajaran yang diajarkan adalah: membaca, menulis, berhitung dan bahasa Belanda. Anak-anak yang tamat dari sekolah-sekolah *Volkschool* dan *Vervolgschool* itu akan dipekerjakan pada kantor pemerintahan dan perusahaan Hindia Belanda. Tentu saja sistem pendidikan yang diterapkan dalam dua jenis tingkat sekolah tersebut sangat rendah kadar ilmiahnya, karena tujuannya bukan untuk membentuk manusia-manusia intelektual melainkan hanya untuk mencetak tenaga kerja kasar pada bidang pemerintahan dan perusahaan perkebunan Belanda.

Selain sekolah pemerintah di atas, juga terdapat sekolah partikulir pada zaman Belanda, seperti sekolah yang diasuh oleh lembaga Pendidikan Islam Alchairat, Bala Keselamatan dan Serikat Islam. Sekolah-sekolah yang dibina oleh Bala Keselamatan pada umumnya berlokasi di pedesaan, yakni mula-mula di Kalawara (\pm tahun 1920-an) kemudian menyusul pada desa-desa lainnya seperti di Kulawi, Lindu, Toro, Gimpu dan sebagainya.

Khusus sekolah yang dibina oleh Lembaga Pendidikan Islam Alchairat, pertama-tama dibuka di kota Palu pada tanggal 30 Juni 1930 oleh seorang berbangsa Arab (dari Propinsi Hadramaut Arabiah Selatan). Mula didirikannya adalah berupa sekolah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian berkembang dibuka pula Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pada mulanya go-

2) Wawancara dengan Bapak H. Djaruddin Abdullah (anggota DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah), tanggal 23 September 1983 di Biromaru - Palu.

longan masyarakat yang memasuki sekolah-sekolah Alchairat ini adalah etnis Arab, kemudian di ikuti oleh etnis-etnis lain yang tergolong dalam organisasi Nahdatul Ulama. Sistem Pendidikannya adalah mengutamakan pendidikan agama dan menanamkan rasa patriotisme anti penjajah. Dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid, dipergunakan bahasa Arab, sehingga murid-murid dapat menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Dengan sistem pendidikan dan sikap konfrontasi yang diperlihatkan kepada Belanda, maka dalam usaha pengembangannya senantiasa mengalami hambatan dari penjajah Belanda.³⁾

Dari sekolah-sekolah tersebut di atas, tidak ditemukan data mengenai jumlah guru dan muridnya. Namun demikian, pada waktu itu setiap kelas pada umumnya terdiri atas 40–50 murid yang diasuh oleh seorang guru.⁴⁾ Dengan demikian dalam satu sekolah (sekolah tiga tahun), jumlah muridnya sudah barang tentu mericapai 120–150 orang dengan jumlah guru sebanyak tiga orang. Dapat diperkirakan bahwa jumlah murid di kota Donggala pada tahun 1930-an adalah sebanyak ± 450 orang dengan jumlah guru sebanyak ± 11 orang. Sedangkan di Kota Palu diperkirakan bahwa jumlah murid ± 880 orang dengan jumlah guru ± 22 orang.

2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada zaman kedudukan tentara Jepang, Sekolah-sekolah yang bersifat umum tetap berjalan seperti biasa. Mengenai jumlah sekolah, guru dan murid tidak ditemukan data-ditanya secara pasti. Diperkirakan bahwa pada waktu itu jumlah sekolah tidak mengalami pertambahan yang berarti, kecuali dibuka sekolah yang berkelas 6 dan Sekolah Guru 2 tahun (di Poso).

-
- 3) Sejarah Ringkas Lembaga Pendidikan Islam Alchairat, Humas Alchairat Pusat Palu, 1981, hal. 2-3.
 - 4) Wawancara dengan Bapak H. Djafar Lapasere, tanggal 20 September 1983 di Palu.

Yang mengalami perubahan adalah nama-nama sekolah dan kurikulumnya. Sekolah yang berkelas 3 disebut *Futsu Kogakku*, sekolah yang berkelas 6 disebut *Jogy Kogakku* dan sekolah guru 2 tahun disebut *Kyoin Roseinso*. Mata pelajaran yang diutamakan adalah: senam Jepang (*taiso*) menyanyi, pelajaran bahasa Jepang. Sesudah selesai pelajaran di kelas, murid-murid bersama gurunya dikerahkan bekerja di kebun. Dengan demikian tidak diajarkan mata pelajaran untuk pembinaan intelektual. Di dalam diri anak-anak diusahakan ditanamkan sikap mengagung-agungkan Jepang dan kaisarnya. Setiap hari diadakan upacara penghormatan pada bendera dan kaisar Jepang dan menyanyikan lagi kebangsaan Jepang *Kimigayo*. Selain itu setiap murid diharuskan menghafal dan menyanyikan lagu-lagu pemujaan dan memanggakan kekuatan militer Jepang. Karena kegiatan anak-anak setiap hari melulu kegiatan-kegiatan untuk kepentingan Jepang seperti: menyanyi, *taiso* dan baris-berbaris maka anak-anak kurang waktu berhubungan dengan orang tua. Akibatnya rasa hormat kepada orang tua dan jiwa/semangat keindonesiaan semakin berkurang, dan sebaliknya program Jepangnisasi mulai memasuki kehidupan para anak-anak sekolah.⁵⁾

Seperti yang diuraikan di atas bahwa pada zaman kedudukan Jepang, sekolah-sekolah yang bersifat umum tetap berjalan seperti biasa. Sedangkan sekolah-sekolah yang bersifat agama semuanya ditutup. Sekolah pendidikan agama Alchairat yang berpusat di Palu terpaksa menghentikan segala kegiatannya karena dilarang oleh Jepang. Hal itu dilakukan karena Jepang sangat mengawatirkan kalau melalui pendidikan agama dilancarkan propaganda anti Jepang. Pada waktu Jepang menggerebek dan memeriksa buku-buku pelajaran yang ada pada Madrasah Alchairat, ditemukan buku yang berjudul "*Izdhatun Nasyi'in*" karangan Musthafa Algaliyin. Isi buku itu mengajarkan bagaimana cara melawan dan melepaskan diri dari belenggu penja-

5) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, Proyek IDKD, Jakarta, 1982, hal. 34-35.

jahan. Dengan alasan itulah sehingga sekolah Madrasah Al Chairat diperintahkan oleh Jepang supaya ditutup.⁶⁾

Karena perintah penutupan sekolah Madrasah Al Chairat tersebut disertai kekerasan dan harus dilaksanakan oleh pemimpin sekolah itu, maka perintah itu terpaksa dilakukan. Sejak kedatangan Jepang, sekolah itu ditutup hingga pimpinan beserta guru-guru dan 70 orang murid menyingkir secara sembunyi-sembunyi ke luar kota (Desa Pewunu) untuk melanjutkan kegiatan pendidikan tersebut. Demikian pula nasib sekolah-sekolah swasta lainnya mengalami hal yang sama. Sekolah Bala Keselamatan yang ada di Kalawara ditutup, kemudian diganti dengan kursus Pertanian dengan nama *Nomindoyo*. Pendidikan kursus pertanian ini berlangsung selama 6 bulan tiap angkatan dan lulusannya dipekerjakan pada perkebunan bangsa Jepang. Selain itu sekolah-sekolah yang dibina oleh Zending, Muhammadiyah juga diperintahkan ditutup.⁷⁾

Tindakan pemerintah Jepang seperti itu, bukan berarti para pendiri sekolah-sekolah swasta tersebut berdiam diri. Akan tetapi berbagai jalan ditempuh untuk menghidupkan lembaga pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang masih sangat terkebelakang dalam pendidikan. Ada yang secara terang terang langsung menghadap kepada Jepang untuk diberi izin melanjutkan pendidikan, dan ada pula secara diam-diam/sembunyi-sembunyi melaksanakan pendidikan di tempat lain. Tindakan-tindakan tentara Jepang tampaknya membuat pimpinan lembaga pendidikan semakin gigih dan berusaha untuk mendidik putra-putri bangsa untuk menjadi pahlawan dalam menghadapi para penjajah. Demikianlah proses pelaksanaan pendidikan berlangsung sampai pada kedatangan tentara sekutu, dan barulah mengalami perubahan setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu.

6) Sejarah Ringkas Lembaga Pendidikan Islam Alchairaat, op-cit, hal. 6.

7) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, op-cit, hal. 36.

3. Zaman Kemerdekaan

Seperti diketahui bahwa sampai pada zaman Jepang, di kota Donggala dan Palu sudah terdapat sekolah yang berkelas III (tiga), kelas VI (enam) dan di pedesaan hanya terdapat sekolah rakyat umum yang berkelas III (tiga). Dengan demikian anak-anak yang ingin melanjutkan pelajaran ke kelas yang lebih tinggi (tamat kelas VI enam), maka anak-anak harus ke ibu kota kerajaan. Kemudian pada tahun 1947, hampir semua kampung terdapat Sekolah Rakyat umum yang berkelas III (tiga). Dengan demikian semakin banyak tamatan kelas III (tiga) yang melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang berkelas VI (enam) di ibu kota kerajaan. Anak-anak yang diterima pada suatu sekolah dikenakan uang sekolah berkisar antara Rp. 50,- sampai Rp. 100,-.

Karena semakin banyaknya tamatan sekolah kelas VI (enam) yang membutuhkan pendidikan lanjutan, maka pada tahun yang sama (1947) didirikanlah sebuah SMP Negeri di Palu. Pada tahun 1949, SMP Negeri ini mempunyai siswa sebanyak \pm 100 orang yang diasuh oleh tiga orang guru. Walaupun pengasuhannya hanya tiga orang, akan tetapi pada tahun itu juga sudah dapat menamatkan siswa untuk pertama kalinya. Mereka yang dapat memasuki SMP dan menamatkan pelajarannya adalah pada umumnya anak-anak yang berada, terutama anak bangsawan dan bekas raja dari wilayah Sulawesi Tengah.

Selain lembaga pendidikan yang bersifat umum, Sekolah-sekolah Agama bangkit kembali dan berjalan seperti sebelum kedatangan Jepang. Lembaga pendidikan Islam Alchairat yang berkedudukan di Palu, mula-mula hanya berupa usaha pribadi dari pendirinya H. Said Idrus Bin Salim Aldjufri bangkit kembali mengembangkan sayapnya. Pada tahun 1950, pendidikan Islam Al Chairat diasuh oleh sebuah yayasan yang berbadan hukum di bawah taktis Pengurus Besar Al Chairat. Dengan demikian Pendidikan Islam Al Chairaat di Palu semakin besar dan menjadi pusat di Sulawesi dan bahkan Indonesia bagian timur.

Di samping melaksanakan tugas dalam mengembangkan pendidikan juga melaksanakan tugas dakwah agama dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.⁸⁾

Setelah lembaga pendidikan Islam Alchairaat ditangani oleh suatu badan hukum yang disebut Pengurus Besar Alchairaat yang berpusat di Palu, maka pengembangan pendidikan semakin meluas sampai ke pelosok desa dan daerah-daerah lain. Pada tahun 1953 ketika diadakan Muktamar I di Palu, tercatat Madrasah Alchairaat sebanyak 25 buah. Kemudian pada Muktamar II di Ampana tahun 1960, jumlah Madrasah meningkat menjadi 246 buah dan pada tahun 1969 jumlah Madrasah Alchairaat menjadi 425 buah. Ke 425 buah Madrasah Alchairaat itu tersebar ke seluruh wilayah Indonesia bagian Timur seperti: Sulawesi Tengah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya.⁹⁾

Berkembangnya usaha pendidikan Islam Alchairaat di kota Palu dan daerah-daerah lainnya cukup besar artinya dalam memajukan pendidikan, baik pendidikan agama Islam maupun pendidikan umum. Mereka yang menginginkan agar putra-putrinya dapat memperoleh pendidikan agama lebih banyak, ia memasukkan pada pendidikan Islam Alchairaat. Karena banyak sekolah yang dibuka oleh Lembaga Pendidikan Islam Alchairaat, maka tamatan-tamatan PGS, SGA dapat terserap menjadi guru dengan memperoleh gaji dari lembaga pendidikan tersebut.

Selain lembaga pendidikan Islam Alchairaat berusaha memajukan pendidikan, juga Yayasan Pendidikan Muhammadiyah bangkit kembali setelah ditutup pada mula datangnya tentara Jepang. Di Kota Donggala pada waktu itu, Sekolah-sekolah Muhammadiyah cukup berperan dalam hal menegakkan pendidikan, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum. Sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah sama dengan sekolah-sekolah umum. Hanya saja dalam kurikulumnya lebih ba-

8) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, op-cit, hal. 121.

9) Sejarah Ringkas Lembaga Pendidikan Islam Alchairaat, op-cit, hal. 6-7.

nyak jam-jam mata pelajaran keagamaan dibanding dengan jam-jam mata pelajaran umum. Selain itu, pakaian sekolah murid-murid disesuaikan dengan norma-norma keagamaan yang berlaku.

Dapat dikemukakan di sini bahwa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, perkembangan pendidikan di Kota Donggala – Palu dan sekitarnya cukup pesat. Mengenai jumlah sekolah, murid dan guru pada waktu itu (1950-an) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel VI.1
Jumlah Sekolah Agama dan Partikular
di kota Donggala dan Palu tahun 1950-an

No.	Nama Sekolah	Tempat	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	Ibtidaiyah Al' Islam	Donggala	4	225
2.	D D I	Donggala	4	50
3.	Islamiyyah	Donggala	2	125
4.	Islamiyyah	Donggala	3	35
5.	Ibtidaiyah Alchairaat	Palu	10	570
6.	Mu'alimin Alchairaat	Palu	4	100
7.	Alma'arief	Palu (Lolu)	3	150
8.	Alhudatul Islamiyyah	Palu	1	55
9.	I r s y a d	Palu (Biromaru)	2	150
10.	Islamiah Muhammadiyah	Palu	1	52
11.	Far'ulchairaat	Palu	5	50
	J u m l a h		39	1.562

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala.

Berdasarkan dengan tabel VI.1 di atas nampak bahwa sekolah-sekolah Swasta/Partikulir yang ada di Kota Donggala dan Palu seluruhnya adalah sekolah-sekolah Agama Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama maupun yang dibina oleh Lembaga Pendidikan Alchairaat. Selain itu, di daerah pedesaan juga terdapat sekolah-sekolah seperti itu yang jumlahnya cukup banyak. Sedangkan Sekolah-sekolah partikulir yang dibina oleh Bala Keselamatan, zending dan Lembaga-lembaga lain lebih banyak dibuka di daerah pedesaan.

Adapun mengenai sekolah Rakyat yang ada di Kota Donggala dan Palu pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel VI.2 di bawah ini :

Tabel VI.2
Jumlah Sekolah Umum
Di Kota Donggala dan Palu tahun 1950-an

No.	Nama Sekolah	Tempat	Lama Pendidikan
1.	Sekolah Rakyat No. 1	Donggala	6 tahun
2.	Sekolah Rakyat No. 2	Donggala	6 tahun
3.	Sekolah Rakyat No. 3	Donggala	6 tahun
4.	Sekolah Rakyat Loli	Donggala	6 tahun
5.	Sekolah Rakyat Boneoge	Donggala	4 tahun
6.	Sekolah Rakyat Kabonga Besar	Donggala	6 tahun
7.	Sekolah Rakyat No. 1	Palu	6 tahun
8.	Sekolah Rakyat No. 2	Palu	6 tahun
9.	Sekolah Rakyat No. 3	Palu	6 tahun
10.	Sekolah Rakyat No. 4	Palu	6 tahun
11.	Sekolah Rakyat No. 5	Palu	6 tahun
12.	Sekolah Rakyat No. 6	Palu	6 tahun

13.	Sekolah Rakyat No. 7	Palu	6 tahun
14.	Sekolah Rakyat Tatura	Palu	6 tahun
15.	Sekolah Rakyat Lasoani	Palu	6 tahun
16.	Sekolah Rakyat Biromaru No. 1	Palu	6 tahun
17.	Sekolah Rakyat Biromaru No. 2	Palu	6 tahun

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala.

Dalam tabel VI.2 di atas terlihat bahwa dalam tahun yang sama, Sekolah Rakyat lebih banyak di Kota Palu dari pada di Kota Donggala. Hal itu sejalan dengan perkembangan kota yang dialami oleh Palu lebih cepat dari pada Kota Donggala. Mengenai lamanya pendidikan pada tiap-tiap sekolah pada umumnya 6 tahun, kecuali satu sekolah yang berada di Desa BoneOge, Donggala masih memakai 4 tahun. Adapun Sekolah-sekolah Rakyat yang tersebar di pedesaan masih menggunakan sistem lama, yakni 3 atau 4 tahun.

Mengenai jumlah guru dan murid sekolah-sekolah rakyat tersebut di atas, tidak ditemukan datanya. Data mengenai jumlah guru dan murid yang ditemukan adalah secara keseluruhan, baik Sekolah-sekolah yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Data itu dapat dilihat dalam tabel VI.3 di bawah ini:

Tabel VI.3
Jumlah guru, murid pada tiap
Kewedanaan Kabupaten Donggala tahun 1950-an

No.	Kewedanaan	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	Donggala	168	1.988
2.	Palu	231	8.979
3.	Parigi	150	8.341
4.	Toli-Toli	107	5.009
	Jumlah	656	24.317

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan RI Kab. Donggala.

Apabila data dalam tabel VI.3 di atas valid, maka nampak bahwa perbandingan antara jumlah guru dengan murid pada Kota Palu masih berada pada batas yang wajar (1 : 40). Sedangkan di Kota Donggala nampak kelebihan guru, yakni 1 : 12. Adapun di Kewedanaan Toli-Toli dan Parigi sudah berada di atas batas yang wajar, yakni 1 : 60 untuk Parigi dan 1 : 50 untuk Toli-Toli.

B. Keagamaan

1. Golongan pembawa dan pemeluk agama

Jauh sebelum datangnya Hindia Belanda, penduduk Tanah Kaili (Palu-Donggala) telah menganut agama kuno (animisme) sebagai agama peninggalan nenek moyangnya, yakni menyembah kepada arwah-arwah, sungai, pohon-pohon, dewa-dewa dan sebagainya. Kemudian pada abad ke-17, datanglah agama Islam yang dibawa oleh orang Minangkabau (Sumatera), yakni Abdullah Raqie (Dato Karama) bersama keluarganya. Abdullah Raqie bersama 50 orang sanak keluarganya meninggalkan negerinya dengan mempergunakan perahu memasuki Teluk Palu. Rombongan mereka memasuki daratan Palu dengan aman dan membawa segala perlengkapan adat istiadat (seperti Gong, kakula, alat-alat kesenian, bendera, orang-orangan atau ula-ula). Abdullah Raqie pada waktu memasuki Tanah Kaili (Palu) dan selama menyiarkan agama Islam banyak memperlihatkan keajaiban, sehingga ia diberi gelar sebagai orang yang sakti atau keramat yakni "Dato Karama". Ia meninggal di Kampung Baru (Palu Barat) dan dikuburkan di Kampung Lere (dekat bekas rumah raja Palu Barat). Sampai sekarang kuburannya dikenal sebagai kuburan Dato Karama dan sering dikunjungi oleh penduduk.

Proses penerimaan agama Islam di Tanah Kaili berlangsung secara damai berkat kepintaran dan keajaiban Abdullah Raqie. Orang yang pertama memeluk agama Islam di Tanah Kaili adalah raja Palu yang bernama Pue Njidi, kemudian diikuti oleh seluruh rakyatnya.¹⁰⁾ Dengan demikian agama Islam yang pertama memasuki masyarakat Tanah Kaili dan telah berlangsung selama ± satu abad sebelum Hindia Belanda datang di Donggala dan Palu. Golongan masyarakat yang menganut agama Islam pada waktu itu adalah; etnis Kaili, Bugis, Mandar, Banjar, Gorontalo, Makassar, Buol, Banggai, Arab dan Minangkabau.

Kemudian setelah Hindia Belanda memasuki Kota Palu dan Donggala pada tahun 1888, maka ikut pula orang-orang Belanda yang sengaja untuk menyiarkan agama Kristen (Zending). Penyiaran agama Kristen pada waktu terutama ditujukan kepada masyarakat pedesaan dan pegunungan yang masih beragama animisme. Melalui zending-zending, mereka masuk ke pedesaan dan pegunungan sambil mempelajari adat-istiadat, bahasa masyarakat dan mengembangkan agama Kristen. Selain orang-orang Belanda menyiarkan agama Kristen, juga orang-orang Minahasa yang sudah beragama Kristen membantu Belanda menyiarkan agama. Dengan demikian golongan masyarakat yang menganut agama Kristen pada waktu itu adalah: Kulawi, Mori (Poso) dan sebagainya.

Selain agama Islam dan Kristen, juga agama Hindu/Budha telah ada pada waktu Hindia Belanda menguasai Donggala dan Palu. Pembawa agama Hindu/Budha adalah transmigran dari Jawa dan orang-orang Bali. Sedangkan orang-orang Cina sebahagian menganut agama Budha dan sebahagian lainnya masih menganut agama nenek moyangnya.¹¹⁾ Setelah agama Islam, Kristen dan Budha/Hindu dianut oleh masyarakat di Kota Donggala dan Palu, maka secara berangsur-angsur kepercayaan

10) Geografi Budaya Daerah Sul-Tengah, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Palu, 1977/1978, halaman 118-122.

11) Geografi Budaya Daerah Sulawesi Tengah, Op-cit, hal. 123-124.

animisme ditinggalkan. Namun karena kepercayaan animisme sudah berakar dalam jiwa sebahagian penduduk sehingga pelaksanaan agama-agama yang baru diterimanya masih sering dicampur adukkan.

2. Kegiatan-kegiatan dan pengembangan agama

Seperti uraian di atas bahwa setelah agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha masuk ke dalam kehidupan masyarakat Donggala dan Palu, maka kepercayaan animisme berangsur-angsur ditinggalkan. Hal itu dapat dicapai berkat usaha para dai, ulama dan pendeta melancarkan kegiatan-kegiatan penerangan agama. Kegiatan-kegiatan penerangan keagamaan itu merupakan pelita yang menerangi jiwa penduduk yang telah lama digelapi oleh pengaruh kepercayaan animisme menuju kepada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Para pemimpin keagamaan bersama pemerintah berusaha membangunrumah-rumah ibadah, baik berupa mesjid, langgar maupun berupa gereja. Penyiaran agama dilakukan melalui ceramah-ceramah, pengajian, ibadah shalat dan acara baktian di gereja.

Selama pemerintahan Hindia Belanda, kegiatan-kegiatan dan pengembangan agama tetap berjalan. Kecuali bagi penduduk yang dipekerjakan (kerja paksa) pada pembuatan-pembuatan jalan raya, irigasi, jembatan tidak diberi kesempatan melaksanakan ibadah sholat. Demikian pula bagi pemuka-pemuka agama Islam tetap diawasi oleh mata-mata Belanda agar tidak melakukan propaganda kepada masyarakat untuk mengadakan perlawanan. Sebaliknya pemuka-pemuka agama Kristen mendapat peluang yang baik dan bebas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyiaran agama, sehingga pada zaman Belanda inilah merupakan zaman keemasan penyiaran agama Kristen melalui misi Zending di Donggala dan Palu.^{1 2)}

12) Wawancara dengan Bapak Andi Cella (anggota DPRD Tkt. II Donggala) pada tanggal 10 Januari 1984 di Palu.

Kemudian setelah Belanda menyerah kepada tentara Jepang pada tahun 1942, maka kegiatan-kegiatan pengembangan keagamaan mengalami hambatan dari pemerintah Jepang, baik kegiatan agama Islam, Hindu, Budha dan terutama agama Kristen. Selama pendudukan bala tentara Jepang, pendidikan dan pengajaran agama hanya diperbolehkan diberikan kepada anak-anak, yang berumur 16 tahun ke atas. Penyampaian ceramah-ceramah agama tidak menyinggung-nyinggung masalah politik dan pemerintahan. Tidak boleh membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah perang dan sebagainya.

Khusus golongan raja-raja dan bangsawan tidak terlalu ditekan dalam melaksanakan agamanya, terutama bagi mereka yang mau bekerja sama dengannya. Hal itu merupakan taktik untuk mengambil hati bagi raja-raja dan bangsawan agar dapat lebih mudah menguasai rakyat. Yang mengalami hambatan dan siksaan hanya bagi mereka yang dicurigai sebagai mata-mata tentara sekutu. Mereka ditangkap dimasukkan penjara dan bahkan ada yang dibunuh melalui pancungan. Demikian pula penduduk yang dipekerja paksakan tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Sedangkan para pemimpin agama Kristen lebih banyak mengalami hambatan. Hal itu disebabkan karena selain agama Kristen merupakan peninggalan Belanda, juga para penganut agama Kristen pada umumnya dianggap mata-mata tentara sekutu dan NICA. Kegiatan-kegiatan gereja sangat diawasi dan hanya diperbolehkan menyanyi dan berdoa dalam acara gereja.

Selama pendudukan Jepang, telah beberapa kali mengeluarkan peraturan tentang larangan kegiatan-kegiatan keagamaan, antara lain:

- a. Peraturan tanggal 13 Desember 1942 mengatakan bahwa kebaktian hanya boleh dilakukan pada hari minggu, dan dalam memberi khotbah tidak boleh menyinggung politik dan perang.

- b. Peraturan tanggal Manado, 24 Maret 1943 mengatakan bahwa pengajaran agama hanya boleh diberikan semata-mata kepada orang-orang yang berumur 16 tahun ke atas di mesjid atau gereja dan hanya boleh diajarkan oleh guru-guru agama.¹³⁾

Demikianlah kegiatan-kegiatan keagamaan mengalami hambatan-hambatan selama pendudukan tentara Jepang. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, maka kegiatan-kegiatan pengembangan agama dimulai kembali. Para pemimpin agama secara aktif kembali menyiarkan agama masing-masing baik agama Islam, Hindu, Budha dan terutama agama Kristen. Apalagi karena agama Kristen adalah peninggalan Belanda pada zaman penjajahannya dahulu.

Pada tahun 1950-an, kegiatan dan pengembangan agama Islam lebih meningkat, baik dalam pengertian agama sebagai ibadah maupun agama dalam arti sosial. Agama dalam arti ibadah adalah mencakup segala kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan Tuhan dan nabi-nabi, seperti: melaksanakan rukun Islam, melakukan pengajian dan da'wah, melakukan lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, merayakan Maulid Nabi Muhammad, merayakan Isra Mi'raj. Sedangkan agama dalam arti sosial adalah segala kegiatan keagamaan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah kemanusiaan, seperti: kegiatan-kegiatan upacara kematian, kunjung-mengunjungi sesudah lebaran, membangun sekolah-sekolah agama, membangun mesjid dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang selalu melibatkan unsur-unsur keagamaan. Demikian pula dalam kegiatan agama Kristen, agama dalam arti ibadah adalah berupa: perayaan tahun baru, perayaan wafatnya Isa Almasih, perayaan hari kebangkitan, kenaikan Isa Almasih, Natal 25 Desember dan kebaktian-kebaktian lainnya di gereja.¹⁴⁾

13) Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sul-Tengah, Op-cit, hal. 38-40.

14) Geografi Budaya Sulawesi Tengah, Op-cit, hal. 132-151.

3. Jumlah mesjid, gereja dan pemeluknya.

Seperti diketahui bahwa berkembang dan siarnya suatu agama sangat ditentukan oleh pemeluknya, prasarana, sarana, situasi dan kondisi pada waktu tertentu. Pada zaman Hindia Belanda, pemeluk agama Islam di Kota Donggala dan Palu sudah cukup banyak, yakni diperkirakan 90% penduduk beragama Islam. Namun pada waktu itu, prasarana peribadatan seperti mesjid masih sangat kurang. Diperkirakan bahwa pada tahun 1900 baru ada 2 (dua) buah mesjid di Palu dan 1 (satu) buah mesjid di Donggala. Selain itu terdapat pula beberapa buah langgar. Sedangkan bangunan gereja belum ada, kecuali di pedesaan di mana misi zending berkedudukan, seperti Desa Kalawara dan Desa Kulawi.¹⁵⁾

Kurang berkembangnya prasarana peribadatan agama Islam pada waktu itu mungkin disebabkan oleh karena pemeluk agama Islam masih banyak memiliki kepercayaan animisme. Selain itu masyarakat dan para pemimpin agama berada dalam keadaan terjajah sehingga tidak leluasa membangun prasarana peribadatan dan melakukan ceramah-ceramah agama. Kemudian pada akhir masa penjajahan Hindia Belanda, diperkirakan jumlah mesjid pada kedua kota tersebut sudah bertambah. Demikian pula bangunan gereja. Hal itu dimungkinkan karena adanya organisasi sosial keagamaan seperti: Alchiraat, Muhammadiyah, Bala Keselamatan yang giat mengorganisir penyiaran agama.

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang, pengembangan kegiatan keagamaan praktis kurang mengalami kemajuan. Hal itu disebabkan karena Jepang senantiasa mengeluarkan peraturan tentang larangan melaksanakan ceramah keagamaan.

Namun setelah zaman kemerdekaan, kegiatan pembangunan dimulai kembali, termasuk pembangunan di bidang keagamaan. Apalagi pada waktu itu Belanda dalam bentuk NICA datang

15) Wawancara dengan Bapak Simba Laiya Poleganti (anggota dewan hadat), tanggal 5 Oktober 1983 di Palu.

ke tempat ini dengan membonceng pada tentara sekutu, maka agama Kristen mengalami kemajuan yang pesat.

Pada tahun 1950-an, pengembangan kegiatan keagamaan semakin meningkat, baik dalam hal pembangunan sarana dan prasarana peribadatan maupun dalam hal pengamalan ajaran agama itu sendiri. Hal itu dapat dilihat betapa banyaknya sekolah-sekolah agama (agama Islam) yang dibangun oleh Partai dan organisasi sosial Islam. Selain itu bangunan-bangunan Mesjid dan langgar serta gereja nampak semakin banyak, baik di Donggala maupun di Palu. Mengenai banyaknya bangunan peribadatan pada waktu itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI.4
Jumlah Mesjid, Langgar dan Gereja
pada tiap-tiap Kecamatan dalam tahun 1950-an

No.	Kecamatan	Mesjid	Langgar	Gereja
1.	Donggala (Banawa)	67	12	8
2.	Palu	29	8	6
3.	Sigi – Dolo	33	6	7
4.	Kulawi	4	—	6
5.	Parigi	16	—	7
6.	Moutong	29	14	8
7.	Tinombo	20	16	—
8.	Toli-Toli	43	5	2
J u m l a h		241	61	44

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan R.I. Kabupaten Donggala.

Berdasarkan dengan tabel di atas, nampak bahwa kegiatan keagamaan sangat maju di Kota Donggala (79 rumah ibadah) untuk Islam dan 8 buah gereja untuk agama Kristen. Sedangkan

di Kota Palu terdiri atas 38 buah rumah ibadah Islam dan 6 buah gereja. Demikian pula kecamatan-kecamatan lainnya, juga mengalami kemajuan dalam hal pengembangan keagamaan.

C. Organisasi sosial, pendidikan dan keagamaan

Pada zaman pemerintahan Belanda, belum banyak organisasi yang muncul, kecuali Serikat Islam, Persatuan raja-raja dan yang bersifat perkumpulan seperti: perkumpulan kematian, perkawinan, pengajian dan sebagainya. Sedangkan pada zaman pendudukan Jepang, semua organisasi dilarang melakukan kegiatan karena dianggap dapat menghimpun massa untuk mengadakan perlawanan. Kemudian sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah organisasi-organisasi sosial, pendidikan, keagamaan dan politik bangkit kembali. Pada tahun 1950-an, organisasi-organisasi seperti itu tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Hal itu dapat dilihat pada tabel, di bawah ini:

Tabel VI.5
Organisasi Sosial dan Buruh
di kota Donggala dan Palu

No.	Nama Organisasi	Status/Tempat
1.	Serikat Buruh Kementerian Penerangan	Palu
2.	Serikat Buruh PU	Palu
3.	Serikat Sekerja BRI	Palu
4.	Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri	Palu
5.	Serikat Buruh Jawatan Pertanian	Palu
6.	Serikat Buruh Indonesia	Palu
7.	Persatuan Sopir	Palu
8.	Persatuan Kematian	Palu
9.	Serikat Buruh Kopra Indonesia	Donggala
10.	Serikat Buruh Islam Indonesia	Donggala
11.	Serikat Buruh Islam	Donggala
12.	Serikat Buruh Barsa	Donggala
13.	Serikat Buruh Koninklijkevaart Mij.	Donggala

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan R I Kabupaten Donggala.

Organisasi-organisasi tersebut di atas bergerak dalam bidang sosial ekonomi, yakni berusaha mengorganisasikan diri dalam suatu wadah untuk memupuk persatuan dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan-kegiatan semacam itu tentu dapat dinilai sebagai suatu pertanda dinamika sosial masyarakat Donggala dan Palu.

Selain organisasi sosial dan buruh di atas, terdapat pula organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang keagamaan. Para pemuda menghimpun diri dalam suatu wadah untuk mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan sosial dan utamanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam tabel berikut ini dapat dilihat jumlah organisasi pemuda yang ada di Palu.

Tabel VI.6
Banyaknya Organisasi Pemuda

No.	Nama Organisasi	Status/Tempat
1.	Pemuda Muslimin Indonesia	Cabang Palu
2.	Pemuda Demokrat	Cabang Palu
3.	G P I I	Cabang Palu
4.	S i a p	Cabang Palu
5.	S i a p	Cabang Biromaru
6.	Pandu Islam Indonesia	Cabang Palu
7.	Pandu Rakyat Indonesia	Cabang Palu
8.	Pemuda Sosialis Indonesia	Cabang Palu

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan R I Kabupaten Donggala.

Demikian pula organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik berkembang dengan pesatnya, baik di Donggala maupun di kota Palu. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.7
Jumlah Partai Politik di Donggala
dan Palu tahun 1950-an

No.	Nama Organisasi	Status	Tempat
1.	PSII	Resort Komisaris	— Palu
2.	PSII	Cabang	— Palu
3.	PSII	Cabang	— Donggala
4.	PSII	Cabang	— Tiap-tiap Kecamatan Wilayah Donggala dan Palu
5.	Masyumi	Dewan Pimpinan Kabupaten	— Palu
6.	Masyumi	Cabang	— Palu
7.	Masyumi	Cabang	— Donggala dan beberapa Kecamatan lainnya.
8.	PNI	Cabang	— Palu
9.	PNI	Cabang	— Donggala, Parigi dan Kaleke
10.	Parkindo	Cabang	— Palu, Donggala Parigi, Kulawi
11.	NU	Cabang	— Kabupaten, Palu, Tawaeli
12.	PKR	Cabang	— Palu, Donggala, Parigi
13.	PKI	Cabang	— Palu dan Kabupaten
14.	Partai Katolik	Cabang	— Palu

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan R I Kabupaten Donggala.

Partai-partai politik tersebut selain mengurus masalah politik, juga giat dalam usaha mengembangkan agama masing-masing, serta memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Organisasi-organisasi politik ini banyak berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan tidak sedikit anggotanya gugur dalam membela tanah air.

Dalam keadaan sibuk-sibuknya kaum pemuda dan Bapak-bapak dalam mempertahankan kemerdekaan, maka kaum ibu juga tidak ketinggalan. Mereka menghimpun diri dalam organisasi wanita seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel VI.8
Jumlah Organisasi Wanita di
Donggala dan Palu tahun 1950-an

No.	Nama Organisasi	Tempat
1.	Isteri Sadar	Palu.
2.	Ibu Imanuel	Palu
3.	W a p s i i	Palu
4.	Muslimat	Palu
5.	Gerwani	Palu
6.	Ikatan Wanita Islam	Palu
7.	Wanita Demokrat	Palu
8.	Wanita Biromaru	Palu
9.	Perkumpulan Wanita Donggala	Biromaru
10.	Dan lain-lain	Donggala

Sumber: Buku Tanah Kaili, Jawatan Penerangan R I Kabupaten Donggala.

Selain organisasi-organisasi dan Partai di atas, juga terdapat organisasi keagamaan dan pendidikan. seperti: Alchairaat, Muhammadiyah, Bala Keselamatan dan sebagainya yang cukup besar peranannya dalam pengembangan pendidikan dan keagamaan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat Donggala dan Palu.

K. E. I. M. P. U. T. A. N.

BAB VII KESIMPULAN

Penelitian dan penulisan Sejarah Sosial Kota Donggala dan Palu merupakan langkah awal penulisan Sejarah Sosial di Sulawesi Tengah. Dengan demikian dapat dimaklumi apabila tulisan ini belum dapat memenuhi harapan kita semua. Hal itu disebabkan karena kurangnya dokumen yang dapat ditemukan mengenai keadaan sosial - budaya dan ekonomi Kota Donggala dan Palu dalam kurun waktu 1900 s/d 1950-an. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam karya tulis ini, diadakanlah wawancara mendalam kepada orang-orang tua yang mengetahui atau pernah mengalami keadaan pada waktu itu.

II

Tanah Kaili yang kemudian dikenal sebagai Kota Donggala dan Palu, berada pada pesisir Teluk Palu. Iklimnya cukup panas bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal itu disebabkan karena selain curah hujannya sangat rendah, juga persis berada pada garis khatulistiwa. Dengan demikian wilayah Donggala dan Palu mendapat sinar matahari yang cukup lama setiap hari. Kota Donggala memiliki tanah yang berbatu-batu, berkapur, berbukit-bukit dan pusat kotanya berada pada pesisir

pantai (Pelabuhan Laut Donggala). Sedangkan keadaan tanah Kota Palu merupakan suatu lembah (lembah Palu) dengan memiliki kesuburan yang memadai.

Donggala dan Palu mula-mula dibuka oleh Hindia Belanda pada tahun 1888, setelah menaklukkan raja Banawa dan raja Palu. Pada waktu itu, Kota Donggala termasuk kota maritim dan kota agraris. Sedangkan kota Palu dapat digolongkan sebagai kota agraris. Sumber penghidupan utama penduduk adalah pertanian, utama pertanian kelapa.

Komposisi penduduk beraneka ragam, baik suku-suku bangsa asing maupun suku-suku bangsa pribumi. Suku-suku asing terdiri atas: Hindia Belanda, Eropa, Cina dan Arab. Sedangkan suku-suku bangsa pribumi terdiri atas: Kaili (penduduk asli), Bugis, Makassar, Mandar, Gorontalo, Jawa, Minahasa, Banjarmasin, Minangkabau dan sebagainya. Keaneka ragaman kelompok etnis tersebut membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk dapat mempercepat mobilitas sosial kehidupan penduduk dalam bidang-bidang tertentu. Pada tahun 1930, penduduk Kota Donggala dan sekitarnya berjumlah \pm 54.056 jiwa. Sedangkan penduduk Kota Palu dan sekitarnya berjumlah \pm 69.605 jiwa. Pertumbuhan penduduk diperkirakan 1,5% untuk Kota Donggala dan 2,5% untuk Kota Palu.

Mobilitas kedua kota itu terdapat perbedaan. Sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai masuknya Bala tentara Jepang, Kota Donggala lebih mobilitas dari pada Kota Palu. Kemudian setelah Bala tentara Jepang menyerang benteng pertahanan Belanda di Donggala, maka Kota Donggala menjadi hancur. Dengan demikian banyak penduduk yang pindah ke Kota Palu. Dan mulai saat itu Kota Palu berkembang dengan pesatnya jauh meninggalkan Kota Donggala. Terlebih-lebih setelah dijadikan ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1960-an. Alat transportasi yang paling strategis untuk mencapai Kota Donggala dan Palu pada waktu itu (1900s/d 1950) adalah angkutan laut, baik menggunakan kapal-kapal maupun dengan perahu-perahu.

Hal itu dimungkinkan karena di Kota Donggala terdapat Pelabuhan Laut (Pelabuhan Donggala) yang merupakan satu-satunya pelabuhan transit kapal-kapal di Sulawesi Tengah, baik untuk hubungan dalam negeri maupun hubungan untuk luar negeri.

Sistem pemerintahan yang berlaku dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1950-an adalah tradisional-kolonial, kolonial, dan kolonial nasional. Ketika Hindia Belanda berkuasa, raja-raja masih diakui kedudukannya. Hanya saja kekuasaannya dikurangi dan mereka sebagai pembantu Pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1905 sampai 1942, Donggala dan Palu diperintah oleh residen Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado. Kemudian setelah Hindia Belanda menyerah, maka mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 Donggala dan Palu sepenuhnya diperintah oleh Jepang yang berkedudukan di Manado dengan pangkat *kanrikan*. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan yang bertepatan dengan menyerahnya Jepang, maka pemerintahan mulai dikendalikan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Walaupun pada waktu itu tentara Sekutu bersama NICA masih ikut campur tangan. Pada tahun 1951, Sulawesi Tengah terdiri atas dua kabupaten, yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Palu. Kemudian pada tahun 1953, kabupaten Palu di-ubah menjadi Kabupaten Donggala dengan ibu kota Palu.

Kegiatan-kegiatan politik pada zaman pemerintahan Belanda sampai pada zaman pemerintahan Jepang tidak menonjol. Hal itu disebabkan karena kesadaran politik pada waktu itu belum banyak dimiliki oleh penduduk. Dan lagi pula selalu mendapat hambatan dari para penjajah. Pada waktu itu, organisasi politik yang ada hanya Serikat Islam (SI). Kemudian oleh Belanda dibentuk organisasi Persatuan Raja untuk menandingi SI. Kemudian pada zaman Jepang, kegiatan politik sama sekali tidak ada; karena Jepang melarang semua kegiatan yang bermotif politik dan bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan RI, yaitu pada tahun 1950-an barulah

kekuatan-kekuatan politik muncul kembali seperti: PSII, Masyumi, PNI, Parkindo, NU, PKI, Partai Khatolik dan sebagainya.

III

Seperti halnya dengan kota-kota lain di Indonesia bahwa masing-masing memiliki penduduk asli selain dari pada pendatang. Kota Donggala dan Palu memiliki pula penduduk asli, yakni *suku bangsa Kaili*. Mereka memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain. Namun setelah banyak suku bangsa yang berdomisili di wilayah itu, maka kebudayaan penduduk asli (Kaili) mengalami perubahan. Pola tempat tinggal, sistem pelapisan sosial dan sistem kekerabatan memiliki banyak persamaan dengan suku bangsa Bugis.

Di dalam sistem pemerintahan tradisional suku Kaili, dikenal istilah "*To Malanggai*", yaitu orang pemberani yang dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat. Dengan terjadinya perkawinan antara To Malanggai dengan bangsawan Bugis menyebabkan lahirnya dua sistem pemerintahan tradisional pada zaman berikutnya, yakni: zaman To Manru dan Zaman Merdeka. Dari hasil perkawinan ini pula pada akhirnya munculnya stratifikasi sosial masyarakat Kaili, yakni: (1) magau (raja), (2) madika (bangsawan), (3) to dea (orang biasa), dan (4) wata (hamba). Beberapa kerajaan lainnya seperti: Kerajaan-kerajaan Sigi, Kulawi, Parigi, Tawaeli, Biromaru, Moutong mengenal stratifikasi sosial yang sama. Hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka adalah masih memiliki hubungan kekerabatan antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Keturunan raja-raja dan bangsawan inilah yang menguasai pemerintahan tradisional sampai pada kedatangan Hindia Belanda.

IV

Kedatangan Hindia Belanda berkuasa di Tanah Kaili semakin memberi peluang kepada golongan bangsawan untuk tetap

bertahan pada lapisan sosial yang teratas (raja). Dengan dibukanya sekolah-sekolah umum oleh Belanda, memberi kesempatan kepada anak-anak bangsawan untuk memperoleh pendidikan dan sekaligus dapat memperoleh pekerjaan dalam pemerintahan. Sampai sekarang masih nampak kecenderungan bahwa golongan bangsawan tetap ingin mempertahankan kekuasaannya dan tidak memberi kesempatan golongan lapisan bawah atau orang-orang dari luar daerahnya untuk menduduki jabatan penting. Dan bahkan dari golongannya sendiri sering terjadi perebutan kekuasaan. Dengan sifat yang demikian, Hindia Belanda semakin leluasa melancarkan politik adu-domba sehingga terjadi permusuhan di antara mereka.

Terlepas dari faktor keuntungan yang ditimbulkan oleh keberadaan Hindia Belanda seperti pembuatan jalan, jembatan dan irigasi; banyak pula hal-hal yang merugikan masyarakat. Hal-hal yang merugikan masyarakat setempat seperti: politik adu-domba, perampasan kekuasaan dan harta, tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan akhirnya merupakan penyebab terjadinya aksi perlawanan masyarakat. Aksi-aksi perlawanan masyarakat Kaili yang secara besar-besaran pada waktu itu adalah: Perang Donggala, perang Sigi dan perang Kulawi. Dampak yang ditimbulkan karena adanya perang tersebut ada berbagai macam. Pertama, semakin tajamnya jurang antara golongan yang pro dan kontra Belanda. Kedua, aksi penjajahan Belanda semakin mengganas. Ketiga, keadaan ekonomi semakin menurun. Dan keempat, munculnya gelar pahlawan dan penghina di kalangan masyarakat setempat.

Dalam keadaan sosial ekonomi yang kacau, datanglah Bala Tentara Jepang menyerbu mengalahkan Belanda dan kemudian melancarkan aksi penjajahannya yang lebih kejam lagi. Ketika Jepang berkuasa, raja tetap diakui kedudukannya dan bertugas membantu Jepang dalam melaksanakan penjajahannya. Para raja hanya sekedar lambang belaka dan tidak memiliki wewenang dalam mengatur soal-soal politik, ekonomi dan pendidikan

masyarakat. Selama pendudukan Jepang, masyarakat Tanah Kaili khususnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka dikerahkan untuk bekerja paksa selama berpuluh-puluh hari dengan perlakuan tak berperikemanusiaan. Di lain pihak semua hasil pertanian masyarakat adalah milik Jepang untuk kepentingan perang. Sedangkan masyarakat hanya diperbolehkan makan jagung, atau ubi-ubian. Demikian pula kebutuhan hidup lainnya yang dianggap luks tidak boleh dipakai oleh penduduk. Sedangkan para pemimpin rakyat yang berusaha membela tanah air dan mempersiapkan kemerdekaannya banyak yang ditangkap dan bahkan ada yang dibunuh, terutama dari anggota Serikat Islam.

Pada tahun 1944, Jepang masih giat-giatnya menjalankan penjajahannya dan bahkan merencanakan ingin membunuh semua raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat. Namun rencana itu belum dilaksanakan, datang serangan tentara Sekutu bersama NICA menyebabkan tentara Jepang menjadi kalang kabut dan berpura-pura mengambil hati penduduk setempat agar mendapat bantuan dalam melawan Sekutu. Karena posisi tentara Jepang semakin terdesak, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 diumumkan melalui selebaran bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Dua hari sesudah Jepang menyerah, yakni tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 15.00 masyarakat Sulawesi Tengah umumnya dan Donggala—Palu khususnya menerima berita tentang kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno—Hatta di Jakarta. Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut disambut baik oleh masyarakat dan terutama para anggota Gerakan Merah Putih yang pernah dibekukan kegiatan-kegiatannya oleh Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, para tokoh Republikan bersama anggota-anggota Gerakan Merah Putih giat menggalang persatuan dan melakukan pertemuan-pertemuan membentuk Organisasi Laskar untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diperolehnya. Bersamaan de-

ngan itu pula, pada tanggal 21 Agustus 1945 Jepang yang sudah menyerah; mengadakan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada raja-raja. Dengan demikian pemerintahan diambil alih sepenuhnya oleh raja-raja. Pada akhir tahun 1945, mendaratlah tentara NICA di Parigi dan Palu. Kedatangan tentara NICA itu disambut baik oleh para raja yang memegang pemerintahan pada waktu itu tanpa memikirkan akibat selanjutnya. Walaupun sebelum tentara NICA mendarat di Parigi dan Palu, anggota Republikan dan Gerakan Merah Putih telah mengirim surat kepada Raja-raja agar menentang kedatangan tentara NICA tersebut. Setelah tentara NICA kembali menduduki Donggala dan Palu, segera terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh Republikan. Penangkapan pertama dilakukan pada tahun 1946, kemudian yang kedua terjadi pada tahun 1947. Semua tokoh-tokoh Republikan dan anggota Gerakan Merah Putih yang ditangkap dibawa ke Manado untuk dipenjarakan.

Demikianlah keganasan tentara Sekutu bersama NICA berlangsung sampai pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1949, keadaan mulai menjadi aman kembali setelah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah. Anggota DPRD inilah bersama-sama organisasi-organisasi yang ada berjuang agar Sulawesi Tengah yang tergabung dalam NIT supaya digabungkan kembali dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Mei 1950, organisasi politik, raja-raja bersama seluruh rakyat mengadakan rapat raksasa menghasilkan sebuah maklumat tentang pelepasan Sulawesi Tengah dari negara NIT. Dengan maklumat itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 tergabunglah kembali Sulawesi Tengah ke dalam Negara Republik Indonesia.

Sejak kedatangan Hindia Belanda sampai pada zaman Kemerdekaan Republik Indonesia telah banyak terjadi perubahan, baik perubahan dalam bentuk fisik maupun non fisik (perubahan nilai). Dengan dibukanya jalan-jalan raya oleh Belanda menyebabkan terjadinya perubahan pola pemukiman penduduk, baik dalam hal arah atau bentuk rumah. Penduduk tidak lagi

terikat bahwa rumah harus menghadap ke timur atau ke barat, tetapi tergantung arah jalan di mana mereka membangun rumah. Demikian pula bentuk rumah secara berangsur-angsur meninggalkan bentuk rumah panggung dan beralih kepada bentuk rumah batu (rumah tembok). Hal itu bukan hanya di kota saja terjadi, akan tetapi sampai ke pedesaan.

Dari segi pelapisan sosial juga nampak terjadi perubahan, yakni golongan hamba tidak dikenal lagi. Dan bahkan jarak pemisah antara golongan bangsawan dengan golongan orang biasa tidak terlalu nampak lagi, terutama pada zaman kemerdekaan. Hal itu terjadi akibat pengaruh pendidikan masyarakat semakin meningkat pula. Selain itu, golongan bangsawan sudah banyak yang melakukan perkawinan dengan golongan orang biasa. Mengenai hubungan sosial nampak bahwa kelompok etnis Bugis lebih akrab dengan kelompok etnis Kaili dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Sebaliknya terjadi hubungan yang agak renggang antara etnis Kaili dengan etnis Minahasa. Hal itu disebabkan karena etnis Bugis dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan dan banyak memberi pengalaman dalam hal-hal bertani. Sebaliknya etnis Minahasa merupakan tangan kanan orang Belanda dalam menjalankan pemerintahannya.

Dengan bentuk hubungan sosial yang demikian, ternyata bahwa unsur-unsur budaya kedua kelompok etnis itu banyak mempengaruhi kebudayaan etnis Kaili. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa etnis Kaili seakan-akan kehilangan kepribadian aslinya, kemudian yang nampak adalah perpaduan antara kedua kebudayaan tersebut.

Penduduk Tanah Kaili pertama-tama mengenal sekolah pada tahun 1920-an, yaitu ketika Belanda membuka dua tingkatan sekolah yang disebut "*Volkschool*" dan "*Vervolkschool*". Bagi orang-orang Kaili, utamanya golongan bangsawan, kedua jenjang pendidikan itu cukup berarti baginya. Hal itu nampak dalam masyarakat dari tahun 1920-an sampai dengan tahun

1950-an adalah orang-orang yang telah memperoleh pendidikan dari sekolah itu.

Terlepas dari sifat penjajahnya Belanda, maka pembukaan sekolah-sekolah tersebut di atas merupakan peletakan batu pertama bagi penduduk Tanah Kaili untuk memperoleh pendidikan dan jabatan. Peletakan batu pertama inilah yang menjadi landasan dibukanya lembaga-lembaga pendidikan lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1950-an, nampak bahwa perkembangan pendidikan di Tanah Kaili cukup menanjak, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan. Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat yang didirikan pada tahun 1930, merupakan salah satu lembaga yang sangat berjasa dalam meningkatkan pendidikan di Tanah Kaili. Dan bahkan ikut membawa nama baik Sulawesi Tengah umumnya dan Donggala-Palu khususnya.

Dalam kehidupan keagamaan, bagi penduduk asli Tanah Kaili adalah suatu kebutuhan hidup yang wajib. Apalagi setelah mereka menerima agama Islam sebagai agamanya, maka mereka merasakan suatu hidup baru. Kedatangan agama Islam yang dibawa oleh orang Sumatera merupakan pembawa sinar terang bagi penduduk Tanah Kaili. Demikian pula halnya dengan agama-agama lain yang datang kemudian, seperti Kristen, Hindu dan Budha. Kedatangan agama-agama itu menyebabkan faham animisme secara berangsur-angsur ditinggalkan oleh masyarakat, dan sebaliknya mengamalkan agama baru yang mereka terima yang dibawa oleh suku-suku bangsa pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, *Kota Masa Depan*, Erlangga, Jakarta, 1979
- Djaruddin Abdullah, HM. *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Sulawesi Tengah, Palu, 1975.
- F.A. Soetjipto, *Sejarah Sosial Kota*, Panitia Pengarah Penulisan Sejarah Sosial, IDSN, Jakarta, 1983.
- Kuntowijoyo, *Beberapa Model Penulisan Sejarah Sosial*, IDSN, Jakarta, 1983
- J. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1947
- M. Melattee Brower, *60 Tahun Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah*, Bala Keselamatan Pusat, Bandung, 1977
- P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga*, Bhratara, Jakarta, 1979
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1978
- IDKD, *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Ak-*

- tif Masyarakat Terhadap Lingkungan Daerah Sulawesi Tengah, Palu.*
- IDKD, 1982 *Perkampungan di Kota sebagai Wujud Pola Adaptasi Daerah Sulawesi Tengah, Palu.*
 - IDKD, 1982 *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, Dep. P dan K, Jakarta.*
 - Humas Alchiraat, 1981 *Sejarah Ringkas Lembaga Pendidikan Islam Alchiraat, Pengurus Besar Alchiraat Pusat, Palu.*
 - Tim Peneliti, 1981 *Kemungkinan Kota Donggala ditingkatkan menjadi kota Administratif, Palu.*
 - PEMDA, 1981 *Rencana Pengukuhan dan Peme-taan Hutan Sulawesi Tengahh, Palu.*
 - Jawatan Penerangan, 1956 *Tanah Kaili, Jawatan Penerangan Kab. Donggala, Palu.*
 - Universitas Indonesia, 1981 *Dasar-dasar Demografi, Lembaga Demografi Fak. Ekonomi Univer-sitas Indonesia, Jakarta.*
 - Voorloopige Uithomsten, 1930 *Preliminary Results of Census of 1930 in the Netherlands East, Departemenst Van Landbouw, Batavia.*
 - M. Yasin, 1971 *Memori Gubernur Propinsi Sula-wesi Tengah, Kantor Gubernur Tingkat I Sulawesi Tengah, Palu.*

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : M. Djafar Abdullah
Umur : 70 tahun
Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin No. 26 Palu
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Jawatan Pajak Daerah Kabupaten Donggala.

Kegiatan :

- Bekas Sekretaris Laskar Merah Putih Sigi-Dolo.
- Sekretaris Umum Gabungan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia Sulawesi Tengah (GAPPRIST) 1947-1949.
- DPRDS Daerah Donggala di Palu 1952-1955.
- Ketua I Persatuan Wreda Tama RI di Palu 1974 - sekarang.

Hasil Karya : "Mengenal Tanah Kaili" dan "Adat Istiadat di Lembah Kaili" diterbitkan oleh BAPPARDA Sulawesi Tengah

2. Nama : Rusdi Toana, Drs..
Umur : 52 tahun
Alamat : Palu
Pekerjaan : Dekan Fakultas Sospol Universitas Tadulako Palu.

Kegiatan :

- Anggota tentara Pelajar ketika masih belajar di SMA Yogyakarta.
- Aktif menulis dalam majalah/surat kabar pada waktu di Yogyakarta antara lain majalah HMI Media, Hikmah, Panji Masyarakat, Suara Umat dan lain-lain.
- Di samping sebagai dosen juga sebagai wartawan.
- Pernah memimpin majalah mingguan "Mercuri Suar" suara Muhammadiyah di Palu.

3. Nama : Horas Siregar
Umur : 67 tahun
Alamat : Palu
Pekerjaan : Wartawan
Kegiatan : Berulang-ulang menjadi pimpinan surat kabar/majalah

- 1932-1933 Kota Baru (pulau Laut) memimpin bulanan "Panggi Waktu" dicetak di Surabaya. Karena memuat lagu Indonesia Raya dan memuat pidato Bung Karno di Yogyakarta ia dituduh menghasut rakyat untuk memberontak pada pemerintah Hindia Belanda.
- Akhir tahun 1933 pindah ke Samarinda menerbitkan mingguan "Panggilan Waktu".
- 1933 diproses di Samarinda karena ia memuat pidato Bung Karno di Yogyakarta ketika masih di Kota Baru, ia dipenjarakan setahun di Sukamiskin, Bandung. Karena memuat karangan berjudul "Impian Indonesia Merdeka" tulisan dari Aswiyantoyo (Dawat Setitik) ia dimasukkan lagi ke penjara Sukamiskin selama 1½ tahun.
- 1937 mendapat ampunan 3 bulan, ke luar dari penjara lalu pindah ke Balikpapan memimpin mingguan "Warta Umum".
- September 1937 pindah ke Palu dan menerbitkan mingguan "Penerangan" dalam bentuk stensilan beredar sam-

pai Poso, Luwuk, Toli, Manado, Gorontalo, Makassar dan Medan.

- 1940 bersama Haji Ince Makka menerbitkan majalah "Mingguan Baru" sampai Jepang masuk tahun 1942.
- 1947 menerbitkan majalah tengah bulanan "Bahaya".
- 1949-1950 pemimpin redaksi "Suara Sulawesi Tengah" terbit 2 x seminggu.
- 1952-1961 pimpinan "Mingguan Sulawesi" di Palu.
- 1963-1974 pimpinan redaksi mingguan "Duta Revolusi" suara PSII kemudian berubah nama menjadi "Nusa Putera" sekarang.

4. Nama : M. Yondi Maranua, Haji
Umur : 67 tahun.
Pendidikan : SR Kelas III
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Alamat : Kampung Lambera Kecamatan Tawaeli.

Kegiatan :

- Sponsor berdirinya partai politik Gerima di Tawaeli.
- Kepala Staf Gerakan Merah Putih di Tawaeli.
- Turut dalam penyerbuan tangsi militer di Besusu Palu tahun 1946 untuk membebaskan para tahanan tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih.
- Karena aktif dalam gerakan-gerakan menentang penjajah Belanda seama masa Revolusi Fisik, sekarang juga menjadi anggota Veteran RI.

5. Nama : A.C. Nurdin
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Anggota DPR Tkt. II Kabupaten Donggala
Alamat : Donggala
Kegiatan :

- Mengikuti perjuangan Kemerdekaan Indonesia, pada Revolusi fisik 1945.

- 1956 mengikuti Kongres perjuangan RI yang melahirkan Veteran Republik Indonesia di Jakarta.
- 1955-1958 memimpin majalah bulanan "Sinar" di Palu.
- Koresponden Harian Tinjauan di Ujung Pandang, dan berita V.I.A.
- 1952-1955 menjadi pegawai penerangan.

6. Nama : Kapten (Pol) pur. H. Djalaluddin
 Umur : 61 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Polisi
 Alamat : Donggala
 Kegiatan :

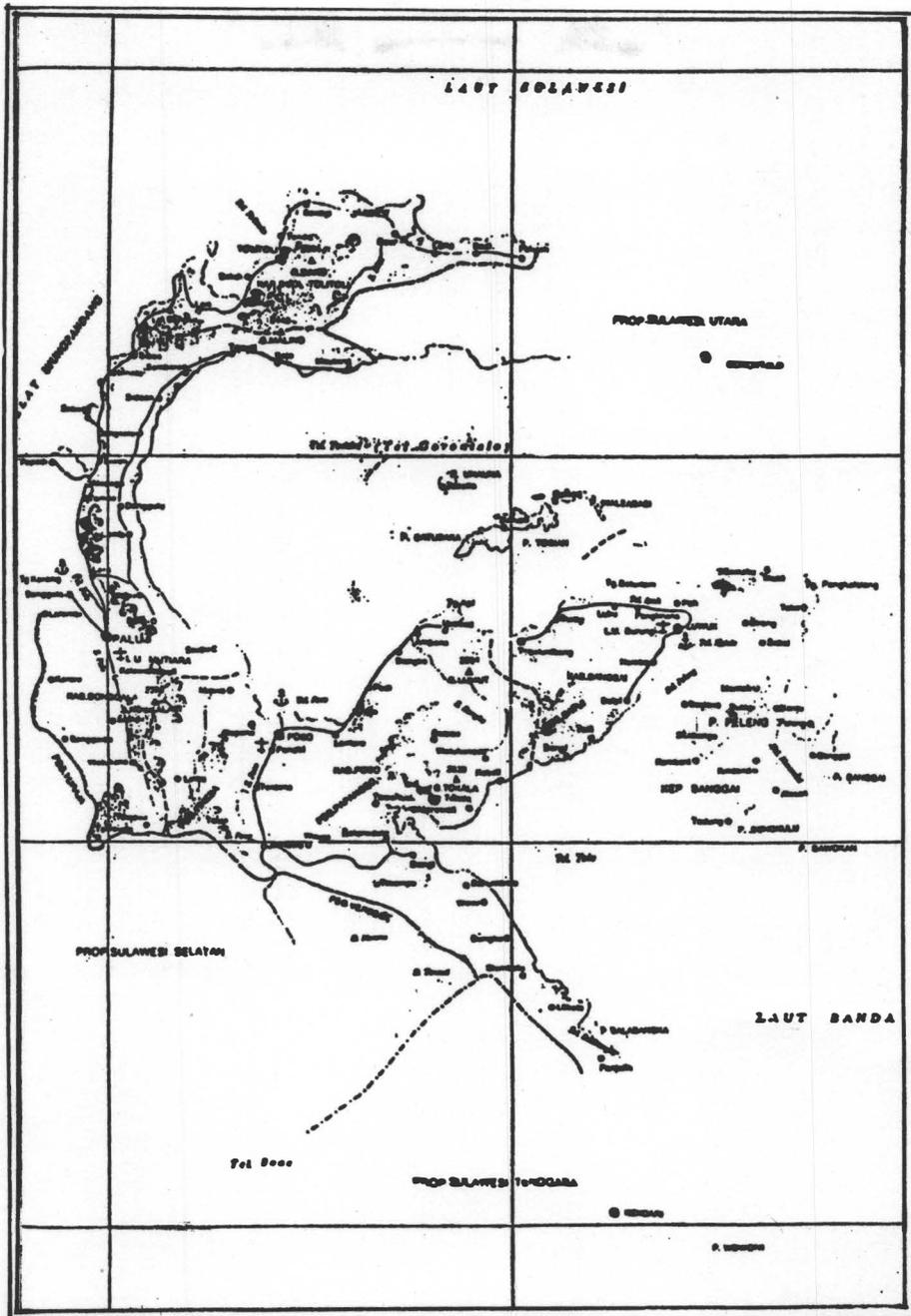
- Membantu perjuangan pemuda Merah Putih di Donggala pada waktu Revolusi pisik 1945.
- 1948 Komandan Sektor Distrik Sabang Kab. Donggala.
- 1956 Wakil Komandan perintis di Ujung Pandang.
- 1958 Kepala Bagian Polisi Lalulintas.
- 1960 mendapat penghargaan kenaikan pangkat istimewa dari pembantu Letnan dua ke pembantu Letnan satu, karena berhasil mengembalikan senjata Resort Kepolisian Donggala yang sudah dianggap hilang.
- 1963 berhasil menumpas gerakan D.I.T.I.I. di bawah pimpinan Kolonel T.I.I. Muh. Rasyid bersama anak buahnya.
- 1963 Kepala Distrik Kepolisian Donggala.
- 1981 Kepala Bagian pengamanan pada sekretariat pemilihan umum P.P.D. Tkt. I Sulawesi Tengah di Palu.

7. Nama : Andi Parenrengi Lasabanawa Lama-rauna
 Umur : 70 tahun
 Pekerjaan : Anggota D.P R Tingkat II Kabupaten Donggala
 Alamat : Jln. P K K D No. 24 Donggala Kecamatan Banawa.
 Kegiatan :

PROPINSI SULAWESI TENGAH

170°

172°



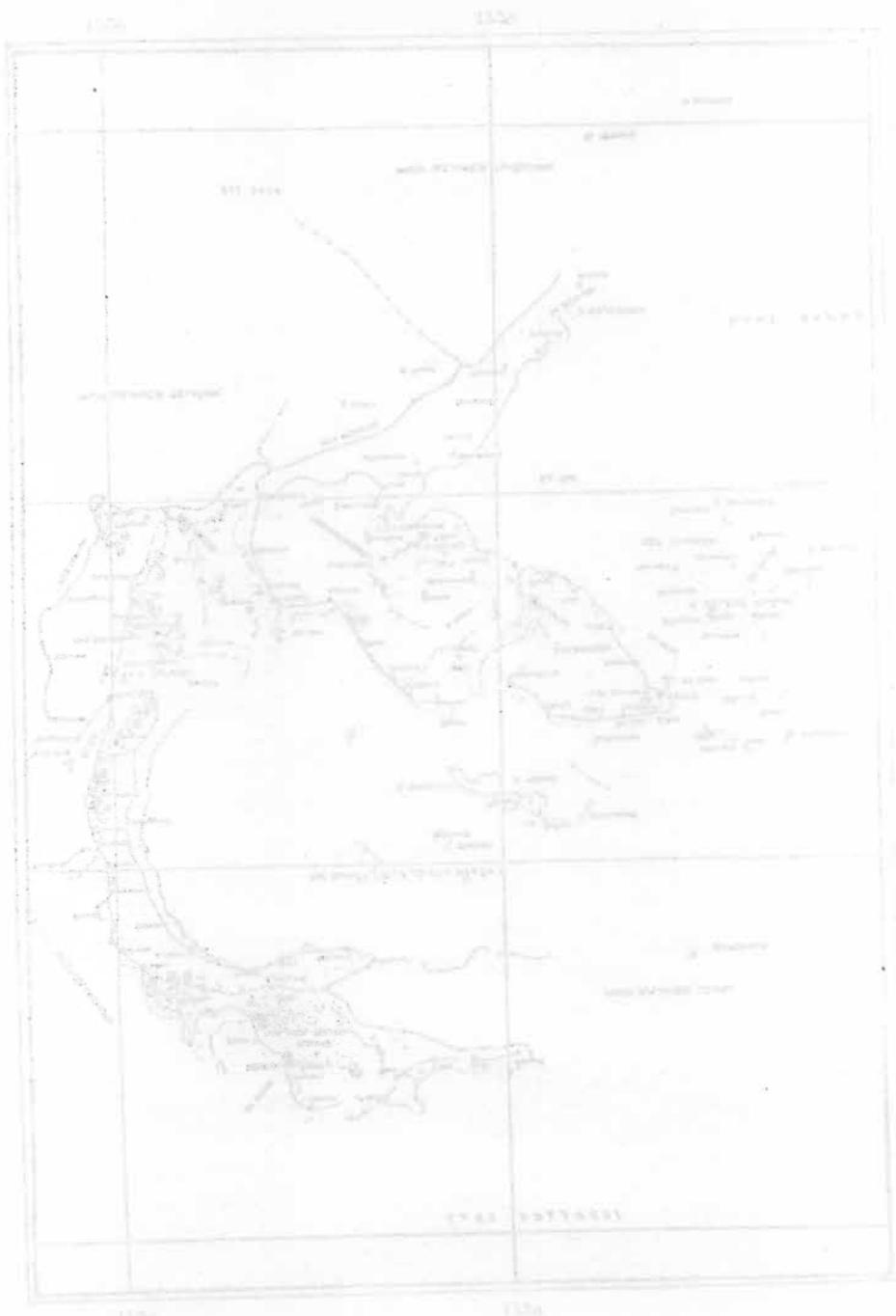
0°

20

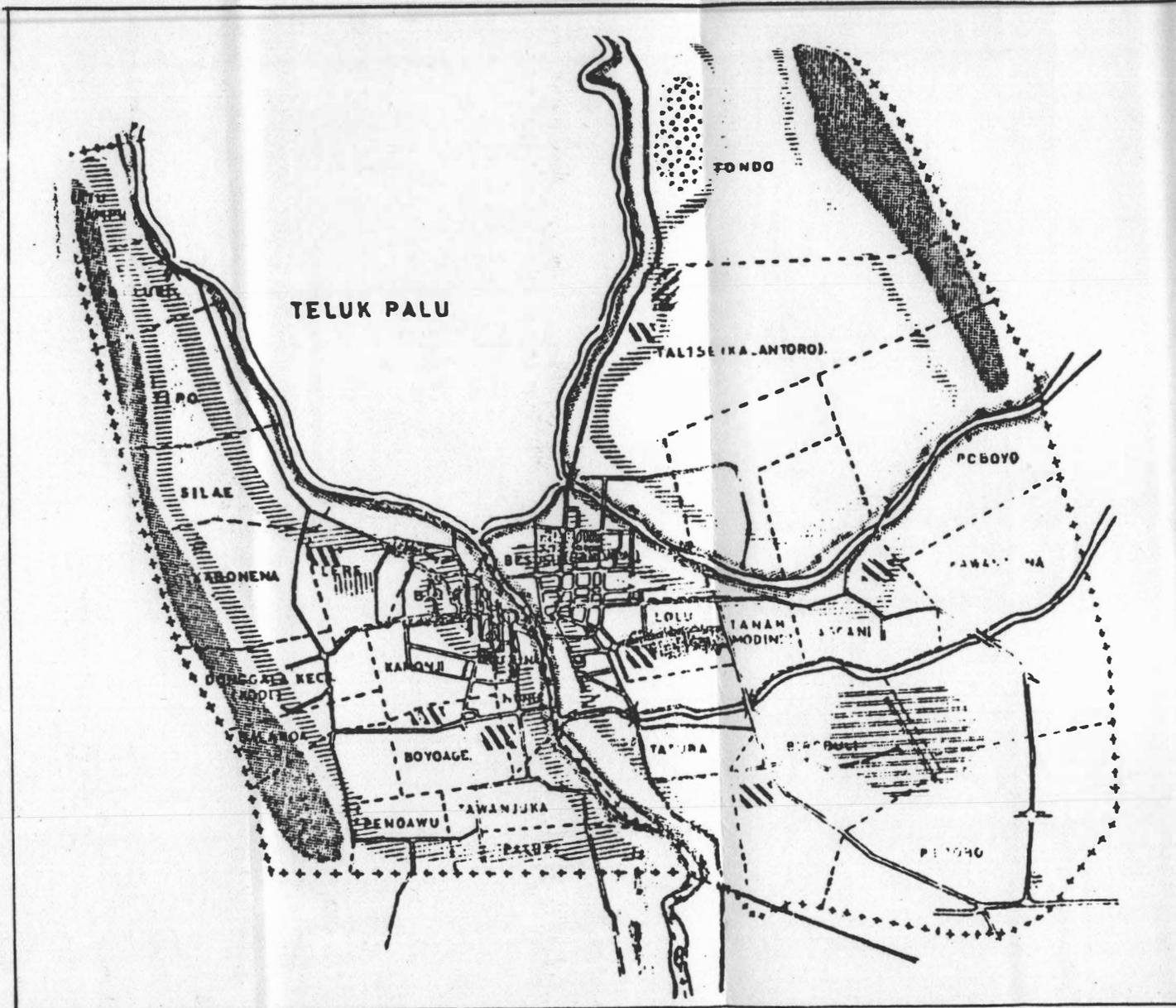
40

170°

172°



KAWASAN BANIANG SIAMANG



**RENCANA INDUK KOTA
PALU**

**RENCANA TATA GUNA
TANAH**

- KETERANGAN**
-  PEMERINTAHAN
 -  PERDAGANGAN
 -  PERUMAHAN
 -  PENDIDIKAN
 -  INDUSTRI
 -  LAPANGAN TERBANG
 -  SUB PUSAT/PUSAT LINGKUNGAN
 -  JALUR HIJAU
 -  KOMPLEK MILITER

SKALA : 1 : 65.000



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
DONGGALA

<p>  ҲАҚИҚАТ  ҚИСҚА  ҚИСҚА  ҚИСҚА </p>	<p> ҚИСҚА ҚИСҚА ҚИСҚА ҚИСҚА </p>
<p>  ҚИСҚА  ҚИСҚА  ҚИСҚА  ҚИСҚА </p>	<p> ҚИСҚА ҚИСҚА ҚИСҚА ҚИСҚА </p>
<p>  ҚИСҚА  ҚИСҚА </p>	<p> ҚИСҚА ҚИСҚА </p>



TABLE II

YAKATO

Outstanding Subscriptions	Indians			Koreans and other nationalities			Chinese			African, Spanish, Portuguese, Other Asiatics			Total	
	Number	Yuan	Total	Number	Yuan	Total	Number	Yuan	Total	Number	Yuan	Total	Number	Yuan
Yakato	23,224	23,516	46,740	30	20	50	302	368	670	137	61	198	32	32
Demongol	28,646	28,112	56,758	29	27	56	616	672	1,288	177	67	244	37	37
Tsai-Tai	12,220	11,220	23,440	1	1	2	617	618	1,235	180	20	200	12	12
Beidai	11,220	11,107	22,327	1	1	2	615	616	1,231	181	20	201	11	11
Algerian Demongol	11,772	11,221	22,993	20	20	40	1,624	1,624	3,248	313	602	915	60	60
Id.	10,118	22,512	32,630	65	21	86	720	741	1,461	207	101	308	119	119
Yakato	12,220	12,220	24,440	0	0	0	102	102	204	31	16	47	10	10
Demongol	16,220	16,220	32,440	133	132	266	517	516	1,034	511	64	1,175	130	130
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	120	122	242	625	627	1,252	206	75	281	120	120
Id.	11,220	11,220	22,440	120	122	242	625	627	1,252	206	75	281	120	120
Yakato	23,224	23,224	46,448	43	22	65	624	624	1,248	301	162	463	32	32
Demongol	28,646	28,220	56,866	14	14	28	612	612	1,224	62	66	128	16	16
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	208	191	399	616	616	1,232	131	307	438	131	131
Beidai	11,220	11,220	22,440	478	478	956	3,709	3,709	7,418	220	207	427	616	616
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,291	1,292	2,582	9,241	9,241	18,482	727	616	1,343	1,372	1,372
Id.	11,220	11,220	22,440	576	576	1,152	4,276	4,276	8,552	417	276	693	607	607
Yakato	43,224	43,224	86,448	22	22	44	1,126	1,126	2,252	60	37	97	16	16
Tsai-Tai	11,220	11,220	22,440	20	11	31	135	135	270	12	3	15	11	11
Beidai	11,220	11,220	22,440	22	11	33	122	122	244	72	40	112	22	22
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	22	11	33	122	122	244	72	40	112	22	22
Id.	11,220	11,220	22,440	22	11	33	122	122	244	72	40	112	22	22
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Algerian Demongol	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Id.	11,220	11,220	22,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Yakato	23,224	23,224	46,448	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Demongol	28,646	28,220	56,866	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Tsai-Tai	12,220	12,220	24,440	1,624	1,624	3,248	11,220	11,220	22,440	1,624	616	3,240	1,624	1,624
Beidai	11,220	11,220												

